



Sejarah Konflik

POLITIK INDONESIA

PENERBIT: PT. AKADEMI VIRTUAL MEDIA

JAMBI - INDONESIA

SEJARAH KONFLIK POLITIK INDONESIA

Oleh:

Dr. Jafar Ahmad
Muawwin Sutan Mudo

Cover Oleh
Shahib Fadlani

© PT. AKdemia Virtual Media
Bagan Pete, Alam Barajo, Kota Jambi
Provinsi Jambi – Indonesia

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Diterbitkan pertama kali oleh PT. Akademia Virtual Media

Cetakan kesatu Juli 2021
141 halaman

ISBN: 978-623-97-5130-2

KATA PENGANTAR

Kehadiran buku ini merupakan sedikit ikhtiar untuk menuntun publik agar memahami politik dalam perspektif yang benar, dengan menggunakan pisau analisis berdasarkan ilmu pengetahuan, yang bersumber dari pemahaman teori politik. Sehingga, perdebatan politik di ruang-ruang publik, tidak lagi merupakan debat kosong, melainkan debat yang bersumber dari ilmu pengetahuan.

Melalui buku ini, penulis hendak meluruskan persepsi keliru sebagian masyarakat, yang antipati dan sangat membenci politik. Yang dibenci perangnya atau politik sebagai ilmu pengetahuan?. Ini penting untuk diluruskan. Banyak masyarakat membenci politik karena melihat tabiat atau perangai politik aktor-aktornya. Padahal, politik sebagai ilmu pengetahuan itu wajib dipelajari, dia bukan makhluk dan tidak memiliki perangai buruk. Perangai manusialah yang menciderai politik itu. Sesungguhnya, politik adalah sebuah cara dan ikhtiar yang dilakukan umat manusia untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran dan kesetaraan.

Penulis mengajak pembaca untuk menelusuri dan membaca berbagai peristiwa politik, sejak masa orde lama hingga masa orde baru, melalui perspektif teori politik. Sehingga pembacaan terhadap sebuah peristiwa politik yang rumit menjadi terurai lebih mudah. Semoga buku ini bermanfaat.

Penulis

Dr Jafar Ahmad Msi

Awin Sutan Mudo

TENTANG PENULIS

Dr Jafar Ahmad Msi

Dia adalah seorang akademisi, yang kini menjabat sebagai Wakil Rektor II IAIN Kerinci, Jambi. Dr Jafar Ahmad Msi menyelesaikan studi doktoralnya di bidang ilmu politik di Universitas Indonesia. Dr Jafar Ahmad Msi punya pengalaman panjang di dunia politik. Semasa di kampus pernah menjadi Presiden Mahasiswa di UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi. Pasca tamat ia melanjutkan karir politiknya sebagai anggota KPU Muaro Jambi. Sebelum kembali ke kampus, Dr Jafar Ahmad Msi pernah dipercaya menjabat Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jambi. Bapak tiga anak ini juga seorang CO Founder Idea Institute Indonesia, sebuah lembaga riset dan khusus melakukan kajian sosial politik di Indonesia.

Awin Sutan Mudo

Awin Sutan Mudo adalah nama pena Muawwin. Pria kelahiran Kerinci 25 April 1985 ini menapaki karir menulisnya sebagai jurnalis di harian Jambi Independent (Jawa Pos Grup). Wawasan dan pergaulannya kian luas saat kantor menugaskannya ke Jakarta, menjadi kontributor selama 1 tahun. Ia kerap memperoleh fellowship jurnalistik, salah satunya program Investigasi Bersama Tempo angkatan III. Di majalah itu, kemampuan menulis dan investigasinya kian terasah. Ia juga pernah terlibat dalam satu proyek investigasi korupsi tambang Batu Bara, yang didanai oleh Transparansi Internasional Indonesia (TII). Pernah mengagas berdirinya Koran Harian Seru

Jambi dan kini aktif di portal media Jambi Link. Selain aktif di media, Awin juga menulis buku biografi sejumlah tokoh, mulai dari gubernur, pengusaha maupun politisi. Tercatat sudah 5 buku yang ia tulis. Di bawah bendera Akademia Virtual Media, saat ini ia sedang menyusun sebuah novel politik dan menulis buku-buku politik.(*)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
TENTANG PENULIS	ii
BAB I Politik di Sekitar Kita	1
Musuh Negara	1
4 Kunci Menang Pilkada.....	2
Rahasia Kekuasaan Soeharto.....	7
Tabiat Penguasa	12
Mengapa Banyak Politisi Meniru Soekarno?	15
Demokrasi Akomodir Politik Dinasti?	19
BAB II Konflik Elit Politik di Indonesia	24
Penjara Hamka	24
Sejarah Kapitalisme di Indonesia	27
Isu Kudeta Dibalik Kisah Lengsernya Soeharto	42
Seteru Militer (Prabowo Vs Wiranto) di Ambang Pintu Reformasi	53
Penculikan Aktivis	60
Momentum Krisis Ekonomi	61
Clinton Percepat Kejatuhan Soeharto	63

BAB III Konflik Politik dan Disintegrasi di Indonesia 70

Pertarungan Elit Menjelang Lengsernya Presiden B.J. Habibie 70

Membaca Peran AS – Australia dan Motiv Perang
Minyak Di Balik Hengkangnya Timor Timur dari NKRI..... 85

Timtim Hengkang Habibie Terhadap..... 97

BAB IV Aliran Politik dan Konflik Politik di Indonesia102

Aliran Islam Akibat Reduksi Konflik Politik 102

Partai Masyumi..... 105

Marhaenisme 108

Sosialisme..... 112

Nasionalis Kiri 118

Perangai Manusia Versi Machiavelli..... 121

Abangan Versus Putihah 129

Sejarah Ringkas Pancasila..... 135

DAFTAR PUSTAKA 140

**POLITIK SELALU MENGAJARKAN KITA BETAPA KEKUASAAN
TELAH MEMBANGUN PERADABAN BESAR DAN DI LAIN
WAKTU MERUNTUHKANNYA MENJADI ABU**

BAB I

POLITIK DI SEKITAR KITA

Musuh Negara

Banyak informasi keliru dalam membaca mereka yang memusuhi negara. Kadang mereka langsung diidentikkan pada pemahaman atau ideologi tertentu : kanan ekstrim, kiri parah, dan seterusnya.

Nah, sebelum semua itu menjadi analisis utama, ada baiknya memulai menganalisis PERANGAI mereka, sebagai akibat dari pembagian sumber kekayaan yang tak adil. Kalau itu sudah jelas jawabannya, barulah analisis Anda bergerak ke sebab lain.

Sebelum membaca bagaimana perilaku para musuh-musuh negara, ada baiknya kita awali pemahaman dengan defenisi Negara. Negara, dalam pandang penulis, tidak boleh ditengok secara tunggal. Ia sebenarnya adalah kata benda. Karena dia kata benda, maka, sesuai sifatnya dia tentunya netral.

Tengok saja bagaimana potret negara ini sejak zaman Soekarno. Namanya Indonesia. Turun ke Soherato, namanya tetap Indonesia. Berlanjut ke Habibie, Gusdur, Megawati, SBY hingga Presiden terkini, Jokowi. Nama Negara tak berubah, tetap Indonesia. Indonesia sebagai negara, tentulah berposisi netral. Yang berbeda adalah perilaku aktornya.

Begini.

Orang-orang orde lama misalnya, tentu merasa ada perbedaan ketika orde baru berkuasa. Sebaliknya, orang-orang orde baru tentu akan merasa ada perbedaan ketika hidup di era Habibie, Gusdur, Mega dan seterusnya.

Akan ada terus perbedaan. Sekali lagi..yang berbeda bukan negaranya, tapi, perilaku aktornya. Disinilah kuncinya. Nah, Agar tak keliru menafsirkan sebuah negara, yang mesti dianalisis sebetulnya adalah perilaku orang yang mengelola negara.

Sehingga.....

Kita tak akan terjebak ke penafsiran keliru. Dengan begitu, kita tentu tak akan menemukan orang yang membenci negara. Sebab, negara itu, jika dikelola dengan baik, dia akan menjadi baik. Dan sebaliknya pula. Makanya, sebenarnya tidak boleh ada dan jangan sampai pernah ada orang membenci negara. Sebab negara tidak salah. Yang salah, mungkin perilaku aktor yang mengelolanya. Penulis amat menyayangkan bagaimana perilaku kelompok separatis, yang cenderung menjadikan negara sebagai musuh. Bukan mengkritisi perilaku aktornya.

Lantaran keukeuh memandang negara sebagai musuh, ujung-ujungnya, mereka menjadi pemberontak. Beberapa misalnya memilih hengkang ke negara lain. Karena yang mereka musuhi adalah negara. Bukan perilaku aktor yang mengelola negara. Ini yang keliru.

Penulis ingin mengajak pembaca budiman memahami peristiwa itu secara benar. Bagaimana mampu membaca perilaku aktor negara sekaligus kelompok penentangannya. Sehingga, anda akan cakap menganalisis suatu peristiwa secara jernih. Karena itu, Saya bersikeras, kalau ingin menganalisis peristiwa politik, maka, analisis lah dari aktor. Siapa dan apa kepentingannya. Dari situ, kita akan mudah melihat bagaimana perilaku negara.

Juga sebaliknya, kita akan bisa melihat secara terang, siapa-siapa dan apa motif para perilaku orang-orang yang memusuhi negara. Keduanya mestilah dianalisis dengan cara yang sama.

Bagaimana melihat perilaku musuh negara misalnya, bisa dimulai dari membaca motif adanya sumber daya mereka yang terganggu. Mereka merasa negara tak seiring sejalan dengan kepentingannya. Makanya, mereka melakukan berbagai upaya untuk menjegal negara.

Sampai sejauh ini, sepengetahuan saya, jika ingin menganalisis peristiwa politik, sekali lagi mulailah dari menganalisis kebutuhan utilitas manusianya. Dalam konteks politik, kita akan selalu melihat pertarungan itu terjadi karena dilatarbelakangi oleh perebutan sumber daya.

4 Kunci Menang Pilkada

Apa saja kunci kemenangan dalam kontestasi Pilkada?. Penulis akan membekali anda sebuah senjata, untuk menganalisis peristiwa dari persepektif teori politik, sehingga anda akan mampu mempetakan siapa-siapa kandidat yang berpotensi unggul sebagai pemenang pada setiap kontestasi.

Semua peristiwa politik membius. Ia menjadi magnet bagi banyak orang. Semua mata melotot padanya, terutama ajang pemilihan kepala daerah, baik Bupati atau Gubernur. Siapa kandidat yang berpeluang menang, menjadi pertanyaan yang kerap membuhul di kepala publik. engan keterbatasan ilmu, acapkali publik terjebak dalam prediksi-prediksi dan analisis

yang, maaf, kadang-kadang ngawur. Tak sedikit, yang lalu menjadikan dukun sebagai tempat menujurnya.

Karena itu, penjelasan ini penting supaya publik bisa objektif menilai kekuatan diri. Ada semacam delusi kesadaran, yang kerap menghinggapi kepala kandidat atau timses.

Apa itu? Semacam persepsi yang selalu merasa dia kuat dan didukung oleh publik. Ini gara-gara, kemanapun ia pergi, selalu berjumpa publik yang bejubun. Publik yang kerap menyemut dan gegap gempita menyambutnya di tiap pertemuan. Dari kepingan data itu, terkadang timses maupun kandidat bergegas menarik kesimpulan. Terjadilah sebuah ilusi sendiri, persepsi bahwa ia betul-betul kuat. Padahal, kesimpulan yang ditarik hanyalah kesimpulan induktif. Ia, belumlah memperoleh data yang menyeluruh di lapangan.

Faktanya, ada banyak orang yang tidak ditanya, apakah mendukung dia atau tidak. Itu yang harus dipahami. Kadang kita kasihan melihat beberapa calon kok pede betul merasa didukung banyak orang. Ketika disampaikan informasi yang objektif, kadang dia tak mau. Ilmu pengetahuan telah menyuguhkan kepada kita bagaimana cara membaca peristiwa politik, wabil khusus ajang Pilkada lima tahunan itu.

Ada teori Modal Pierre Bourdieu yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan kontestasi dalam Pilkada itu. Dengan teori modal ini, setidaknya publik punya bekal senjata untuk memprediksi siapa-siapa kandidat yang berpotensi menang dalam kontestasi.

Bourdieu menjelaskan fenomena sosial dalam sebuah perumpamaan. Kita laksana hidup dalam sebuah arena. Arena

itu diisi oleh para habitus. Dalam konteks pilkada, habitus adalah calon kepala daerah dan para pendukungnya. Habitus ini berkompetisi dalam sebuah arena untuk memenangkan kontestasi. Nah...Kemenanannya itu akan ditasbihkan sebagai sesuatu yang akan diikuti oleh habitus lain. Dia menjadi habitus yang superior dan itu namanya doksa.

Secara teori, Bourdieu menyebut habitus haruslah punya modal untuk memenangkan kontestasi, agar ia menjadi habitus superior, agar menjadi habitus yang unggul itu. Ada empat modal. Ada modal sosial. Ada modal kultural. Ada modal Ekonomi dan terakhir modal simbolik.

Disebut punya modal sosial karena ia memiliki jaringan sosial yang sangat kuat. Semakin luas jaringannya, semakin kuat pula modal sosialnya. Sebaliknya, semakin sedikit jaringannya, semakin kecil pula modal sosialnya. Semakin besar modal sosial yang dipunyai, semakin besar pula kemungkinan dia memenangkan kontestasi. Besar kecilnya modal sosial bisa menjadi kunci untuk mendatangkan kemenangan.

Dari mana sumber modal sosial? Bisa dari kesukuan. Seorang kandidat misalnya, berasal dari anggota suku terbesar di sebuah wilayah. Dia punya jaringan organisasi yang luas, yang bisa dikendalikan, yang bisa diorganisir. Semakin besar itu, semakin besar pula modal sosialnya.

Lalu modal kultural berkaitan dengan kepemilikan pengetahuan, kecakapan atau kapasitas diri. Mislanya begini, ia punya kemampuan retorika yang hebat, mampu memmanage orang, piawai menempatkan baliho yang bagus dan enak dipandang mata. Ini terkait dengan bagaimana kemampuannya

menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian modal ekonomi. Modal ini memungkinkan seseorang untuk menggerakkan modal-modal lain. Ini berkaitan dengan stok fulus di kantong. Dia punya jaringan yang kuat dan besar, tapi, gak punya modal ekonomi menggerakkan jaringan itu...ya...tak bisa.

Terakhir modal simbolik. Misalnya dia cucu pangeran A. Atau ia mewarisi darah biru atau tokoh besar. Modal simbolik bisa dimiliki dari dua lain. Misalnya dari kerjasama tiga modal tadi–Sosial, Kultural dan Ekonomi–. Dia sudah kaya, berpendidikan, jaringannya banyak, nah..secara simbolik dia otomatis akan jadi orang kuat. Modal simboliknya akan terbentuk sendir.

Logiknya gini, semakin besar seluruh modal yang dipunyai, maka, semakin besar kemungkinan dia menang. Melihat calon yang bertarung, kita bisa ukur. Seberapa besar modal yang dimiliki. Dari modal tadi, kita sudah bisa menduga siapa yang akan menang. Dengan kekuatan modal yang ada, para calon mestilah mengukur diri. Nah...Bayangkan, rumitnya peristiwa politik bisa dijelaskan hanya dengan 4 hal itu. Kalaulah kita mau menganalisis politik, alatnya sudah tersedia. Bisa digunakan dengan sederhana dan praktis.

Pertanyaan selanjutnya, dari modal politik yang ada, modal mana yang paling kuat (Maksudnya, modal yang paling berpeluang mengantarkan calon ke garis finish kemenangan)?

Tentulah modal ekonomi....

Alasannya? Modal ekonomi memastikan modal lain bisa bekerja.

Rahasia Kekuasaan Soeharto

Bagaimana rahasia Jenderal Soeharto melanggengkan kekuasaannya hingga 32 tahun?.

Dalam ilmu politik dikenal sebuah teori yang disebut patron klien. Patron adalah orang yang mempunyai kekuasaan terhadap para klien karena ia memiliki kelebihan dalam hal kemampuan dibandingkan dengan para kliennya. Kemampuan tersebut adalah pengaruh dan sumber-sumber kebutuhan hidup. Dengan kelebihan tersebut ia dapat memberikan perlindungan dan kebutuhan hidup yang diperlukan oleh orang lain yang kemudian bersedia menjadi kliennya. Patron memiliki kedudukan tinggi, pengaruh dan kuat secara finansial. Faktor penting yang menyebabkan seseorang menjadi patron dalam kelompok patron klien adalah ketergantungan para klien secara materil kepada patron. Ketergantungan itu menyebabkan para klien menggantungkan sumber-sumber penghasilannya kepada patron. Para klien dan keluarganya memperoleh pekerjaan dan penghasilan dari resources yang diberikan oleh patron. Akibat hubungan itu, klien akan membela patron mereka dengan mengorbankan apapun, termasuk nyawanya dalam memberikan dukungan politik dan membantu patron mempertahankan, memperkuat kekuasaan serta melanggengkan kedudukan politik patron. (Maswadi Rauf,2000).

Dalam konteks patrimonialisme tersebut, Soeharto, yang memiliki kekuasaan sebagai Presiden, punya modal kapital yang

kuat adalah patron. Ia punya klien yang banyak sekali. Dari Menteri, Panglima TNI, Kapolri, hingga pengusaha. Sebagai klien, mereka memperoleh keuntungan—baik kekuasaan ataupun sumber ekonomi— dari loyalitasnya kepada patron. Sehingga mereka menjadi sangat tergantung kepada si patron. Mereka misalnya, akan merasa kehilangan, merasa terancam—terutama kebutuhan ekonominya—, jika Soeharto turun tahta. Karena itu mereka berupaya sekuat tenaga untuk terus mempertahankan kekuasaan si patron.

Sebaliknya, sebagai patron, Soeharto terus memupuk kliennya, hingga mereka merasa ketergantungan. Mereka mendapat jabatan dan akses ekonomi yang kian besar. Sementara masyarakat di akar rumput berselimut kemiskinan, lehernya dijerat utang atau makan seadanya, mereka tak peduli. Dari hari ke hari, tatanan politik yang dibangun semakin kuat. Tahtanya kian kokoh. Semua elit berusaha keras untuk tetap berada di zona itu. Zona nyaman dan melenakan itu. Karena nyaman, para elit pasti mendukung si patron. Andaikan patron runtuh, akan timbul kecemasan. Mereka akan merasa sumber kekayaan akan hilang. Nah, inilah yang dibangun Soeharto selama bertahun-tahun.

Lalu, mengapa Soeharto bisa runtuh?

Hubungan patron klien tadi tidak kekal dan bisa runtuh, salah satunya karena muncul ketidakpastian tentang sumber-sumber penghasilan yang amat menentukan hidupnya. Ada kemungkinan pula klien mendapatkan patron baru yang bersedia memberinya resources. Keluarnya klien mempunyai pengaruh terhadap kekuasaan patron bila jumlah klien yang

keluar cukup besar. Inilah yang terjadi menjelang berakhirnya kekuasaan Soeharto. Banyak kliennya, mulai dari para menteri, tentara, pengusaha yang selama 32 menyokongnya, ramai-ramai keluar. Mereka merasa Soeharto sebagai patron sudah tidak dapat memberikan resources. Ini ditandai misalnya dengan mundurnya 15 menteri dan mereka menolak dilibatkan dalam kabinet reformasi yang akan dibentuk Soeharto. Dan terjadinya pula perpecahan di internal militer.

Fenomena keruntuhan Soeharto yang sangat kuat itu dapat pula penulis jelaskan dengan menggunakan teori gerakan sosial. Secara teori, ada tiga syarat terjadinya gerakan sosial. Dari momentum, mobilisasi sumber daya hingga framing atau pembedingkaian. Runtuhnya Soeharto, berawal dari sebuah momentum yang bernama krisis ekonomi, tahun 1997. Dari sanalah muncul kesempatan politik dimana para elit di lingkaran kekuasaan, pecah. Badai krisis memantik ketidaknyamanan dikalangan elit, sehingga mereka merasa kekuasaan Soeharto tak bisa lagi dipertahankan. Terjadilah mobilisasi massa hingga pembedingkaian sebuah isu, bernama KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Kalaulah kenyamanan bisa dipertahankan, Soeharto tidak akan jatuh. Tengok saja Mahatir, dia tidak jatuh. Karena dia bisa mempertahankan kenyamanan di internal elit.

Ada sebagian anggapan yang menyebutkan Soeharto jatuh karena operasi intelijen asing, mungkin saja ada bagian dari itu. Tapi, intinya, bahwa seorang akademisi harus mampu menganalisis peristiwa politik dari sebuah teori, yang sudah secara umum diakui. Kalaulah tidak melihat peristiwa dari

kacamata teori, kita akan riweh sendiri. Teori adalah penjelasan sistematis terhadap peristiwa yang rumit. Misalnya ada peristiwa di daerah A, diteliti, dan ditemukan variabel atau konsep. Nah, konsep-konsep itu dihubungkan, lalu di analisis dan dibuatkan rangkuman sistematis untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi.

Semakin baik sebuah teori, jika tingkat generalisasinya lebih luas. Dia misalnya, tak hanya bisa digunakan di Jambi, tapi, juga bisa dipakai di Jakarta, maupun di belahan dunia manapun. Sadar atau tidak, kita hidup dengan menggunakan sebuah teori. Kadang ada orang suka merendahkan, ahhh... itu hanya teori. Prakteknya mana?. Padahal, seluruh perjalanan hidup kita sebenarnya diisi oleh keputusan-keputusan berdasarkan teori. Baik secara tertulis ataupun tidak. Nah, fenomena kejatuhan Soeharto yang sangat rumit itu bisa dijelaskan dengan teori gerakan sosial maupun patron klien.

Dalam politik, teori itu banyak sekali. Turunannya juga banyak.

Misalnya untuk menjelaskan perilaku memilih. Kita bisa menggunakan teori psikologi. Kita juga bisa pinjam teori ilmu ekonomi. Ketika menganalisis peristiwa politik, seseorang mesti mencari teori yang tepat untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Keliru menggunakan teori terhadap suatu peristiwa, kita akan salah menganalisis. Boleh jadi kita tak menemukan inti dari sebuah peristiwa politik, karena kita keliru menggunakan teori.

Dari sekian banyak teori politik itu, sebetulnya hanya menjelaskan empat hal saja. Bagaimana merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, memperluas kekuasaan dan

meruntuhkan kekuasaan. Seperti teori gerakan sosial tadi, bisa dipakai untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan diruntuhkan. Kekuasaan, secara teori, baru akan runtuh ketika memenuhi tiga syarat.

Pertama, terjadi kesempatan politik. Dimana model politik menjadi tercerai berai karena elitnya pecah, sehingga terjadilah konflik. Maka, jangan coba-coba mau meruntuhkan rezim, ketika elitnya sedang solid. Secara teori tak akan bisa. Kedua, gerakan sosial baru bisa efektif, ketika ada mobilisasi sumber daya. Ada uang, ada barang yang dimobilisir atau dimanfaatkan untuk gerakan sosial. Lalu, ada framing alias pembingkai. Ada isu yang secara terus menerus dihembuskan. Isu itu dipropagandakan sehingga kelompok gerakan sosial terbingkai dalam satu isu. Misalnya dalam kasus tumbangnya Soeharto tadi, digunakanlah framing isu KKN. Sehingga model gerakan akan terfokus. Kalau tidak ada framing, gerakannya tak akan terfokus.

Mengakhiri tulisan ini, penulis hendak menyatakan seluruh riset dan penelitian, hanya berusaha untuk memperlakukan teori dengan tiga cara. Menguji teori dengan menemukan apakah teori itu bisa digunakan atau tidak. Kalaulah bisa, itu namanya konfirmasi teori. Jika tidak, itu namanya klasifikasi teori atau mengkonstruksi teori baru. Tapi, jika ada temuan-temuan tambahan dari teori yang ada, itu namanya revisi teori. Tugas riset para sarjana, magister dan doktor ilmu politik, hanya berputar tiga hal itu. Pandai membaca teori, pandai pula membaca peristiwa politik yang rumit dan pelik.

Tabiat Penguasa

Mengapa kekuasaan dikejar-kejar? Bahkan lewat pertumpahan darah sekalipun. Bagaimana tabiat para penguasa? Hingga praktik korup dan kesewenangan-wenangan merajalela. Lalu Bagaimana kekuasaan dikontrol? Agar praktik otoritiasme tak meraja?

Perilaku manusia selalu didrive atau dipengaruhi oleh utilitas atau kepuasan. Utilitas itu ada dua, yaitu kepuasan materil, yang wujudnya kelihatan. Utilitas Materi ini misalnya, kepuasan untuk menumpuk harta kekayaan. Kepuasan untuk memiliki istri cantik atau suami kaya, misalnya. Kepuasan untuk menggenggam banyak uang. Utilitas ini mendorong semua orang untuk menguasai benda atau materi. Yang kedua adalah utilitas Non Materi, yaitu kepuasan yang bukan berbentuk materi. Kepuasan bentuk ini misalnya, mendorong orang untuk menjadi ahli ibadah. Seseorang misalnya, baru akan puas kalau bisa beribadah tiap waktu, ibadah tak kenal henti. Utilitas jenis ini bisa pula dalam bentuk pendidikan. Ia merasa puas jika sudah menyandang gelar doktor atau profesor.

Perbedaannya, utilitas materil cenderung terbatas jumlahnya. Semenara utilitas non materil cenderung tak terbatas. Misalnya begini.

Jika orang ingin ibadah, dia tentu tak perlu merasa bersaing dengan orang lain. Tak ada konflik dalam mengejar ibadah. Tak ada batas dalam ibadah. Sehingga tak ada kompetisi. Sementara

utilitas materil, didominasi oleh kebutuhan kebendaan. Karena jumlahnya terbatas, didalamnya cenderung ada kompetisi dalam memperolehnya.

Sikap dan cara untuk mendapatkan utilitas materi itu macam-macam. Ada lewat jalan bisnis, ada dengan cara merebut harta warisan, ada yang mencuri, ada yang menipu, macam-macam. Dibalik itu semua, ada satu alat yang dengannya, semua sumber daya materi itu relatif bisa dikuasai dengan mudah. Alat itu bernama **Politik**. Yang menjadi pertanyaan, mengapa politik bisa memenuhi hasrat kepuasan seseorang?.

Politik adalah satu alat dimana wewenang bisa didapat. Semakin tinggi jabatan politiknya, semakin tinggi pula wewenangnya. Wewenang memungkinkan seseorang bisa mengumpulkan sumber daya sebesar-besarnya. Maka, politik hadir menjadi alat bagi seseorang untuk mengejar kepuasan materil, untuk merebut sumber daya tersebut. Karena itu, menjadi lazim ketika perebutan wewenang terjadi diantara aktor-aktor politik. Dengan kewenangan besar yang dimiliki, mereka bisa menguasai sumber daya. Dengan begitu, terpenuhilah kepuasannya, utilitas materil itu.

Lalu menjawab mengapa banyak orang mengejar kekuasaan? Karena dengan kekuasaan, seseorang berpeluang untuk menumpuk kekayaan. Kekuasaan memberi peluang bagi seseorang untuk mengumpulkan resources dan materi sebanyak-banyaknya. Karena itu, seorang penguasa pastilah akan memaksimalkan kemampuan dengan segala wewenang yang dimiliki, untuk menguasai semua sumber daya yang ada. Caranya macam-macam. Ada yang sentralistik. Ada yang

didistribusikan ke orang banyak. Ada yang dibagi ke sebagian kecil publik.

Perilaku itu memungkinkan kelompok penguasa menggunakan segala cara untuk mengumpulkan sumber daya sebanyak-banyaknya. Memindahkan hak tanah kosong menjadi milik pribadi atau orang-orang tertentu, misalnya. Negara, hanya akan menjadi instrumen bagi aktor penguasa, untuk mengumpulkan sumber daya itu.

Kemudian bagaimana mengontrol kekuasaan?

Mulai muncul kesadaran dikalangan ilmuwan bahwa kekuasaan mesti dikontrol. Kenapa? Karena kekuasaan selalu bersifat sewenang-wenang. Semakin besar kekuasaannya semakin besar pula kesewenangannya. Ilmuwan di republik ini, sejak dulu telah berikhtiar keras. Mereka sadar kekuasaan perlu dibatasi. Soekarno misalnya, ketika kekuasaannya tak dibatasi, kelihatan mulai otoriter di akhir-akhir pemerintahan. Demikian pula soeharto. Semakin lama dia berkuasa, semakin kuat dan tampak kesewenang-wenangnya. Otoritariasme sudah tak bisa dipraktikkan. Maka, reformasi lahir dengan membatasi jabatan Presiden, jabatan Gubernur, jabatan Bupati. Mereka hanya dibolehkan berlaga dalam dua kali pemilihan. Itu salah satu kontrol atas kecemasan dan perilaku kekuasaan yang akan sewenang-wenang dan bisa saja merusak.

Misalnya, ada satu orang bisa menguasai berjuta-juta hektar tanah. Ini satu bentuk kesewenangan itu. Adanya lembaga-lembaga hukum semisal Kejaksaan, Pengadilan dan Kepolisian merupakan bentuk kontrol lain. Mereka hadir untuk mengontrol kekuasaan supaya tidak serakah. Disamping

munculnya BPK, BPKP, adapula KPK dan Ombudsman. Semuanya dibentuk untuk membatasi ruang gerak kekuasaan, yang acapkali sewenang-wenang. Untuk membatasi kekuasaan yang punya naluri mengumpulkan sumber daya sebesar-besarnya itu. Ibarat para penjaga. Lembaga-lembaga itu hadir secara kolektif untuk membatasi kesewenangan kekuasaan.

Mengapa Banyak Politisi Meniru Soekarno?

Mematutkan diri laiknya tokoh termasyhur adalah bagian strategi untuk memobilisasi dan mengantongi suara pemilih.

Anda sebagai seorang kontestan, tak ubahnya laksana seorang pegawai yang sedapat mungkin harus piawai memahami apa isi hati si bos. Supaya jabatan anda naik, supaya anda dicintai si bos. Sebagai seorang kandidat, anda laksana calon pengantin yang harus berikhitar keras, bahkan dengan segala cara, supaya bisa merebut hati si calon mertua. Dalam sebuah kontestasi, di level manapun, kepiawaian mencuri hati pemilih mutlak diperlukan. Jika anda ingin keluar sebagai pemenang, tentunya.

Tapi...bagaimana caranya?

Sejauh ini, ada tiga pendekatan perilaku memilih yang mesti dipahami. Pendekatan Sosiologis, Sikologis dan Pilihan Rasional. Pendekatan Sosiologis, berkaitan dengan perilaku memilih, yang menentukan pilihannya karena didasari hubungan sosiologis dengan kandidat. Misalnya dia satu suku dengan

kandidat. Satu Agama. Satu organisasi. Satu almater. Ini dinamakan hubungan sosiologis.

Bisa dimaklumi, dibanyak kasus tak jarang kandidat lalu mengkonstruksi atau membangun hubungan secara sosiologis dengan si pemilih. Si kandidat sadar, dia bukan dari etnis tertentu. Tapi, demi memperoleh suara, apalagi etnis itu tergolong mayoritas, si kandidat terpaksa mengkonstruksi dirinya sebagai bagian dari etnis tersebut. Dia mengkonstruksi diri sehingga mendapatkan surat dari kepala suku, yang menyatakan dia bagian dari suku itu. Atau berusaha menjadi bagian dari keturunan Raja. Atau memotong kerbau supaya diakui sebagai bagian dari komunitas etnis. Itu sebenarnya cara kandidat untuk mendekatkan diri dengan calon pemilih.

Berikutnya adalah pendekatan psikologis. Secara singkat, bagaimana seorang kandidat mampu memahami dan menggali faktor-faktor kesukaan si pemilih. Faktor suka itu banyak pula sumbernya. Bisa karena si calon mirip dengan tokoh yang pemilih idolakan, misalnya. Menjadi wajar, banyak calon yang coba-coba mematutkan diri dengan figur tertentu. Yang paling sering ditiru adalah tokoh termashur, Soekarno. Si kandidat, bahkan berusaha tampil gagah, memakai peci hitam di kepala, dan sengaja mengenakan pakaian khas Soekarno, supaya dianggap mirip dengan putra sang fajar itu. Ada calon yang berusaha membuat dirinya mirip dengan artis tertentu. Makanya, eksposur atau kemunculan citra diri seorang kandidat menjadi penting, untuk menarik pemilih yang mendasarkan pilihannya pada kesukaan personal figur.

Terakhir adalah pendekatan pilihan rasional. Ada asumsi, bahwa pemilih cerdas hanya memilih orang yang profesional, orang baik dan punya track record anti korupsi. Mereka lantas sering disebut pemilih rasional. Dalam konteks politik, pilihan rasional sejatinya bukan begitu.

Pilihan rasional adalah pilihan dimana seorang pemilih baru akan memilih ketika kebutuhan atau kepentingannya dipenuhi oleh kandidat. Kepentingan pemilih itu bisa macam-macam. Misalnya, mereka baru bisa memilih kalau jalan di sekitar rumahnya di aspal. Ada pula pemilih yang kepentingannya terpenuhi dengan imbalan uang Rp 200 Ribu. Dalam konteks politik, inilah yang disebut pemilih rasional. Mereka memilih karena tahu kepentingannya terpenuhi.

Untuk bisa memahami lebih dalam, lihatlah bagaimana proses pemilihan Rektor di berbagai kampus. Para guru besar itu tidak selalu menjatuhkan pilihannya karena melihat bagusnya figur Rektor. Tapi, mereka lebih melihat bagaimana kedekatan atau hubungannya dengan si calon Rektor. Apakah kepentingannya bisa terakomodir atau tidak.

Lalu di mana posisi Politik Identitas? Yang kerap dipakai dalam tiap Pilkada atau Pilpres? Politik identitas berada di posisi pendekatan sosiologis. Dia misalnya, identitasnya terhubung atau tidak dengan si kandidat, baik secara agama, suku atau lainnya. Identitas sangat mudah didrive dan dimobilisasi untuk menggerakkan pemilih. Salah satu yang paling menonjol adalah identitas keagamaan dan kesukuan. Dua hal ini paling mudah disulut. Agama dan suku hampir selalu digunakan dalam tiap kontestasi politik, di semua level. Termasuk Amerika.

Obama misalnya, ketika Pilpres sempat diidentitaskan sebagai sosok bukan asli Amerika. Karena ayahnya yang Afrika. Semua arena politik, kata Jafar, hampir selalu menggunakan identitas untuk mendrive pemilih, supaya memilih atau malah sebaliknya.

Pertanyaan selanjutnya, pendekatan mana yang paling kuat untuk mendapatkan suara? Masing-masing pendekatan tentu punya pengaruh kuat. Ada sisi baik dan sisi lemahnya. Penulis pernah melakukan riset terkait perilaku memilih ini. Temuannya menarik. Kelengketan atau kekuatan dukungan terhadap kandidat sangat besar kalaulah 3 unsur tadi terpenuhi sekaligus. Misalnya anda calon kepala daerah. Saya pemilih. Satu sisi, anda satu kampung dan satu agama dengan saya. Kita terhubung oleh pendekatan sosilogis. Secara sikap, anda saya kenal sebagai kandidat baik. Itu yang membuat saya takjub. Ketiga, kepentingan saya sebagai pemilih, bisa pula anda penuhi. Pilihan yang begini akan sangat kuat.

Kekuatan kedua adalah ketika bergabungnya pendekatan sosiologis dan rasional. Anda misalnya terhubung secara kesukuan, agama, organisasi atau kelompok. Lalu, anda juga memenuhi kebutuhan atau kepentingan si pemilih. Dua hal ini kalau menyatu bisa menjadi kuat untuk mendapatkan suara. Level paling bawah adalah pendekatan psikologis. Tapi, luasnya arena pertempuran akan menjadi penentu. Ketika pendekatan sosiologis dan pilihan rasional tak mampu menjangkau pemilih yang jumlahnya besar, maka, disinilah citra atau pendekatan psikologis berperan penting. Sebab pemilih tak bisa dijangkau oleh dua pendekatan tadi. Jadi, eksposur untuk membangun

citra diri menjadi senjata ampuh. Membangun citra relatif lebih murah dan mudah dibanding membangun pendekatan sosiologis dan pilihan rasional. Untuk mendapatkan suara lewat pendekatan psikologis, anda cukup membuat iklan, berita, baliho, banner, sepanduk, yang biayanya relatif tak mahal, tapi, bisa menjangkau pemilih yang luas dan banyak. Yang perlu dicermati, kalau ruang lingkup pemilihan kecil, yang milih sedikit, maka, pendekatan psikologis hampir tak berpengaruh. Faktor kesukaan menjadi tak berpengaruh. Karena pendekatan psikologis itu sifatnya abstrak.

Kalau anda dikasih beras, sarung, itu namanya kongkrit. Selalu yang kongkrit itu mengalahkan yang abstrak. Betul anda suka dengan calon A, karena tampangnya yang mirip Soekarno misalnya. Tapi, yang memberi duit misalnya kandidat B. Bisa berpaling pilihannya. Untuk bisa memetakan tiga pendekatan itu, paling mudah adalah dengan survei. Survei atau riset diperlukan untuk memahami peta, perilaku dan demografi pemilih. Survei dipakai untuk memastikan bahwa mereka memilih atau tidak atas dasar apa. Penulis kira survei untuk sementara menjadi satu-satunya pilihan masuk akal berbasis ilmu pengetahuan untuk memetakan kekuatan dan perilaku memilih. Survei akan menuntun anda sebagai seorang kandidat untuk bisa memetakan apakah punya kesempatan menang atau tidak.

Demokrasi Akomodir Politik Dinasti?

DINASTI Politik acapkali dipandang negatif. Dianggap membunuh demokrasi. Karena hilangnya pewarisan kekuasaan. Faktanya tidak selalu begitu. Sistem Demokrasi justru

mengakomodir dan memberi ruang sebesar-besarnya bagi kelanggengan dinasti politik. Dan itu sah-sah saja. Sepanjang dinasti politik itu bisa mewujudkan tujuan hakiki demokrasi. Kesejahteraan dan keadilan.

Fenomena politik kekuasaan di Indonesia saat ini didominasi oleh keluarga inti dan sanak saudara. Banyak Kepala daerah yang sudah menjabat dua periode, akan menyiapkan putra mahkota untuk menggantikannya. Anak dan istri bisa menggantikan bapak, ketika jabatan telah habis. Anak menantu, adik, kakak, dan keponakan bisa menjadi alternatif ketika keluarga inti tidak bisa diharapkan menggantikan. Pokoknya, kekuasaan tetap berada di seputaran keluarga.

Seperti yang kita ketahui, tujuan hakiki demokrasi ada dua. Antaralain kesejahteraan dan keadilan. Sepanjang bisa mengakomodir tujuan hakiki demokrasi itu. Maka, apapun latarbelakangnya tak menjadi persoalan. Entah itu dia berasal dari dinasti politik atau bukan. Dari manapun asalnya menjadi tidak penting lagi. Apakah berasal dari politik dinasti-kah, mau dari umum-kah, tidak jadi masalah. Asal tujuan Demokrasi itu bisa mereka penuhi.

Sistem Demokrasi awalnya memang diciptakan untuk menghindari politik yang dikuasai sekelompok orang. Secara terus-menerus. Seperti halnya Monarki. Dimana kekuasaan dikendalikan oleh sekelompok orang atau keluarga tertentu. Demokrasi justru menyediakan sebuah ruang. Demokrasi mengakomodir terjadinya pewarisan kekuasaan. Tentunya kekuasaan diwariskan secara demokratis. Sebagai contoh demokrasi electoral yang bebas seperti di Indonesia. Demokrasi

electoral, cenderung banyak dimenangi oleh orang yang memiliki sumber daya besar. Sumber daya itu mampu dikumpulkan oleh para penguasa. Dengan berbagai cara.

Secara substansi, Politik Dinasti secara tidak langsung diakomodir oleh demokrasi. Bila praktek demokrasi yang dimaksud berjalan seperti di Indonesia. Maka sudah menjadi fenomena umum di Indonesia maupun di Dunia, bahwa kekuasaan itu diwariskan dengan cara demokratis pula. Ada semacam sifat dasar manusia, yaitu ingin berkuasa. Mewariskan kekuasaan. Misalnya ayah mewariskan kekuasaan kepada anaknya. Dan ini berlaku disemua lini. Di Politik, ekonomi dan sebagainya. Ayah yang direktur ingin agar anaknya mewarisi jabatan direktur. Begitulah sifat dasar manusia.

Oleh karena itu, Dinasti Politik bukanlah sesuatu yang tabu. Bukan sesuatu yang terlarang. Sebab, demokrasi mengakomodir secara penuh dinasti politik itu. Yang mana proses peralihan kekuasaan itu berlangsung secara demokratis. Ayah yang Gubernur mewarisi anaknya menjadi Gubernur. Ayah yang Bupati mewarisi anaknya Bupati. Dinasti politik itu sah-sah saja. Karena memang diakomodir oleh Demokrasi. Mereka terpilih secara demokratis. Bukan paksaan.

Meskipun awalnya demokrasi cenderung ingin menghapus politik dinasti. Tapi, justru demokrasi memberi ruang secara tidak langsung terhadap pewarisan kekuasaan secara demokratis. Melalui politik elektoral itu. Meskipun di beberapa tempat tidak terjadi seperti itu. Misalnya di beberapa tempat demokrasi tidak melahirkan dinasti politik. Ada Risma, Anis Baswedan, Ridwan Kamil.

Sepanjang sistem politik masih seperti ini, maka yang digariskan adalah bahwa para pewaris tahta kekuasaan itu haruslah pewaris yang memiliki kemampuan. Memiliki kapasitas. Agar para pewaris itu bisa mengakomdir tujuan hakiki dari demokrasi itu. Orang-orang yang bisa memenuhi tujuan hakiki demokrasi itu, kesejahteraan rakyat dan kesetaraan. Dia adalah seseorang yang memahami iktikad kehidupan masyarakat. Memahami kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Memahami kesusahan hidup yang dialami masyarakat. Sehingga dengan kekuasaan itu dia bisa mewujudkan prinsip hakiki demokrasi. Kesejahteraan dan keadilan itu.

Ada kekhawatiran dinasti politik rentan terjadinya korupsi. Beberapa kasus korupsi yang mengemuka terkait dengan dinasti politik, misalnya dugaan suap yang melibatkan bapak dan anak, yakni Asrun sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara dan putranya, Adriatma Dwi Putra selaku wali kota Kendari. Setelah sang ayah menyelesaikan tugasnya sebagai wali kota dan kembali maju sebagai calon gubernur, sang anak mengisi jabatan yang ditinggalkan ayahnya. Di Provinsi Banten, kasus Ratu Atut Chosiyah yang melibatkan adiknya, menunjukkan betapa kentalnya kekuasaan dinasti politik di Banten. Ada pula dinasti Kutai Kartanegara. Beberapa waktu lalu, Bupati Kutai, Rita Widyasari, tersandung kasus korupsi mengikuti jejak sang ayah, mantan Bupati Kutai Kertanegara – Syaukani Hassan Rais yang terlebih dulu tersandung kasus serupa. Di Cimahi, Jawa Barat, Wali kota Cimahi (2012-2017) Atty Suharty bersama suaminya menjadi tersangka kasus penerimaan suap proyek

pasar Cimahi. Sang suami, Itoc Tochija, merupakan wali kota Cimahi selama dua periode. Di Jambi, Zumi Zola yang mewarisi kekuasaan ayahnya Zulkifli Nurdin terlibat kasus Gratifikasi dan Suap Ketok Palu.

Kalaulah kita mau menelitinya lebih dalam, korupsi tidak ada kaitannya dengan dinasti politik. Korupsi berkait kelindan dengan faktor kesempatan. Faktor kesempatan yang dimaksud adalah kesempatan untuk menggunakan anggaran. Artinya, siapapun dan dari latarbelakang manapun ketika memiliki kesempatan menggunakan anggaran, maka akan berpotensi melakukan korupsi. Tanpa harus memandang latarbelakang politik dinasti. Toh banyak juga kasus korupsi yang melibatkan orang-orang yang bukan dari kalangan dinasti politik. Orang umum saat dia berkuasa, juga terjerambab dalam kasus korupsi karena punya kesempatan dan kewenangan menggunakan anggaran.

Dinasti politik dalam sistem apapun adalah keniscayaan. Iklim demokrasi pun memberi ruang bagi tumbuhnya dinasti politik. Hanya saja, yang perlu menjadi catatan penting adalah memastikan bahwa tujuan hakiki demokrasi benar-benar bisa terwujud. Itu saja. Jika Dinasti politik bisa mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, kenapa tidak?.

BAB II

KONFLIK ELIT POLITIK DI INDONESIA

Penjara Hamka

Buya Hamka, tokoh yang terkenal dengan karya monumentalnya Tafsir Alzhar itu pernah dijebloskan ke penjara. Ia meringkuk di sel tahanan selama 2 tahun 4 bulan, tanpa proses pengadilan. Politik kebencian seperti yang tergambar saat Pemilihan Presiden RI dua periode lalu, Cebong vs kampret, 01 vs 02, terjadi juga saat itu. Berdasarkan sejarah yang penulis pelajari, PKI berada di balik semua fitnah itu. Buya Hamka juga tidak mendapat perlindungan dari koleganya, sang Proklamator, Soekarno. Bagaimana dan seperti apa fitnah itu?

Membahas tentang penjara Buya Hamka, kita tidak akan lepas dari satu kelompok penting yang berada di balik peristiwa itu, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI). Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, PKI pernah dua kali gagal merebut kekuasaan, yakni tahun 1926 dan 1948. Itu terjadi sebelum peristiwa Gerakan 30 September (G 30S PKI), yang menewaskan paling tidak 7 orang Jenderal maupun Perwira ABRI, yang kemudian kita kenal mereka sebagai pahlawan revolusi.

Sebenarnya persiapan mengendalikan kekuasaan untuk kali ketiga itu, sudah sangat matang. Rentang waktu kejadian puncak persiapan itu terjadi pada (1959-1965). Itu saat Indonesia berada dalam sistem politik Demokrasi terpimpin. Kekuasaan Presiden amatlah besar. Lini politik, ekonomi, sosial,

seni budaya, seluruhnya digarap. Sehingga mengerucutlah kudeta 1 Oktober 1965. Hampir berhasil.

Di bidang seni-budaya, organisasi massa atau ormas PKI dikendalikan oleh Lembaga Kebudayaan Rakyat, disingkat Lekra. Lekra didirikan oleh dua tokoh PKI Nyoto dan DN Aidit.

Ada lembaga seni lain di luar Lekra, yakni Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN). LKN merupakan organisasi kebudayaan yang berada langsung di bawah Partai Nasional Indonesia (PNI). Dengan kata lain, LKN merupakan "Onderbouw" PNI. Dan ada pula Lembaga Seni Budaya Indonesia (Lesbi), ormas Partindo. Penggarapan ideologisnya adalah penerapan marxisme-leninisme-Maosisme dalam seni melalui faham realisme sosialis. Cara kerjanya adalah penjejalan secara paksa paham itu kepada seniman-seniman non komunis.

Soal LKN, ini soal LKN dulu. Sebenarnya, pada awalnya pembentukan LKN dimaksudkan sebagai usaha untuk mengimbangi kegiatan-kegiatan di Lekra. Sitor sebagai penggagas LKN juga mengatakan bahwa saat itu kegiatan para seniman yang berpaham kiri harus diimbangi dengan kegiatan-kegiatan para seniman yang berpaham lain.

Dasar pembentukan LKN sebagaimana dinyatakan oleh Sitor itu ternyata tidak sejalan dengan pelaksanaannya. Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan LKN khususnya Sitor sendiri bukannya mengimbangi kegiatan Lekra dengan menunjukkan warna dan falsafah yang berbeda dengan Lekra. Tetapi mengimbangi Lekra dalam arti menjadi kawan dalam mewujudkan cita-cita revolusi yang berorientasi ke kiri.

LKN yang digerakkan oleh Sitor merasa leluasa menjalankan misi-misinya, terutama dalam bidang kebudayaan. Misalnya yang tampak mencuat adalah memperlihatkan sikap untuk menjadi yang paling depan dan paling dulu dalam melayani Pemimpin Besar Revolusi. Bahkan, kadang-kadang ia lebih "maju" dan lebih "berani" dari Lekra dalam menghantam "musuh-musuh Revolusi" di bidang kebudayaan..

Dasar pembentukan LKN sebagaimana dinyatakan oleh Sitor itu ternyata tidak sejalan dengan pelaksanaannya. Dalam perkembangannya, kegiatan LKN khususnya Sitor sendiri bukannya mengimbangi kegiatan Lekra dengan menunjukkan falsafah yang berbeda dengan Lekra, tetapi mengimbangi Lekra dalam arti menjadi kawan dalam mewujudkan cita-cita revolusi yang berorientasi ke kiri.

Mereka bekerja sepanjang waktu untuk mendukung terlaksananya pengambilan kekuasaan untuk jangka panjang. Salah satu di antaranya adalah pembentukan opini di media massa, terutama surat kabar. Di masa orde lama, PKI punya beberapa surat kabar yang menyokong gerak dan pemikirannya.

Di antaranya adalah Harian Rakjat, Bintang Timur, dan Warta Bhakti. Dari ketiganya, Bintang Timur adalah terompet yang paling lantang suaranya. Di samping menyiarkan propaganda politik, di ruangan ini secara sistematis dilakukan serangan-serangan terhadap seniman-sastrawan yang berseberangan dengan Lekra atau PKI. Mereka punya rubrik khusus untuk menyiarkan propaganda itu, namanya Lentera.

Nah, pengelola rubrik Lentera adalah sastrawan novelis termashur, dengan karya monumentalnya trilogi Bumi Manusia,

Pramoedya Ananta Toer (1925-2006). Lentera, pada tahun 1963-1965 terus menerus menyerang seniman yang berseberangan dengan Lekra atau PKI. Beberapa yang dihajar oleh kelompok ini, salah satunya Buya Hamka.

Hamka dibabat habis-habisan oleh Pram dengan bahasa yang tidak pantas. Ia diburuk-burukkan dengan berbagai cara, dari tuduhan pada karya, termasuk pula menyeret urusan pribadi. Framing yang dibangun Lekra adalah bahwa sastrawan dan seniman Islam atau anti PKI tak pantas menjadi seniman.

Tuduhan terbesar terhadap Hamka terjadi di awal tahun 1963. Lekra, lewat harian Rakyat dan Bintang Timur itu mengangkat headline Novel Hamka berjudul Tenggelamnya Kapal Vander Wijck sebagai hasil jiplakan. Argumentasi itu diambil dari pendapat seorang penulis bernama Ki Panji Kusmin. Sedangkan di Harian Bintang Timur, di rubrik Lentera yang dikelola Pramoedya Ananta Toer, Hamka dituduh mencuri karangan asli dari pengarang Alvonso Care, seorang pujangga Prancis. Berbulan-bulan koran berhaluan PKI itu menyerang dan memfitnah Hamka.

Roman Hamka ini pertama kali terbit tahun 1938. Kisah ini awalnya adalah cerita bersambung di majalah Pedoman Masyarakat pimpinan Hamka, yang kemudian diterbitkan sebagai buku oleh penerbit M. Sjarkawi, Medan. Buku ini laris manis di pasaran. Pada cetakan keempat, seperti dikutip Asep Sambodja dalam *Historiografi Sastra Indonesia 1960-an* (2010), Hamka mengakui hal tersebut. "Belum berapa lama tersiar, dia pun habis," tulisnya (hlm. 159).

Pram memfitnah Hamka lewat tajuk yang ditulis di rubrik *Lentera Harian Bintang Timur*. Tajuk itu berjudul *Aku Mendakwa Hamka Plagiat: Skandal Sastra Indonesia 1962-1964*. Pram menuding karya Hamka mirip dengan film *Dumu el Hub* (*Airmata Cinta*) yang diadaptasi dari karya Al-Manfaluthi, *Majdulun* atau *Magdalena* (*Di Bawah Naungan Pohon Tilia*). Sejumlah pelajar Indonesia di Moskow ikut nimbrung menghajar Hamka.

Kasus Tenggelamnya Kapal *Van der Wijck* bukan hanya persoalan sastra, tapi juga persoalan politik. Hamka menjadi musuh utama Lekra, karena disamping sebagai sastrawan, dia adalah tokoh besar Muhammadiyah dan Masyumi. Dua organisasi ini bertentangan dengan PKI dan dalam beberapa kesempatan bermusuhan dengan Soekarno.

Situasi politik di balik kasus tuduhan plagiarisme Hamka memang sedang panas. Kekuatan politik nasional saat itu cenderung ke arah kiri. Pemberontak Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatra Barat telah lumat disapu operasi militer pemerintah. Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)--tempat Hamka pernah beranung-- dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang terlibat PRRI, juga sudah dibubarkan Presiden Sukarno.

Soekarno dan Hamka pun berseberangan. Kawan menjadi lawan. Partai Komunis Indonesia dan ormas-ormas terafiliasi sedang di atas angin. . Palagan kebudayaan mereka kuasai. Pihak yang berseberangan disebut kontrarevolusioner. Polarisasi amat tegas, antara kawan atau lawan.

Tuduhan plagiat Hamka bukan sekadar kasus kritik sastra, melainkan kegiatan bertendensi politik terhadap Hamka sebagai seorang tokoh Islam, seorang ulama kawakan. Hamka sendiri sebenarnya banyak diamnya. Ia ogah menanggapi tuduhan itu dengan argumentasi dan pepesan kosong. Ia justru menyerahkan persoalan itu kepada ahlinya.

Kepada wartawan Gema Islam (1 Oktober 1962), Hamka mengatakan bahwa. caci-maki dan tuduhan plagiat itu tidak akan menjatuhkannya. Ia mengharapkan agar novelnya yang berjudul *Tenggelamnya Kapal Van der Wijck* itu diteliti secara ilmiah. oleh para ahli sastra untuk menentukan apakah itu hasil curian, saduran, atau asli secara pasti.

Hamka berharap dibentuk Panitia Kesusastraan yang bersifat ilmiah di bawah Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan ia bersedia memberikan keterangan. Polemik sastra itu hampir “membunuh” Hamka sebagai penulis. . . . Dua tahun dihajar fitnah Lekra, puncaknya Hamka dijebloskan ke penjara. . . Ia ditangkap lewat fitnah tuduhan terlibat dalam komplotan pembunuhan berencana terhadap Presiden Soekarno dan Menteri Agama Syaifuddin Zuhri, bahkan penulis pernah membaca buku paman saya sekira waktu usia SMP, sekitar 14-15 tahun. Ada satu kalimat yang penulis ingat sampai sekarang. Dalam buku itu disebutkan bahwa Hamka pernah terlintas niat untuk mengakhiri hidupnya dengan menyilet tangannya.

Buya Hamka di tahan selama 28 bulan atau 2 tahun 4 bulan lamanya, tanpa diadili dan tuduhan itu belakangan terbukti palsu. Justru, semasa ditahan itulah Buya Hamka menyelesaikan Tafsir Al Azhar yang monumental itu.

Sesuai rencana, Buya Hamka akan menjalani penyiksaan fisik. bertepatan ketika meletusnya gestapu yang melakukan kudeta 1 Oktober 1965. Syukurlah. Hamka lolos dari rencana penyiksaan karena gagalnya kudeta itu.

Secara teori memang memburukkan citra itu bisa digunakan untuk memudahkan menekan atau menghancurkan seseorang. Karena mereka yang citranya sudah rusak, bisa saja menjadi musuh publik. Ketika dia dijebloskan ke penjara, publik seolah-olah tutup mata. Barangkali inilah yang terjadi dengan Buya Hamka waktu itu.

Dulu Teman Kini Lawan. Inilah gambaran dinamika hubungan persahabatan dua tokoh ini : Soekarno dan Hamka. Pertemanan kedua tokoh bangsa ini mengalami pasang surut, pernah menjadi teman seiring, belakangan berakhir seteru dan menjadi lawan.

Perjumpaan Hamka dan Soekarno kali pertama terjadi di Bengkulu. Adalah seorang muslim Tionghoa bernama Karim Oei Tjeng Hien yang mempertemukan dua tokoh ini.

Berawal ketika Soekarno yang berstatus tahanan politik Belanda, di pindah dari Pulau Ende ke Bengkulu. Semasa di bumi rafflesia, Soekarno kerap mendengar cerita dan kiprah Karim Oei, sebagai pengusaha sekaligus aktivis muslim Tionghoa. Bagi Soekarno, Karim Oei memiliki suatu kombinasi unik yang tak pernah ditemuinya di tempat lain.

Selepas berkenalan, keduanya langsung akrab. Apalagi Soekarno melihat cara pandang Karim Oei yang sangat Nasionalis. Haji Junus Jamaluddin, konsul Muhammadiyah untuk Bengkulu dan Sumatera Selatan, mulai sakit parah dan

tak bisa melanjutkan tugasnya. Soekarno mengusulkan Karim Oei menggantikan posisi Haji Junus Jamaluddin. Bak gayung bersambut, usul Soekarno diterima.

Keduanya kian akrab. Selama di Bengkulu, Karim Oei memulai usaha baru--membuka perusahaan mebel dan bahan bangunan--, Hamka bermuhibah ke Bengkulu, dalam satu misi tugas di Persyarikatan Muhammadiyah, 1938. Bertemulah Hamka dengan Karim Oei, aktivis yang baru saja diangkat menjadi konsul Muhammadiyah di Bengkulu itu. Dari organisasi Muhammadiyah ini pula, keduanya menjadi sahabat karib. Karim Oei takjub dengan sosok Hamka yang brilian dan sudah dikenal sebagai sastrawan. Di sela-sela mengurus kegiatan Muhammadiyah, Karim Oei mengenalkan sohibnya itu--sang pujangga muda--, kepada Soekarno, aktivis pergerakan. Mereka bertemu di rumah Karim Oei dan berdiskusi hingga dini hari.

Karim Oei mengenalkan Hamka kepada Bung Karno sebagai seorang pujangga yang baru saja menerbitkan roman berjudul *Di Bawah Lindungan Ka'bah*. Mereka lantas berdiskusi tentang pengalaman masing-masing. Sementara Hamka bercerita tentang pengalamannya semasa di Bukit Tinggi hingga berpetualang sampai ke Mekkah. Soekarno justru lebih banyak bercerita tentang perjalanan hidupnya, yang sudah menduda di umur 22 tahun, lalu kuliah di Bandung hingga menjadi tahanan politik.

Sejak pertemuan pertama itu, Hamka dan Soekarno kian lengket. Mereka menjadi akrab dan menjadi sahabat. Soekarno dan Hamka menjadi sering bertemu, terutama di acara-acara Muktamar Muhammadiyah. Tahun 1945, ketika Soekarno

diangkat menjadi Presiden RI pertama, ia mengajak Hamka pindah ke Jakarta.

Namun karena terjadi agresi pertama, tahun 1947 permintaan Soekarno sempat tertunda. Setahun berselang, Soekarno berkunjung ke Sumatera Barat dan bertemu Hamka di Bukit Tinggi. Kala itu Hamka menghadiakan sebuah puisi kepada Presiden pertama itu, dengan judul “Sansai juga aku kesudahannya”.

Selepas pertemuan itu, tahun 1949, Hamka benar-benar pindah ke Jakarta. Ia memboyong keluarganya bertepatan dengan penyerahan kedaulatan dari Belanda. Atas peran Soekarno, Hamka diangkat menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Agama. Sebagai tokoh yang ia kagumi, Bung Karno acap kali mengundang Hamka untuk berceramah di Istana Negara, utamanya ketika memperingati hari besar keagamaan. Buya Hamka juga kerap diminta oleh Soekarno untuk mengimami sholat pada peringatan hari besar Islam, seperti Sholat Idul Fitri di Lapangan Benteng.

Perselisihan dua sahabat ini muncul kepermukaan ketika rezim Soekarno mulai menunjukkan gelagat membenci partai Islam. . Seiring pengaruh PKI mulai kental menghinggapi Soekarno.

Bermula dari bergabungnya Partai Sarekat Islam (PSI)--dimana Hamka adalah salah satu anggotanya sejak 1925--,. menjadi Majelis Syuro Muslim Indonesia (Masyumi), yang merupakan partai politik terbesar, tahun 1950. . Soekarno diam-

diam tak menyukai langkah Hamka yang bergabung ke Masyumi itu.

Untuk menghadang langkah Hamka, Soekarno lantas menerbitkan kebijakan melarang pegawai negeri merangkap sebagai anggota partai. . Tujuannya, agar Hamka fokus menjadi pegawai dan meninggalkan Masyumi, yang kala itu amat dibenci PKI.

Di luar perkiraan Soekarno, Hamka justru memilih meletakkan jabatan sebagai pegawai negeri--yang pada waktu itu gajinya merupakan tulang punggung keluarga--, dan malah melanjutkan karir politiknya di Masyumi. Sebelum mengundurkan diri, Hamka sempat meminta pandangan istrinya, pilihan mana yang hendak diambil, tetap menjadi PNS dan menikmati pendapatan yang pasti atau melanjutkan perjuangan umat melalui parpol. Dengan ketabahan seorang istri pejuang, pendamping hidupnya itu menjawab tegas, “jadi hamka sajalah”.

Karir politik Hamka terus berkibar hingga menjadi juru kampanye Masyumi. Melalui pemilu 1955--yang dinilai sebagai pemilu paling demokratis sepanjang sejarah Republik Indonesia-- , Hamka terpilih menjadi salah seorang anggota Konstituante dari Masyumi. Sejak itu, kedekatan Soekarno dan Hamka kian merenggang. Mereka dipisahkan oleh perbedaan ideologi. Sebagai anggota Konstituante, pada sidang Bandung (1957) Hamka menyampaikan pidato menolak gagasan Presiden Soekarno yang ingin menerapkan sistem Demokrasi Terpimpin.

Dari sinilah benih-benih permusuhan dua sahabat ini kian meruncing. Berdasarkan beberapa analisis Hal itu tidak lepas

dari pengaruh PKI yang mulai memeralat secara politik posisi Bung Karno, dan Hamka saat itu aktif di Masyumi, partai yang paling dibenci oleh PKI. Puncaknya, Dewan Konstituante dibubarkan oleh Soekarno melalui Dekrit 5 Juli 1959. Soekarno kemudian membubarkan Masyumi dengan menyatakannya sebagai partai terlarang pada 1960.

Perseteruannya dengan Presiden Soekarno terus berlanjut. Pada Agustus 1960, majalah “Panji Masyarakat” yang diterbitkan Hamka sebagai corong dakwah islam dibreidel. Hamka lantas ditangkap dengan tuduhan keterlibatan percobaan pembunuhan terhadap Bung Karno dan Menteri Agama saat itu.

Hamka ditangkap pada tanggal 27 Januari 1964, bertepatan dengan awal bulan Ramadhan 1383 H, kira-kira pukul 11 siang. . Hamka dijemput di rumahnya, ditangkap dan dibawa ke Sukabumi. Semasa berseteru dengan Soekarno, nama Hamka dihancurkan, perekonomiannya dimiskinkan, kariernya dimatikan dan buku-bukunya dilarang beredar.

Malam hari 16 Juni 1970. Berita itu menjadi pembicaraan rakyat dimanapun mereka berada. Jamaah sholat Isya Masjid Agung Al Azhar turut membicarakan berita wafatnya Soekarno. Selepas Buya Hamka mengimani jamaah di masjid itu, ia bergegas balik ke rumah.

Dua tamu penting sudah menunggu. Tamu penting itu ternyata adalah dua orang pejabat pemerintahan. Mereka adalah Sekjen Departemen Agama, Kafrawi dan Mayjen Soeryo, ajudan Presiden Soeharto. Keduanya bertandang ke rumah Hamka membawa pesan penting dari Bung Karno. Isi pesan itu adalah

“bila aku mati kelak, minta kesediaan Hamka untuk menjadi imam salat jenazahku”.

Mendengar pesan itu, Hamka terkejut. Pesan itu datang seiring dengan kabar kematian Sukarno. Karenanya, setelah menerima pesan itu, tanpa pikir panjang Hamka kemudian melayat ke Wisma Yaso, tempat jenazah Bung Karno disemayamkan.

Sampai di sana Hamka mengimani shalat jenazah Soekarno, sosok yang pernah menjebloskannya ke penjara. Bahkan, Hamka memuji keberhasilan Soekarno yang membangun Masjid Baitul Rahim di Istana Negara dan Masjid Istiqlal.

“Saya tidak pernah dendam kepada orang yang pernah menyakiti saya. Dendam itu termasuk dosa. Selama dua tahun empat bulan saya ditahan, saya merasa itu semua merupakan anugerah yang tiada terhingga dari Allah kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan kitab tafsir Alquran 30 juz. Bila bukan dalam tahanan, tidak mungkin ada waktu saya untuk menyelesaikan pekerjaan itu.”

Pram pun demikian, bahkan meminta maaf secara halus, dengan mengirim anak dan calon menantunya untuk belajar Islam kepada Hamka. Menjelang menjemput ajal, Soekarno berwasiat kepada ajudannya untuk meminta kesediaan Hamka menyolatkan mayitnya.

Nama aslinya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, disingkat Hamka. Lahir di Maninjau 1908, tujuh tahun lebih muda dari Soekarno yang lahir 1901. Secara formal, Hamka hanya

mengenyam pendidikan Sekolah Desa. Ia memulai mendalami agama di Pondok Pesantren Thawalib, Padang Panjang. Dan belakangan Hamka lebih banyak menghabiskan waktunya dengan belajar sendiri, otodidak. Ia banyak membaca buku dan belajar langsung pada para tokoh dan ulama, baik yang berada di Sumatera Barat, Jawa bahkan sampai ke Mekkah dan Arab Saudi.

Hamka adalah seorang yang mempelajari berbagai ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, dan politik baik Islam maupun Barat secara otodidak. Tapi jangan salah, meskipun sepintar apapun Hamka, ia pernah ditolak menjadi guru di sekolah Muhammadiyah. Anda bisa baca dalam buku *AYAH* yang ditulis anaknya Irfan Hamka.

Proses belajar secara otodidak sangat ditunjang dengan kemampuan bahasanya, terutama bahasa Arab. Hamka mahir berbahasa Arab. Itu sebabnya, ia dapat meneliti karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah, seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas al-Aqqad, Mustafa al-Manfaluti, dan Hussain Haikal.

Berkat kemampuannya berbahasa Arab itu juga, dia meneliti karya sastra Perancis, Inggris, dan Jerman, seperti Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul Sartre, Karl Marx, dan Pierre Loti. Pada 1927 Hamka memang pernah berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji.

Dia tinggal selama 6 bulan di kota tersebut. . Selama enam bulan, dia berkesempatan mengasah kemampuan berbahasa Arab, sekaligus mendapat pengalaman menginspirasi dalam

menciptakan novel pertamanya yang berjudul *Di Bawah Lindungan Ka'bah*. .

Hamka adalah salah satu orang Indonesia yang paling produktif menulis dan menerbitkan buku. Itu sebabnya Hamka dijuluki sebagai Hamzah Fansuri di era modern. Dia mendapat sebutan Buya, berasal dari bahasa Arab, abi atau abuya, yang berarti ayahku. Itu adalah panggilan yang ditujukan untuk seseorang yang dihormati.

Hamka juga seorang wartawan. . Dia menjadi pemimpin redaksi Mingguan Pedoman Masyarakat hingga tahun 1942. . Pada 1932 Hamka pernah menerbitkan majalah Al Mahdi. Ia menikahi wanita sesukunya di Maninjau Siti Raham Binti Endah Sutan pada 29 April 1929.

Sejarah Kapitalisme di Indonesia

Bagaimana sejarah kapitalisme memonopoli sumber daya Indonesia sejak dulu, menjadi starting poin tulisan ini. Artikel ini mereview sebuah temuan riset Richard Robison, yang terbit dalam sebuah buku berjudul *The Rise of Capital*.

Pada awalnya, orang Belanda adalah suatu kelompok pedagang yang sama seperti para pedagang Cina, Gujarat, Portugis, Arab dan lainnya. Mereka mulanya datang sebagai pembeli barang-barang dagangan murah di Indonesia lalu menjualnya dengan harga mahal di pasar lain.

Dalam tempo 200 tahun sejak pertama datang pada abad 17, para pedagang Belanda itu kemudian membentuk Vereenigde Oost Indische Compagnie, atau disingkat VOC. Dengan alat itu,

kontrolnya terhadap para penguasa lokal bergeser dengan cara penaklukan militer. Mereka berhasil memaksa penguasa lokal menyerahkan hasil produksi, memberikan monopoli perdagangan domestik dan menyerahkan hak politik tradisional atas tanah, tenaga kerja dan produksi.

Begitulah bentuk-bentuk hubungan produksi yang berlangsung di tingkatan akar rumput. Belanda menempatkan diri di atas sistem produksi kaum pribumi, sedangkan surplus ekonomi dihasilkan dengan paksaan politik.

Penduduk pedesaan misalnya, diharuskan melakukan pekerjaan bagi penguasa setempat dan menyerahkan kira-kira 40% tanah sebagai pajak atau sewa kepada kerajaan Belanda. Inilah asal muasal sistem kapitalis yang berlangsung di Indonesia.

Pemerintah Belanda belakangan menggantikan VOC pada 1800. Mereka membangun sistem tanam paksa yang lebih canggih dan jauh lebih terkoordinasi. Penduduk dipaksa mengalokasikan 20 % tanahnya kepada pemerintah Belanda serta melakukan pekerjaan selama 66 hari per tahun, khusus untuk tanaman wajib tersebut.

Sistem ini diorganisasi dan diawasi oleh aparat Belanda yang bersekongkol dengan para pejabat pribumi. Mereka mendapat upah atau gaji serta komisi untuk menjalankan tugas-tugas Belanda. Hampir separuh wilayah Jawa kala itu diperuntukkan untuk perkebunan tebu. Bayangkan, nilai ekspor gula dari Hindia Belanda (Indonesia sebelum merdeka) pada

1840 mencapai 77,4 % dari jumlah seluruh ekspor, pada 1880 yang hanya mencapai 66 %.

Mulai pertengahan abad 19, sifat perdagangan ekonomi kolonial bergeser ke arah kapitalis. Belanda mulai membuka ruang kepada swasta, untuk berinvestasi dalam bentuk pertanian, penyewaan tanah, pembangunan pabrik dan sebagainya. Untuk mengamankan masuknya kapital swasta, pemerintah Belanda mulai menarik diri dari keterlibatan langsung dalam operasi monopoli perdagangan. Mereka menyediakan dan membuka pintu politik dan ekonomi bagi ekspansi kapital swasta Belanda dan negara-negara barat lainnya.

Gula dan kopi, sebagai dua komoditas besar penanggung keuntungan, relatif mulai surut. Investasi di bidang perkebunan kemudian pindah dari Jawa ke pulau--pulau lain, semisal karet di Sumatera. Di samping itu, mulai tahun 1920 dan 1930an, para pabrikan Barat mendirikan Industri substitusi impor di Indonesia. Pengusaha Inggris dan AS misalnya, memusatkan diri pada perkebunan besar, tambang minyak dan dalam usaha skala besar seperti pabrik perakitan milik General Motor, Pabrik Karet dan Ban Goodyear, Pabrik Rokok BAT, minyak goreng dan sabun Unilever.

Para pemilik kapital itu juga mendirikan pabrik semen di Padang, pabrik Bir di Jakarta dan Surabaya. Pada 1940an, industri ini menghasilkan 430 juta gulden. Sementara tambang menyumbang 252 Gulden dan perkebunan 593 juta Gulden.

Dengan jelas tergambar bahwa pemerintah Belanda membiarkan ekonomi didominasi oleh kapital korporasi.

Elemen dominan dari kelas kapitalis yang bergeak dalam ekonomi kolonial ialah perkebunan korporasi Belanda, Inggris dan Amerika, yang bertalian dengan institusi perdagangan dan perbankan. Elemen kedua berupa borjuasi dagang Cina yang berjaya dan tumbuh seiring dengan merembesnya ekonomi uang dan pertanian komersial, pengumpulan produksi pertanian, perdagangan besar dan kecil komoditas impor.

Sebagai bentuk perlawanan kaum dagang Pribumi, mereka membentuk Sarekat Dagang Islam pada 1909 dan kemudian menjadi Sarekat Islam pada 1912. Pemimpin mereka yang menonjol adalah Haji Samanhoedi, seorang pedagang suku Jawa dan pemilik pabrik batik dari Solo, sekaligus seorang pemimpin Islam. Selanjutnya Raden Mas Tirotdioerjo dan Omar Said Tjokroaminoto, bangsawan Jawa yang terlibat dalam dunia dagang. Gerakan ini menyediakan basis untuk melakukan boikot terhadap para pedagang asing, utamanya Cina. Dengan aksi-aksi bersama para pedagang Pribumi, mereka dihubungkan dengan pecahnya sejumlah tindak kekerasan terhadap orang Cina di seluruh Jawa Tengah.

Pada tahun-tahun pertama Sarekat Islam didominasi kepemiminam Islam Saleh yang bersekutu dekat dengan komunitas dagang pribumi. Tapi, golongan borjuasi dagang Islam kehilangan kontrolnya terhadap Sarekat Islam sesudah 1918.

Ini asal muasalnya.

Di tingkat desa, terjadi pergeseran arus massa yang mengalami degenerasi organisasi dagang menjadi gerakan agama. Apalagi sejak kontrol organisasi di tingkat desa itu dikuasai para kiai yang orientasi justru bertentangan dengan gerakan perubahan modern, yang diusung pedagang Islam. Sementara di tingkat nasional, mayoritas Sarekat Islam dikuasai oleh kaum komunis atau sayap serikat buruh yang membuat organisasi ini terpecah pada 1922. Di samping itu, kapitalis cina tidak mampu merangsek masuk menjadi borjuasi nasional sebagai kelas penguasa. Mereka tetap sebagai pedagang yang berjejaring keluarga.

Meskipun mereka mengontrol pedagang domestik dan jaringan perkreditan, tapi, Cina tidak dalam posisi menantang dominasi modal asing dalam sektor kapitalis besar. Satu catatan penting, bahwa Cina secara umum tidak dapat diterima oleh banyak orang Indonesia untuk memegang peran politik resmi. Mereka dari waktu ke waktu menjadi sasaran permusuhan, terutama dari kalangan borjuasi dagang Islam.

Masa perekonomian kolonial Belanda tergusur mulai periode 1949-1965. Penyebabnya, merosotnya impor dan ekspor, terutama hasil perkebunan yang menjadi basis ekonomi Belanda, mendapatkan pukulan telak sehingga Belanda mulai kehilangan kekuasaan. Dari sinilah muncul kekuatan sosial ekonomi dan politik baru di Indonesia di bawah rezim Orde Baru.

Isu Kudeta Dibalik Kisah Lengsernya Soeharto

Berawal dari munculnya isu Wapres Habibie mundur dari jabatannya. Entah bagaimana isu tersebut tiba-tiba menggelinding deras di elit nasional. Isu mundurnya Habibie seiring dengan meletusnya gejolak sosial dan demo-demo mahasiswa yang kian meluas dan berujung anarkis.

Merespon desakan mundur oleh mahasiswa, Soeharto bersegera membentuk kabinet reformasi, sebagai pengganti kabinet pembangunan. Puncak perpecahan elit terjadi ketika isu mundurnya Habibie dan diikuti manuver 14 Menteri Kabinet Pembangunan di bawah koordinasi Habibie, yang menyatakan tak bersedia lagi duduk di Kabinet Reformasi.

Keputusan 14 Menteri itu menyeruak setelah mereka rapat di Bappenas. 14 Menteri itu adalah Akabr Tanjung, AM Hendropriyono, Ginanjar Kartasasmita, Giri Suseno, Haryanto Dhanutirto, Justika Baharsjah, Kuntor Mangkusubroto, Rachmadi Bambang Sumadhijo, Rahardi Ramelan, Subianto Tjakrawerdya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi, Theo L Sambuaga dan Tanri Abeng.

Menteri Keuangan Fuad Bawazier sempat menelpon Habibie untuk mengonfirmasi ihwal isu kemundurannya. “Apakah isu yang berkembang, bahwa pak Habibie bermaksud mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden, benar?”

Habibie langsung menepis spekulasi itu.

“Isu tersebut tidak benar. Presiden sedang mengalami permasalahan multikompleks, tidak mungkin saya tinggalkan. Saya bukan pengecut,!”

Rabu 20 Mei 1998. Habibi bergegas bertemu Soeharto di kediamannya. Malam itu jarum jam menunjuk angka 19.30. Tiba di Cendana, Habibie menunggu di ruang tamu ditemani istri Prabowo Subianto, Siti Hedyati Prabowo. Pak Harto sedang menerima tamu mantan Wakil Presiden Sudharmono.

Sudharmono beranjak pergi, Habibi bertemu Soeharto di ruang kerja Presiden. Keduanya sempat terlibat perdebatan cukup sengit. Menurut Habibi, di bukunya “Detik-detik yang menentukan”, perdebatan terjadi bukan karena munculnya isu Habibi mundur dari jabatan Wapres. Tapi, mereka berdebat ihwal nama-nama Menteri yang akan diplot di kabinet reformasi.

Habibi sempat mengusulkan beberapa nama dan ditolak Soeharto. Perdebatan pun tak terelakkan.

“Karena tidak ada titik temu, saya persilahkan pak Harto memutuskan apa yang terbaik,” ujar Habibi.

Akhirnya kabinet reformasi terbentuk. Sesuai rencana, kabinet reformasi diumumkan pada Kamis 21 Mei 1998. Selanjutnya kabinet akan dilantik oleh Presiden pada Jumat 22 Mei 1998.

Habibi kembali menghadap Soeharto pada Kamis itu. Di ruangan tersebut hanya ada mereka berdua. Dihadapan Habibi, Pak Harto menyampaikan bakal mengundang Pimpinan MPR,DPR pada Sabtu 23 Mei 1998. Habibi terkejut ketika pak Harto tiba-tiba menyampaikan niatnya hendak mundur dari jabatan Presiden. Habibi terhenyak. Pak Harto sama sekali tak menyampaikan alasan mengapa ia mundur, disaat Kabinet Reformasi baru saja disusun. Yang membuat Habibi kian kaget ketika pak Harto tak menyinggung kedudukan Wakil Presiden.

Sebagai orang yang sudah berpuluh tahun mengenal karakter pak Harto, Habibi berkesimpulan pak Harto menginginkannya ikut mundur sebagai Wapres. Walaupun pak Harto tak secara gamblang menyampaikannya ke Habibie. Tapi, Habibi mahfum maksud pak Harto.

“Apakah saya juga diminta ikut mundur? Pertanyaan ini muncul karena pernyataan pak Harto sehari sebelumnya di hadapan sejumlah tokoh masyarakat seolah meragukan kemampuan saya. Demikian sejumlah pertanyaan berkecamuk di benak saya,” cerita Habibie dalam bukunya *Detik-detik yang menentukan* (halaman 36-37).

Tak ingin disergap bingung, Habibi secara jantan memberanikan diri bertanya. Ia langsung melempar tanya ke Pak Harto, ihwal permintaannya untuk ikut mundur sebagai Wapres.

Jawaban pak Harto, kata Habibi, betul adanya dan sangat di luar dugaan. Pak Harto rupanya menginginkan Habibie juga ikut mundur.

“Segera muncul dalam pikiran saya, bukankah kevakuman dalam pimpinan negara dan bangsa tidak boleh terjadi? Jikalau demikian yang dikehendaki pak Harto, tidakkah hal itu tidak sesuai dengan UUD 1945 dan ketetapan MPR? Begitulah dalam suasana pertemuan tak lazim, serta suasana lapangan tak menentu dan cukup mengkhawatirkan, muncul berbagai pertanyaan yang amat mengganggu pikiran saya,” kata Habibi.

Habibi hendak menyampaikan ihwal sikap politik 14 Menteri dan pak Harto langsung menjabat tangannya, sebagai sinyal untuk mengakhiri pertemuan hari itu.

“pak Harto mengatakan laksanakan tugasmu dan waktu tidak banyak lagi,”

Selepas meninggalkan pak Harto, Habibi segera mengontak 4 Menko dan 14 Menteri, yang menyatakan tak bersedia bergabung di kabinet reformasi. Rapat berlangsung di pendopo kediaman Habibi kawasan Kuningan, hingga pukul 22.45. keputusannya, mereka menerima Kabinet Reformasi sebagai sebuah kenyataan. Menyetujui Keputusan Presiden yang diteken pak Harto dan proses pelantikan akan dilaksanakan oleh Habibi.

Sebelum bubar, Habibi bergegas menugaskan ajudannya untuk menghubungi dengan pak Harto. Ia hendak melaporkan keputusan rapat bersama para menteri itu. Habibi malah menelan kekecewaan karena pak Harto menolak berkomunikasi.

Lewat sambungan telepon, Menteri Sekretaris Negara Saadilah Mursyid menyampaikan pesan Pak Harto, bahwa esoknya pukul 10 pagi, pak Harto akan mundur sebagai Presiden.

“Saya sangat terkejut dan meminta agar segera dapat berbicara dengan pak Harto. Permintaan tersebut tidak dikabulkan,”

Habibi terkejut karena mundurnya pak Harto bergeser sehari dari yang dijadwalkannya. Dari pembicaraan awalnya, Pak Harto akan mundur pada hari Sabtu tanggal 22 Mei. Tapi, tiba-tiba pak Harto mempercepat langkahnya menjadi Jumat 21 Mei 1998.

“Setelah pembicaraan lewat telepon dengan Saadilah Mursyid selesai, saya kembali ke pendopo untuk menjelaskan informasi yang baru saja saya peroleh”

Setelah para menteri bubar, Habibi menerima telepon dari Ketua MPR Harmoko. Ia mengabarkan bahwa para pimpinan MPR dan Fraksi diminta datang ke istana Merdeka besok pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 10 pagi.

Kecamuk lagi-lagi membuhul di kepala Habibi. Ia bingung apakah menuruti perintah pak Harto untuk sama-sama ikut mundur, dan yang terjadi dapat ditebak bahwa ABRI akan melakukan pengambilan kekuasaan. Atau ia harus memimpin negara ini dengan baik.

Pukul 06.45 pagi, Jumat 21 Mei 1998, Pangab Jenderal Wiranto sudah menunggu di ruang tamu rumah Habibi. Ia melaporkan keadaan lapangan yang tak menentu dan gerakan demo yang meluas dan semakin anarkis.

Kepada Habibi, Wiranto juga melaporkan bahwa ia telah menerima inpres yang diteken Presiden Soeharto untuk bertindak demi keamanan dan stabilitas negara jikalau keadaan berkembang menjadi chaos dan tak terkendali. Inpres ini, menurut Habibi, semacam supersemar pada tahun 1966, dimana jenderal Soeharto diberi kewenangan oleh Presiden Soekarno untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan negara.

Habibi menyarankan Wiranto segera ke Istana Merdeka sementara ia berencana hendak menemui Soeharto, sebelum ke Istana. “Pak Harto ternyata belum bersedia menerima saya dan saya dipersilahkan berangkat ke Istana Merdeka”

Di ruang tamu Istana Merdeka, Habibi duduk tercenung bersama Ketua dan anggota Mahkamah Agung. Kepada seorang ADC Presiden, Habibi meminta waktu hendak bertemu pak Harto. ADC itu beringsut dan dalam beberapa jenak kembali ke ruang tamu. Ia hanya membolehkan Ketua dan anggota Mahkamah Agung bertemu pak Harto di ruang jepara.

“Saya merasakan diperlakukan tidak wajar dan menahan diri untuk tetap sabar dan tenang,”

Tak berapa lama berselang, Ketua dan anggota Mahkamah Agung keluar dari ruang jepara. ADC presiden lalu mempersialhkan pimpinan DPR,MPR memasuki ruangan jepara untuk bertemu pak Harto. Habibi tetap belum diperkenankan bertemu pak Harto.

“Perasaan saya makin penuh dengan kekecewaan, ketidakadilan dan penghinaan. Sehingga kemudian saya memberanikan diri untuk berdiri dan melangkah ke ruang Jepara ingin bertemu langsung dengan pak Harto. Baru saja saya berada di depan pintu ruang Jepara, tiba-tiba pintu terbuka dan protokol mengumumkan bahwa Presiden memasuki ruang upacara. Saya tercengang melihat pak Harto, yang berjalan melewati saya tersu melangkah ke ruang upacara dan melecehkan keberadaan saya di depan semua yang hadir. Betapa sedih dan perih hati saya ketika itu”

Seusai pak Hato membacakan sikap mundurnya, protokol bergegas menyerahkan sebuah map kepada Habibi. Ia langsung memacakan sebuah sumpah sebagai Presiden RI.

Semuanya berlangsung cepat dan lancar. Tanpa senyum dan sepatah kata, Pak Harto meninggalkan ruang upacara. Sejak

itu, Habibie menjadi penguasa tunggal negeri ini, menjadi Presiden tanpa wakil sekaligus menguasai Golkar sebagai koordinator harian, yang menguasai 80 persen kursi DPR,MPR.

Habibie sudah didapuk sebagai Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar sejak 1993 dan 1998. Semasa Soeharto berkuasa, bukan wakil Presiden terpilih yang diajak Presiden untuk menyusun Kabinet Pembangunan, melainkan Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar. Keluarga besar golkar terdiri dari Golkar, ABRI dan utusan daerah.

Selepas menjadi Presiden, Habibie tak mengindahkan permintaan Soeharto yang memintanya mundur. Sementara itu, terus berkembang berita di dalam dan luar negeri bahwa Habibie tak mampu bertahan lebih dari 100 jam.

“Yang sedikit optimis meramalkan bahwa saya tidak akan bertahan lebih dari 100 hari”

Jumat pagi sekitar pukul 07.30, Habibie kedatangan tamu Danjen kopassus Mayjen Muchdi PR dan Mayjen Kivlan Zein, yang membawa surat dari Pangkostrad Prabowo Subianto dan dari Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Setengah jam menunggu, muncullah Sintong Panjaitan.

“You mau ngapai ke sini?”tanya sintong.

Ketika Kivaln dan Muchdi menjawab bahwa mereka akan bertemu Habibie, Sintong menukas

“Wah nggak bisa. Habis ini Bapak ada keperluan lain,”

Kivlan dan Muchdi mundur teratur.

Surat itu dibawa sintong dan disampaikan kepada Habibie. Surat Jenderal Nasution menyarankan agar KSAD Jenderal

Subagio Hadi Siswoyo diangkat menjadi Pangab dan Pangkostrad Letjen Prabowo Subainto menjadi KSAD.

Menjelang pukul 09.00, Habibie meninggalkan kuningan menuju Istana Merdeka. Ia akan segera mengumumkan kabinet reformasi yang dibentuknya. Di depan tangga istana merdeka, Habibi bertemu Wiranto.

“Pangab melaporkan bahwa pasukan Kostrad dari luar Jakarta bergerak menuju Jakarta dan ada konsentrasi pasukan di kediaman saya di kuningan, demikian pula istana merdeka. Dari laporan tersebut, saya berkesimpulan bahwa pangkostrad bergerak sendiri tanpa sepengetahuan Pangab”kata Habibi.

“Sambil melihat ke jam tangan, saya tegaskan kepada Pangab, sebelum matahari terbenam, Pangkostrad harus sudah diganti dan kepada penggantinya diperintahkan agar semua pasukan di bawah komando Pangkostrad harus segera kembali ke basis satuan masing-masing”

Wiranto lantas menyarankan Istri, anak, menantu beserta cucunya diamankan di wisma negara.

Habibi bertanya ke Wiranto. “untuk berapa lama kami harus tinggal di wisma negara?”

“Tergantung perkembangan keadaan”jawab Pangab.

Tak lama berselang protokol menyampaikan semua keluarga telah berkumpul di Wisma Negara. Dada Habibi kembali berkecamuk.

“Mengapa untuk kepentingan pengamanan, seluruh keluarga saya harus berkumpul di satu tempat? Apakah tidak lebih aman jikalau keluarga saya masih tetap di tempatnya masing-masing? Saya teringat nasib keluarga Tsar Romanov dari

Rusia yang sebelumnya dibunuh di satu tempat dalam revolusi kaum Bolshevik. Pemikiran yang mengerikan timbul. Lalu saya kembalikan kepegangan agama saya”kata Habibi.

Pukul satu siang Wiranto menurunkan surat mutasi Prabowo dari Pangkostrad menjadi komandan Sesko ABRI yang berkedudukan di Bandung, Jawa Barat.

Wiranto kembali menghadap Habibi dan menyampaikan akan melantik Panglima Divisi Siliwangi, Mayjen Djamari Chaniago sebagai Pangkostrad, menggantikan Prabowo. Baru saja pembicaraan dengan Wiranto beres, ADC melaporkan Pangkostrad Letjen Prabowo Subianto minta waktu bertemu.

Habibi berkenan bertemu dan mengatur waktu setelah makan siang bersama keluarganya di Wisma Negara.

“Kami makan siang dengan tidak banyak bicara. Karena semuanya berfikir dan beranalisis, mengambil kesimpulan masing-masing. Semuanya dalam keadaan tegang, sehingga nafsu makan pun tak ada,”

Selepas makan, Sintong Panjaitan melaporkan Prabowo Subianto menunggunya di ruang tamu. Habibi bergegas menemuinya. Prabowo menghadap tanpa membawa senjata.

Prabowo langsung protes ke Habibi.

“Ini suatu penghinaan bagi keluarga saya dan keluarga mertua saya Presiden Soeharto. Anda telah memecat saya sebagai Pangkostrad,”dialog Prabowo dan Habibi berlangsung dalam bahasa Inggris.

Perdebatan berlangsung sengit. Prabowo menjelaskan bahwa konsentrasi pasukan demi menjaga keamanan Presiden

Habibi. Habibi tetap keukeuh, Prabowo harus menanggalkan jabatan Pangkostrad.

Prabowo sempat meminta pengantiannya ditunda tiga bulan. Habibi tetap menolak. Prabowo meminta waktu sampai sepekan bahkan sampai tiga hari saja. Tapi, Habibi tetap tak bergeming. Pintu ruang pertemuan berderit. Sintong Panjaitan nongol di ambang pintu dan memecah perdebatan sengit itu.

“Jenderal, Bapak Presiden tidak punya banyak waktu dan harap segera meninggalkan ruangan,” tegas Sintong.

Dalam buku Prabowo Subianto, *Jalan terjal* seorang jenderal, karangan Ade Ma’ruf, Prabowo mempunyai penjelasan mengenai konsentrasi pasukan itu.

“Pasukan itu untuk mengamankan objek vital, terutama keselamatan Presiden. Saya justru sedih dengan munculnya persepsi bahwa saya mengancam keselamatan Presiden BJ Habibie,” tuturnya.

Prabowo sendiri mengatakan bahwa waktu itu ia tak bermaksud mengancam Habibi. “Jujur saja, kalau memang saya ingin, bisa saja. Jangan meremehkan pasukan Kopassus, tempat saya dibesarkan. Mungkin pasukan pengaman presiden menduga saya akan datang menyerbu. Padahal untuk menanyakan sesuatu yang sangat mendesak..”

Sorenya pukul 17.00, Prabowo resmi diganti. Ia tak menghadiri upacara pelantikan tersebut. Malam harinya ia meluncur ke rumah Soeharto. Tapi, kedatangannya tak bersambut. Bambang Trihatmojo dan Mamiiek mengusirnya.

Prabowo juga sempat mampir kerumah Tutut, yang bertolak belakang dengan rumah pak Harto. Kepada Prabowo,

Tutut menyarankan Prabowo untuk meminta maaf kepada Wiranto. Pada 23 Mei, Prabowo menemui Wiranto yang sedang ditemani Jenderal susilo Bambang Yudhoyono di kantor Dephankam di Jalan Merdeka Barat. Ia meminta pencopotan dirinya dari jabatan Pangkostrad ditinjau kembali. Namun Wiranto menolak.

Prabowo dan Habibi sempat bertemu di Jerman pada tahun 2004. Waktu itu Prabowo bertanya untuk meminta klarifikasi atas pernyataan Habibie bahwa seolah-olah Prabowo akan melakukan kudeta.

“Saya bertemu Habibie di rumahnya. kami ngobrol dari pukul 13.00 sampai 23.00. saya jelaskan semua dan Habibi mengatkan yang meminta saya mundur adalah negara superpower,”kata Prabowo.

Prabowo saat itu kaget dan tidak bisa menjawab. Ia langsung sadar, bahwajika seorang pemimpin turun, maka semua yang dekat dengan pemimpin itu juga akan turun. Permintaan Prabowo agar penggantiannya sebagai Pangkostrad ditunda tiga bulan lagi adalah untuk memperlihatkan pergantian pemimpin itu biasa dan dapat berjalan mulus. Ketika Habibie memutuskan Prabowo harus diganti pada hari itu juga, maka Prabowo menerima tanpa mengeluh.

“Bandingkan dengan kejadian Thaliand. Thaksin memberhentikan panglima angkatan darat, bukannya dilaksanakan, malah dikudeta,”ujar Prabowo.

“Kalau betul tuduhan niat saya tidak baik, saya saat itu memimpin 34 batalion. Saya bisa lakukan dan kenapa saya harus datang sendirian kepada beliau,”kata Prabowo.

“Saya tahu, banyak diantara prajurit saya akan melakukan apa yang saya perintahkan. Tetapi saya tidak mau mereka mati berjuang demi jabatan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya menempatkan kebaikan bagi negeri dan rakyat di atas posisi saya sendiri. Saya adalah seorang prajurit yang setia. Setia kepada negara, setia kepada republik”.

Seteru Militer (Prabowo Vs Wiranto) di Ambang Pintu Reformasi

Reformasi yang ditandai mundurnya Soeharto dimulai dari meletusnya kerusuhan yang merebak di hampir setiap penjuru kota. Puncaknya, empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas ditembak. Jakarta kian membara. Di saat yang sama, Soeharto sedang mengikuti sebuah konferensi tingkat tinggi di Kairo, Mesir.

Di tengah kecamuk di Ibu Kota, pada 14 Mei para perwira TNI justru berkumpul di Malang, Jawa timur, guna menghadiri upacara peralihan pasukan Penukul reaksi cepat (PPRC). Jakarta seakan dibiarkan dilanda kerusuhan dengan jumlah kerugian dan korban jiwa yang sangat besar.

Soemitro Djojohadikusomo, ayahanda Prabowo, pernah mengatakan, padahal sudah ada informasi bahwa bakal terjadi kerusuhan di sejumlah tempat. Pangkostrad Letjen Prabowo Subainto sudah mengingatkan bahwa akan terjadi sesuatu sehingga berpendapat agar Panglima ABRI dan jenderal yang menjabat posisi strategis, seperti KSAD, Danjen Kopassus dan juga dirinya, Pangkostrad, agar tidak pergi ke Malang. Namun,

Wiranto tetap bersikeras bahwa semua harus berangkat meninggalkan Jakarta.

“Ini berarti mengorbankan keamanan Jakarta, untuk sebuah acara tak begitu penting di Malang. sebab, penyerahan pasukan di Malang sebenarnya cukup dilakukan oleh Panglima divis. Padahal pada 12 Mei 1998 di Jakarta Barat sudah terjadi kerusuhan. Keadaan di Jakarta dengan cepat memburuk akibat jatuhnya korban tertembaknya mahasiswa Trisakti,” jelas Soemitro dalam buku Prabowo Subianto, jalan terjal seorang jenderal, halaman 197.

“Para jenderal kembali ke Jakarta ketika situasi sudah sangat terlambat. Sudah banyak gedung yang dibakar massa, sebagian Jakarta sudah hangus. Ketika Jakarta benar-benar porak-poranda, masyarakat dibuat keheranan karena Ibu kota seakan-akan lowong tanpa adanya penjagaan pasukan sama sekali sehingga kerusuhan dengan cepat meluas,” kata Soemitro.

Wiranto membantah tuduhan itu.

“Yang jelas, kalau saya diamkan Indonesia sudah hancur lebur, dan mungkin Demokrasi tidak seperti sekarang ini”

Pada 17 Mei 1998, malam hari Prabowo ditemani Danjen Kopassus Mayjen Muchdi PR, Farid Prawiranegara dan Fadli Zon menemui Presiden Soeharto di Cendana. Mereka membawa fotokopian faksimil sebuah rilis dari Mabes ABRI. Isinya : ABRI mendukung sikap Pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang meminta Soeharto mundur.

“Pak ini berarti militer minta Bapak turun” Kata Prabowo.

Soeharto menyuruh Prabowo memeriksa kebenaran rilis itu. Kepada KSAD Letjen Subagyo, Prabowo lalu bertanya.

Namun, Subagyo mengatakan bahwa ia belum tahu mengenai sikap ABRI. Bahkan, di kemudian hari tak ada satupun perwira tinggi mengaku telah membuatnya.

Soeharto terganggu dengan rilis itu. Ia tidak tidur sepanjang malam dan merokok cerutu terus menerus. Ia meminta putranya Bambang Trihatmojo mengontak Wiranto. Kepada Soeharto, Wiranto menegaskan tidak tahu menahu mengenai pernyataan dalam rilis tersebut.

“Saya tidak pernah menjelekkkan Bapak,”ujar Wiranto.

Tutut sempat bertemu Prabowo dan menanyakan apa langkah terbaik kedepannya. Prabowo lantas memberi saran.

“Harus mengganti Wiranto atau buatlah dekrit darurat”kata Prabowo.

Tutut menyampaikan usulan Prabowo kepada Soeharto. Tapi, Soeharto tidak mau melakukan satu pun dari kedua saran tersebut.

Pada 20 Mei, selepas Maghrib Prabowo menemui Habibie di Patra Kuningan.

“Pak, kemungkinan besar Pak Tua akan turun,”tuturnya.

Habibie menjawab bahwa ia siap menggantikan Soeharto. Dari Kuningan, Prabowo menuju Cendana. Prabowo mengira bakal mendapat pujian karena sudah menggagalkan demonstrasi yang direncanakan Amien Rais. Nyatanya, yang ia dapatkan adalah tudingan.

Di ruang keluarga, Soeharto sedang duduk bersama putra-putrinya dan Wiranto. Saat itulah Soeharto menuduh Prabowo sebagai pecundang dan penghianat. Pertempuran di lingkaran elite menjelang lengsernya Jenderal Soeharto usai sudah. Wiranto

keluar sebagai pemenang seiring Prabowo tersingkir dari posisi strategis ABRI dan Soeharto lengser ke Prabon.

Ada penyebab lain atas munculnya isu rivalitas, dimulai dari peristiwa yang terjadi sewaktu Wiranto menjabat KSAD. Waktu itu sempat diputuskan pengganti Prabowo sebagai Danjen Kopassua adalah Mayjen Suwisma. Namun, keputusan itu gagal saat Prabowo menghadap Soeharto dan memberi masukan yakni Mayjen Muchdi PR.

“Tentu saja saya sangat kecewa dengan langkah ini dan langsung menjelaskan kepada pak Harto,”kata Wiranto.

Kemungkinan lain, menurut Wiranto, saat menjadi Panglima ABRI, dirinya tidak menyetujui beberapa tindakan dan pemikiran Prabowo yang dianggap tidak urgen dan rasional. Misalnya pembangunan skuadron helikopter pada Kopassus ataupun pembelian 72 tank bekas Yordania. Perseteruan Wiranto dan Prabowo memuncak ketika Wiranto mengumumkan tujuh anggota kopasusa sebagai tersangka kasus penculika aktivis pro demokrasi.

Wiranto kemudian membentuk Dewan Kehormatan dan akhirnya memutuskan Prabowo bersalah. Ia dikenakan sangsi berupa pemecatan dari kesatuan. Bagi Wiranto, dalam Buku Prabowo Subianto Jalan Terjal Seorang Jendral halaman 116 disebutkan, mencopot Prabowo adalah langkah untuk menghilangkan kewenangan Prabowo yang memungkinkannya mengganggu posisi Wiranto.

Prabowo mendengar berita tentang rekomendasi DKP itu dari siaran radio. Ia berkata, :“Saya tidak kaget,”. Sebelum DKP

mulai bekerja, ia mengaku sudah tahu hasilnya. Ia memang harus menepi.

Keyakinan Prabowo semakin kuat saat ia bertemu dengan LB Moerdani, pada suatu acara, tak lama sebelum DKP mengakhiri pemeriksaannya. Waktu itu Benny memberi sinyal yang sama : karir Prabowo di Militer sudah tamat.

Akhirnya, Prabowo memutuskan untuk memilih menjadi pengusaha di luar negeri guna menyusun hidup yang baru. Sebelum berangkat, ia sempat menemui Wiranto. Kala itu Wiranto hanya berkomentar. “ Ya..sudah pergi saja keluar, tak apa-apa. Jauhkan pikiran kami dari Mahmil!”

Hari itu 12 Mei 1998. Sejak pagi para aktivis mahasiswa berkumpul untuk melakukan mimbar bebas di Halaman Kampus Universitas Trisakti. Menjelang zuhur, mereka bergerak keluar kampus dengan tujuan gedung DPR,MPR. Petugas keamanan menahan laju gerak mereka di depan bekas kantor Wali Kota Jakarta Barat. Akhirnya terjadi kesepakatan untuk tidak melanjutkan long march, karena pasti akan melumpuhkan arus lalu lintas.

Disepakati mahasiswa melakukan mimbar bebas di jalan S Parman, Jakarta Barat. Arus lalu lintas benar-benar macet total. Hari makin sore. Pukul 16.45 terjadi musyawarah antara Kapolres Jakarta Letkol Pol Drs Pradopo dengan Pembantu Rektor III Trisakti Ir Ari Nyoman Komang Arsana bersama Kepala Kamtib Pusat Trisakti Ir Ari Gunarsa.

Klop. Mereka sepakat mahasiswa akan mundur kembali ke kampus apabila aparat keamanan juga dimundurkan.

Nah...dalam kesepakatan saling mundur inilah insiden yang tak diharapkan itu terjadi. Pada saat garis kuning sudah terpasang di antara mahasiswa dan pasukan PHH, di mana kedua pihak melanjutkan gerakan mundur. Tiba-tiba dari arah mahasiswa berlari seseorang yang dikejar oleh mahasiswa lainnya, menerobos garis pembatas masuk ke arah pasukan PHH Brimob.

Keadaan menjadi kacau dan tak terkendali. Tanpa perintah Kapolres selaku pemegang komando, Pasukan PHH mengeluarkan tembakan ke atas disusul tembakan-tembakan lainnya, termasuk tim gegana bersepeda motor yang berada di atas jembatan layang ikut-ikutan menembak ke arah demonstran yang berlarian mencari perlindungan. Sebagian mahasiswa kembali ke kampus.

Empat mahasiswa meninggal dunia dan beberapa luka. Mereka yang meninggal adalah Elang Mulia Lesmana (1978-1998), Heri Hertanto (1977 - 1998), Hafidin Royan (1976 - 1998), dan Hendriawan Sie (1975 - 1998).

Esok harinya, Rabu 13 Mei gelombang massa kian membesar. Aksi protes mahasiswa kian menjadi-jadi. Amarah mereka menggelegak menyaksikan koleganya tewas tertembak peluru. Kerusuhan terjadi di Jakarta Barat. Massa mulai menjarah dan membakar gedung-gedung.

Panglima ABRI Wiranto menyatakan pelaku penembakan mahasiswa dan kerusuhan massa itu bukan dari ABRI.

“Mereka penjarah, pemapok dan penodong,”ujarnya.

Di saat situasi Jakarta kian genting, Wiranto memboyong para pentolan militer ke Surabaya, 14 Mei 2020. Kecamuk di Jakarta kian mendidih.

Usai tragedi Trisakti dan rentetan kejadian setelahnya, aksi mahasiswa semakin besar dan bergerak ke Gedung DPR,MPR. Tak butuh lama hingga akhirnya mahasiswa menguasai gedung wakil rakyat tersebut pada 18 Mei 1998. Kerusuhan selama tiga hari membuat perekonomian lumpuh.Klimaksnya yakni Presiden Soeharto memutuskan mundur pada 21 Mei 1998.

Pemerintah lantas membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) pada 23 Juli 1998. TGPF terdiri dari unsur pemerintah, Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM), LSM, serta organisasi kemasyarakatan. Tugasnya menemukan dan mengungkap fakta, pelaku dan latar belakang peristiwa 13-15 Mei 1998.

Dalam laporannya, TGPF menjelaskan bahwa pelaku kerusuhan 13-15 Mei 1998 terdiri dari tiga golongan yaitu, massa aktif yaitu massa pendatang yang bergerak dengan terorganisir; massa pasif adalah massa lokal yang semula menonton lalu ikut; dan provokator yang menggerakkan atau memancing massa.

Di wilayah Jakarta, TGPF menemukan jumlah korban sebanyak 1.190 orang meninggal akibat terbakar; 27 orang meninggal akibat senjata; dan 91 orang luka-luka. Data lain dikumpulkan oleh Polda Metro (451 meninggal, korban luka-luka tidak tercatat); Kodam Jaya (463 meninggal dunia termasuk aparat keamanan dan 69 orang terluka); dan Pemda DKI (288 orang meninggal dunia dan 101 luka-luka).

Penculikan Aktivis

Kisah penculikan aktivis bermula dari pembentukan sebuah kesatuan khusus oleh Mayor Inf Bambang Kristono, Komandan Pleton 42 Kopassus dan Perwira Menengah (Pamen) Diperbantukan (pada) Komandan Jenderal Kopassus Letjen Prabowo Subianto. Satuan khusus yang dinamai Tim Mawar itu dibentuk pada Juli 1997.

Tim mawar beranggotakan 10 orang perwira Grup IV Kopassus dan bintara dari Detasemen 81, Antiteror. Mereka adalah Kapten ES Mustajab, Kapten Nugroho Sulistiobudi, Kapten Julius Stefanus, Kapten Untung Budiarto, Kapten Dadang Hindrayuda, Kpten Joko Budi Utomo, Kapten Fauka Nurfarid, Serka Sunaryo, Serka Sigit Sugianto dan Sertu Sukadi.

Tim mawar bertugas mengungkap adanya ancaman terhadap stabilitas nasional. Tim ini beroperasi sangat rahasia dan tertutup, menggunakan metode hitam dengan pos komando yang berdiri sendiri. Targetnya jelas : Memburu dan menangkap aktivis radikal.

Kekhawatiran atas peningkatan kegiatan aktivis radikal memicu tim mawar untuk menangkap mereka. Aktivis yang ditangkap bukan diambil sembarangan, tetapi harus berjenis kelamin laki-laki, belum berkeluarga, belum terkenal, tapi mempunyai intensitas kegiatan yang menonjol. Penculikan pertama dilakukan terhadap Desmond J Mahesa, pada 3 Februari 1998.

Tim mawar dibelah lagi menjadi satuan-satuan kecil. Mereka terdiri dari tiga sampai empat orang. Maka, satu persatu target diciduk. Setelah Desmon, yang ditangkap adalah Pius

Lustrilanang, Haryanto Taslam, Faisol Reza, Raharjko Waluyo Jati, Nezar Pratia, Andi Arief dan lain-lain.

Kopassus mengklaim aktivis yang ditangkap sudah dipulangkan. Namun, beberapa aktivis masih belum ditemukan hingga hari ini. Prabowo menduga ada pihak lain yang ikut melakukan penculikan aktivis dan mengkambinghitamkan kopassus. Prabowo memang kemudian mengambil tanggungjawab penculikan sembilan aktivis lainnya, yang dikalimnya tidak ia tangkap.

Momentum Krisis Ekonomi

Selain perpecahan elit dan gejolak sosial, reformasi di Indonesia ditandai dengan meletusnya krisis moneter yang melanda Thailand dan merembes ke Indonesia sejak Agustus 1997. Di Indonesia, tanda-tanda adanya krisis terjadi pada Minggu kedua Juli 1997, ketika kurs rupiah merosot dari Rp 2.432 per dolar AS menjadi sekitar Rp 3.000 per dolar AS. Nilai rupiah terus merosot hingga level Rp 5.097 per dolar AS. Pada Januari 1998, rupiah semakin merosot menjadi Rp 9.800 dan mencapai Rp 11.050 pada akhir Januari 1998.

Dampak krisis moneter mengakibatkan sistem perbankan di Indonesia tidak berfungsi dengan baik, sehingga tidak mampu mendorong pertumbuhan sektor riil dan dunia usaha. Kegiana bisnis mengalami stagnasi. Persediaan barang, khususnya kebutuhan bahan pokok mengalami gembatan, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Krisis pangan dan penyediaan sembako pun tak dapat dihindari.

Macetnya dunia usaha mengakibatkan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Pengangguran membesar seiring bertambahnya angkatan kerja baru sebanyak 3,2 juta jiwa. Krisis moneter menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran terbuka, dari 4,68 juta pada 1997 menjadi 5,46 juta pada 1998.

Ekses lebih jauh, masyarakat mulai resah dan takut. Kecemasan rakyat itu akhirnya terefleksikan dalam aksi-aksi unjuk rasa, terutama dimotori kalangan mahasiswa. Pada awalnya belum terdengar tuntutan agar Presiden mengundurkan diri. Tapi, belakangan semakin tampak dukungan rakyat kepada pemerintah mulai surut. Akhirnya, unjuk rasa bukan lagi menuntut perubahan politik ekonomi, melainkan menuntut perubahan kepemimpinan nasional. Sejak itu, dari hari ke hari, tuntutan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri semakin nyaring.

Media massa pun mulai bebas menurunkan pemberitaan dan opini menyerukan aspirasi rakyat. Euforia pers nasional kian mendapat tempat seiring kebijakan lunak pemerintah dengan munculnya tuntutan reformasi. Ketika puncak peristiwa kerusuhan terjadi, Soeharto sedang berada di Kairo Mesir.

Menko ekuin Ginanjar Kartasasmita kepada pers menyatakan di DKI Jakarta sedikitnya terdapat lima ratus satuan usaha yang mengalami gangguan. Jika satu usaha menyerap 10 pekerja, maka akan terdapat 50.000 orang yang mengalami gangguan, belum termasuk keluarganya.

Ginanjar mengimbuhkan, kerugian material kerusuhan juga menyebabkan terganggunya sistem perekonomian terutama

dalam jangka panjang. Kerusakan tidak hanya menggangu pusat perdagangan besar, tapi juga kegiatan hulu hingga ke hilir.

Menurut Gubernur BI, Sjahril Sabirin, ada 501 kantor Bank dan 220 ATM mengalami kerusakan akibat pembakaran, perusakan dan penajrahan. Tuntutan reformasi total termasuk pengunduran diri Soeharto semakin mengeras disuarakan dari seluruh penjuru tanah air.

Clinton Percepat Kejatuhan Soeharto

Siapa sangka ternyata krisis moneter di Indonesia itu sengaja diciptakan oleh Amerika Serikat dan International Monetary Fund (IMF). Tujuannya untuk membuat Indonesia bergolak dan membuat Soeharto jatuh. Krisis ekonomi yang disusul krisis politik mengakibatkan pelarian modal ke luar Indonesia secara masif, hingga menyebabkan anjloknya nilai rupiah sampai Rp 17.000,- per dolar. Rupiah yang lemah membuat pebisnis kolaps karena tidak dapat lagi mengelola utang luar negerinya.

Hari itu tanggal 15 Januari 1998, ekonomi Indonesia yang seharusnya tidak terpengaruh hebat akibat dampak krisis keuangan dan moneter Asia, akhirnya menyerah kalah pada krisis yang direkayasa Amerika Serikat dan China yang berkolaborasi dengan IMF.

Suharto dan Indonesia masuk perangkap situasi yang diciptakan konspirasi global yang didukung penuh mayoritas konglomerat keturunan Indonesia. IMF menyetujui kucuran utang untuk Indonesia dengan penandatanganan perjanjian utang

beserta syarat-syarat yang harus dipatuhi Indonesia oleh Presiden Soeharto. Dengan menandatangani perjanjian utang US\$ 43 miliar, IMF mendorong percepatan kejatuhan Presiden Suharto, dan merancang masa depan baru untuk Indonesia yang sarat kepentingan Amerika, China dan para konglomerat keturunan Indonesia.

Rakyat Indonesia tidak mengetahui peran besar Presiden AS saat itu Bill Clinton dalam menekan Presiden Suharto agar menyetujui paket persyaratan dan rencana kebijakan IMF yang harus dipatuhi Indonesia, termasuk penutupan pabrik pesawat terbang PT IPTN, penghapusan peran BULOG sebagai penyangga stabilitas harga 9 bahan pokok, penghapusan berbagai subsidi, pembatalan program mobil nasional Timor, dan penerapan pasar bebas di Indonesia.

Singkatnya, penandatanganan perjanjian dan butir-butir persyaratan perjanjian IMF-RI adalah lonceng kematian untuk kedaulatan ekonomi RI. Indonesia seketika berada dalam cengkeraman kekuasaan dan kendali IMF. Campur tangan Pemerintah Amerika terutama secara langsung melalui tangan Presiden Bill Clinton, sesungguhnya bukan suatu hal rahasia lagi.

Transkrip tiga percakapan telepon Bill Clinton – Suharto yang bebas diakses publik, menunjukkan betapa ‘persuasifnya’ Presiden Amerika itu dalam meyakinkan Presiden Suharto. Clinton menekankan kecemasannya bahwa Suharto akan ‘diterjang peluru rakyatnya sendiri’ ketika nilai tukar rupiah jatuh dari 2.500 menjadi lebih dari 16.000 per 1 dolar AS.

Usai Suharto meneken perjanjian utang dengan IMF, Clinton dengan lega dapat berkata kepada sahabat karibnya James T Riady, *“My mission has accomplished. One of my debts paid off !”*

Mantan Menteri Luar Negeri AS Lawrence Eagleburger memiliki penilaian khusus setelah pengunduran diri Suharto, 21 Mei 1998: “Kami cukup pandai karena menggunakan IMF untuk menggulingkan Suharto. Apakah itu cara bijaksana untuk selanjutnya, adalah masalah lain. ”

Pada akhirnya, gerakan reformasi di Indonesia hanya memperburuk krisis ekonomi dan membawa Indonesia mundur beberapa dekade ke belakang. Perdana Menteri Australia Paul Keating – yang menjalin hubungan dekat dengan pemimpin Indonesia selama bertahun-tahun menuding Departemen Keuangan AS “ ... dengan sengaja menciptakan keruntuhan ekonomi sebagai sarana untuk membawa kejatuhan Soeharto ...”

Kolaborasi Amerika Serikat, China, CSIS, telah secara efektif mempercepat keruntuhan Rezim Suharto, sebagaimana telah mereka rencanakan jauh sebelumnya.

Bahkan Camdessus secara tidak tahu malu, dengan gaya bak penguasa pada saat penandatanganan LoI IMF-RI yang meninggalkan kemarahan rakyat Indonesia, mengatakan: “Kami menciptakan kondisi yang mengharuskan Suharto untuk meninggalkan kuasaannya. Kami bangga dengan itu!”

Clinton pertama kali menekan Suharto pada 8 Januari 1998, untuk mendesaknya mendukung reformasi ekonomi dan untuk menjaga suku bunga tetap tinggi sampai rupiah mulai

stabil. Clinton menawarkan jasa Deputy Menteri Keuangan Larry Summers sebagai konsultan untuk membantu dalam proses reformasi di Indonesia. Presiden Suharto, dengan gaya Jawa yang khas, mengucapkan terima kasih kepada Clinton dan berjanji akan mempertimbangkan sungguh-sungguh usulan dan saran Amerika.

Keesokan hari, dari arsip dokumen rahasia itu, menyebut Menteri Perdagangan dan Industri Indonesia Tunky Ariwibowo mengatakan kepada duta besar AS untuk Jakarta Stapleton Roy bahwa Suharto terkesan dengan Clinton dan wawasannya tentang bagaimana masyarakat internasional memandang situasi Indonesia.

Panggilan telepon berikutnya, Clinton menguraikan rencananya membantu Indonesia dan menyampaikan saran kepada Suharto untuk melaksanakan perjanjian IMF dan mereformasi sistem perbankan pusat dan swasta, sebagaimana yang diharuskan dalam letter of intent (Lo) IMF. Hasilnya luar biasa, dolar AS tetap melambung, 16 bank ditutup dan meninggalkan utang serta kewajiban perbankan ratusan triliun rupiah yang harus dipikul Bank Indonesia dan rakyat Indonesia.

Keberhasilan James Riady meyakinkan Presiden Bill Clinton agar segera menjadikan penggulingan Suharto sebagai program prioritas Pemerintah Amerika Serikat pada akhir tahun 1996, tidak lepas dari utang budi dan pertemanan lama Clinton-Riady.

Mereka berdua sudah menjalin hubungan erat sejak 1985 ketika James Riady ditugaskan untuk mendekati Bill Clinton,

yang namanya masuk dalam radar intelijen China sebagai calon presiden Amerika di masa depan.

Penugasan China kepada James Riady untuk mendekati Bill Clinton dimulai dengan kunjungan Liem Sioe Liong (Sudono Salim) dan Mochtar Riady ke kota Little Rock, Arkansas. Liem Sioe Liong adalah konglomerat terkaya di Indonesia, sekaligus pemilik Bank terbesar BCA. Mochtar Riady adalah ayah James Riady yang pada saat itu menjabat Direktur Utama Bank BCA.

Maksud kunjungan mereka ke ibukota negara bagian Arkansas itu adalah mencari bank yang akan segera dibeli dan selanjutnya menjadi samaran sempurna bagi James Riady untuk menjalankan misinya, mendekati Bill Clinton Gubernur Arkansas, Amerika Serikat. Mengenai mengapa James Riady yang dipercayakan melakukan operasi intelijen China itu, Mochtar Riady mengungkap pepatah China: “Menangkap Kuda Pakai Kuda”. James sebaya dengan Clinton sehingga tidak ada hambatan psikologis dan komunikasi di antara mereka.

James Riady berbekal pengetahuan dari intelijen China mengenai sosok Bill Clinton, segera melakukan pendekatan kepada Clinton pada saat awal kedatangannya ke Little Rock City, Arkansas. Diawali dengan “courtesy call”, dilanjutkan dengan beberapa pertemuan dan penyampaian penawaran bantuan dari James Riady yang mustahil ditolak Clinton.

James tahu persis karakter, gaya hidup flamboyan Clinton dan kegemarannya berada di dekat para wanita muda dan cantik. Semua itu membutuhkan biaya besar yang mustahil ditutup dari gaji Clinton sebagai gubernur atau meminta uang

dari Hillary, istrinya yang berpenghasilan jauh lebih besar sebagai pengacara terkemuka di Arkansas.

Singkatnya, James hadir sebagai solusi bagi Clinton, di antaranya melalui program investasi ajaib dari Wharton Bank milik James Riady khusus kepada Hillary dan Bill Clinton dengan yield hasil investasi hingga ratusan persen per tahun. James Riady dan Wharton Bank menjadi kasir dan juru bayar semua biaya kenakalan Clinton semasa jadi Gubernur Arkansas.

Clinton pertama kali terpilih sebagai Gubernur Arkansas pada tahun 1978 pada usia 32 tahun, yang menjadikannya gubernur termuda di Amerika. Pada pemilihan gubernur berikutnya, ia dikalahkan calon dari partai republik. Namun, Clinton kembali berhasil memenangkan jabatan Gubernur Arkansas pada pemilihan berikutnya dan terus menjabat gubernur sampai tahun 1991.

Karir politiknya yang luar biasa menjadikan Clinton sebagai tokoh muda Amerika yang diramalkan banyak pihak bakal menjadi presiden Amerika di masa mendatang. Hal ini juga menjadi motif intelijen China untuk membangun hubungan pribadi dengan Clinton sejak tahun 1985 melalui James Riady.

Kesempatan menjatuhkan Suharto baru terbuka ketika China melalui James Riady dan para agennya berhasil memberi kontribusi besar kepada kemenangan Bill Clinton pada pilpres Nopember 1996 melalui bantuan dana kampanye secara ilegal yang dipasok dari Global China Resources Ltd, Hong Kong – perusahaan kedok dari China Military Intelligent.

Pasokan uang itu mengalir ke Partai Demokrat AS dari sumbangan para orang China di Amerika Serikat. Para

penyumbang kampanye Bill Clinton itu sebelumnya menerima transfer uang dari Bank Lippo Jakarta, Indonesia milik James Riady.

Utang budi dan pertemanan menjadi dasar Clinton terlibat dalam penggulingan Suharto. Sadar bahwa Indonesia dan Suharto adalah sekutu utama AS, Clinton menggunakan tangan IMF untuk mencapai tujuannya. China sebagai negara yang menikmati hasil terbesar dari penjatuhan Suharto oleh AS – IMF memainkan peran di balik layar dan pengerahan intelijen secara masif di Indonesia pada masa itu. Akhirnya, sejarah mencatat Suharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.

BAB III

KONFLIK POLITIK DAN DISINTEGRASI DI INDONESIA

Pertarungan Elit Menjelang Lengsernya Presiden Bj Habibie

Sebelum Sidang Umum MPR dengan agenda Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI, 20 Oktober 1999 silam itu berlangsung, elit politik nasional pecah ke dalam beberapa kubu. Kubu pertama adalah kelompok PDIP, yang digdaya sebagai pemenang pemilu dan dengan percaya diri menyorong nama Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri sebagai calon Presiden tunggal. Kubu kedua berasal dari kelompok Amien Rais yang menyokong Abdurahman Wahid alias Gus Dur sebagai calon Presiden dari poros tengah. Kubu ketiga adalah kelompok Golkar yang masih mengharapkan Bj Habibie mencalonkan kembali. Habibie memilih menepi, seiring kian meruncingnya gejolak di tubuh internal Golkar, yang terbelah ke beberapa barisan : Pendukung Habibie, Pendukung Gus Dur, dan pendukung Megawati. Bagaimana panasnya pertarungan elit kala itu? Simak penjelasan lengkapnya.

Habibie sudah merasakan aura panas penolakan dirinya, jauh sebelum Sidang Umum MPR dengan agenda mendengarkan Laporan Pertanggungjawaban Presiden transisi itu dimulai. Dianggap warisan rezim orde baru, sebagian elit tak menginginkan Presiden Bj Habibie melanjutkan kekuasaannya.

Demo-demo menentang dirinya meletus dan kian meluas. SU MPR itu diwarnai rivalitas semakin tajam di antara berbagai kelompok politik. Ditimpali oleh mobilisasi massa yang kian anarkis. Antara massa pro Habibie maupun anti Habibie.

Dalam buku *Detik-detik terakhir*, Halaman 413, Habibi menulis banyak dana dan fasilitas yang sudah mengalir ke Indonesia dan khususnya Jakarta untuk membiayai gerakan arus massa. Mereka memiliki rencana dan program masing-masing dan mengatasnamakan kata-kata hak asasi manusia, kebebasan, kerakyatan, demokrasi.

Sementara sebagian elit menyiapkan skenario karena membaca gelagat Habibie, yang tetap keukeuh akan mempertahankan kekuasaannya. Didukung kekuatan Golkar di belakangnya, Habibie diyakini akan menang mudah pada pertarungan mendatang.

Desakan yang meminta Habibie purna tugas terus mengalir deras. Puncaknya Habibie galau. Kegalauan Habibi membuhul ketika menengok barisan pendukungnya mulai tak solid. Ia merasakan langsung gejala itu.

Bermula dari sikap politik orang-orang terdekat, yang mulai menunjukkan sikap perlawanan. Adi Sasono misalnya, yang saat itu masih menjabat Menteri Koperasi dan UKM membentuk Partai Daulat Rakyat (PDR). Habibie dan Adi Sasono adalah sahabat dekat.

Kelahiran PDR disebut-sebut menjadi benih-benih merenggangnya hubungan Habibie-Adi. Ini karena Adi dianggap sudah tak seiring sejalan dengan Habibie, lantaran Habibie

waktu itu masih menjabat sebagai ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Pembentukan PDR pun sebetulnya tanpa persetujuan Habibie.

Walauapun, anggapan ini sempat dibantah oleh pentolan PDR. Menurut mereka, PDR memang sengaja disiapkan apabila Habibie nanti terpental atau tersingkir dari Golkar. PDR didesain sebagai sekoci bagi Habibie. Mereka mengklaim, pendanaan PDR sebagian besar justru berasal dari orang yang sangat dekat dengan Habibie. Jadi, rasanya sangat mustahil bila Habibie tak tahu keberadaan PDR.

Dari penjelasan ini, beberapa pihak lalu menilai, Adi masih setia dan menaruh hormat sangat tinggi pada Habibie. Buktinya, Adi siap pasang badan dengan menyediakan sekoci bagi Habibie bila keadaan tak menguntungkan menjelang Pemilu 1999.

Sampailah kemudian adanya peristiwa yang menjadi perhatian banyak pihak. Di sebuah media ternama Ibu Kota, tiba-tiba muncul iklan satu halaman penuh yang mengatasnamakan PDR dengan ucapan besar di tengahnya: Adi Sasono Presidenku.

Masyarakat pun kaget. Mereka mulai menduga, Adi Sasono sengaja menelikung Habibie dan bermain sendiri untuk mendongkrak popularitas di saat-saat akhir kampanye. Para pendukung dan orang dekat Habibie pun jengah membaca iklan politik itu. Masukan pun banyak disampaikan ke Habibie yang intinya meminta untuk tidak memberi tempat atau panggung untuk Adi Sasono.

Habibie mengakui mendapat tekanan keras untuk mundur. Wacana dan opini terus dikirimkan lewat corong-corong media. Teriakan lantang mendesak Habibie mundur muncul dari Koesnadi Hardjasoemantri, Ketua Umum Badan Kerjasama Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (BKS-Ikaptisi).

Lewat konferensi pers 18 Oktober 1999, Koesnadi menegaskan,

“Demi kepentingan bangsa dan negara, tidak ada alternatif yang lebih baik untuk Bj Habibie kecuali mundur dari pencalonan dirinya sebagai presiden”

Klaim Koesnadi, apa yang ia lontarkan itu sejalan dengan pernyataan sikap para alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia. Koesnadi adalah guru besar di UGM. Pernah menjadi rektor di sana sejak 1986 hingga 1990. Ia pernah menjadi staf ahli Emil Salim ketika menjabat Menteri Lingkungan Hidup.

Belakangan, ia ditunjuk menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh rezim baru Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Koesnadi meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat terbang Garuda Indonesia pada 7 Maret 2007 di Yogyakarta. Ia menumpang pesawat yang naas itu dalam perjalanannya kembali ke Yogya dari tugas rutinnnya di Jakarta.

Permintaan mundur itu diperkuat pula dengan pernyataan sikap alumni perguruan tinggi yang diteken 1 Oktober 1999. Dikatakan dalam pernyataan tersebut, kondisi bangsa dan

negara sekarang sudah sedemikian rupa memprihatinkan sehingga selain ancaman disintegrasi dan persoalan kesulitan ekonomi yang dihadapi bagian terbesar rakyat, Indonesia juga dalam posisi menanggung aib dan kemalangan akibat kesalahan Habibie menangani masalah Timor Timur.

Menurut Habibie, sebetulnya masih banyak yang menginginkan dirinya tetap mencalonkan diri sebagai presiden. Disamping itu, memang banyak pula yang menyarankan agar tidak mencalonkan diri.

Tanggal 19 Oktober 1999, Habibie menyaksikan langsung perkembangan ibu kota. Keadaan sangat memprihatinkan. Tiap kubu politik dan arus bawahnya sudah kelihatan berhadapan dan memasang kuda-kuda.

Barisan Banser (NU), Pemuda Ka'bah (PPP), Barisan Banteng Merah (PDI-P), Pemuda Pancasila (Golkar), kelompok islam dalam naungan Dewan Dakwah dan kisd, barisan – barisan masyarakat seperti perkumpulan masyarakat banten dan sebagainya. Semua sudah berkeliaran di Jakarta dan berhadapan di tempat startegis seperti sekitar Gedung DPR,MPR senayan dan bundaran HI di sekiatr istana negara.

“Semua kebijakan yang harus saya ambil adalah kebijakan yang irreversible dan redundancy yang ada dapat total hilang, seperti terjadi di Yugoslavia dan Uni Soviet, yang terpecah dalam keping-keping bekas wilayahnya menjadi beberapa negara baru. Salah langkah, perang saudara meletus,”

Ketika bertemu Dewan Pertimbangan Agung, Habibie akhirnya menegaskan bersedia atau tidak diacalonkan kembali

sebagai Presiden tergantung diterima atau tidaknya pertanggungjawaban Presiden.

Kendati saat itu DPA menegaskan tidak ada peraturan yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban Presiden harus diterima jikalau mau mencalonkan kembali.

Ketua DPP Golkar Fahmi Idris sempat datang menemui Habibie. Ia ikut mempertegas bahwa diterima atau ditolaknya pertanggungjawaban Presiden Habibie tidak akan memengaruhi keputusan Golkar terhadap pencalonan Habibie. Dasarnya, kata Fahmi Idris, tidak satupun ketentuan perundangan yang menyatakan bahwa bila pertanggungjawaban ditolak maka tidak boleh mencalonkan menjadi presiden.

Klaim Fahmi Idris, untuk mencari calon alternatif selain Habibie, sangat sulit bagi Golkar. “Satu-satunya alternatif selain Habibi hanya Ketua Umum Golkar Akbar Tanjung. Tapi, sejak awal Akbar Tanjung menyatakan tidak mau dicalonkan,”

Di gedung terhormat yang diisi oleh para orang-orang terhormat, pada 14 Oktober 1999 silam, di Sidang Istimewa MPR, Habibie dipermalukan seperti begal tak berharga.

Habibie sebagai Presiden yang menjabat pasca lengsernya Soeharto itu, memasuki ruang sidang istimewa MPR yang dipimpin oleh Amien Rais sebagai ketuanya.

Adalah kelaziman protokoler, apabila seorang presiden memasuki ruangan, maka seluruh hadirin menyambutnya dengan berdiri. Tetapi bagaimana selangkah setelah kaki Habibie

memasuki ruangan sidang, gedung MPR tiba-tiba bergemuruh dengan suara: HUUUUUUUUUUUUUUU berkepanjangan!

Koar itu bergema dari mulut hampir seluruh peserta sidang, dan ditimpali pula oleh teriakan ejekan dari beberapa lintir orang. Habibie melangkah ringan menuju samping podium dengan tetap melempar senyum lebar ke arah para anggota majelis, yang sebagian tak beranjak dari duduknya.

Cemohan itu baru berhenti setelah Habibie menempati tempat duduknya.

Habibie disidang seperti pesakitan!

Cukup sampai di situ?

Tidak!

Hinaan dan cemoohan itu justru berlanjut manakala Habibie berdiri di podium kenegaraan, untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban presiden.

Hampir sejam Habibie menyampaikan pidato yang berisi keberhasilan Indonesia yang mampu dientas dari keterpurukan ekonomi dan politik pasca tumbanganya Soeharto, tapi tak sekalipun applause tepuk tangan menyambutnya.

Justru, berulang kali pidatonya terinterupsi oleh suara gaduh dan teriakan, yang tak sekalipun ditegur oleh pimpinan sidang.

Sementara anggota yang tak gaduh dan berteriak, lebih memilih lelap dan tertidur.

Puncaknya ketika pada 20 Oktober 1999, MPR akhirnya menolak LPJ Habibie. Hasil akhir voting diperoleh melalui angka kerja-mengajar yang mendebarkan. Antara yang menolak dan menerima hanya terpaut 33 suara atau 4,78 persen. Kecil sekali. Yang menolak berjumlah 355 (51,45 persen) orang. Sedangkan yang menerima 322 orang (46,59 Persen). Lalu 9 suara abstain 4 suara tak sah dari total suara keseluruhan 690 suara.

Penghitungan berlangsung dramatis dan mendebarkan. Di awal perhitungan, suara yang menerima LPJ sempat unggul sampai angka 150-an suara. Namun kemudian jumlah ini berhasil disamai, bahkan kemudian mulai disusul.

Setelah penghitungan mencapai angka 346, yang berarti lebih separuh dari 690 suara, maka suara yang menolak tidak bisa dikejar lagi, meskipun bedayanya hanya berkisar antara 20-30 suara.

Saat petugas penghitungan suara menyebut kata menerima, teriakan huuu pun membahana. Sebaliknya, ketika disebut menolak, sebagian hadirin pun dengan antusias berteriak yes...

Palu sidang yang diketok Amien Rais, menyatakan secara bulat penolakan pertanggungjawaban Habibie sebagai presiden. Artinya; Habibie dianggap tak becus mengemban amanat sebagai presiden, dan kerja kerasnya memulihkan keterpurukan Indonesia, tak dianggap punya nilai apa-apa.

Dalam satu kesempatan, Akbar Tanjung dan Marwah Daud sempat bersitegang. Marwah menuding Akbar adalah aktor yang membuat LPJ Habibie ditolak MPR. Ia menuduh Akbar penghianat.

Pertengkaran hampir berakhir adu jotos jika Bj Habibie tak berdiri dan cepat-cepat merangkul tubuh Akbar Tanjung. Memang, di ring satu internal Habibie sendiri, baik yang di Golkar maupun yang di parpol lain, tapi terajut dalam kaukus politik Irama Suka (Irian, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan), sempat terperangkap pada fantasi bahwa Habibie bukan sekadar presiden transisi, melainkan presiden penerus Soeharto.

Asumsi ini semakin diperkuat ketika Habibie tidak mengusut jumlah harta kekayaan presiden Soeharto dan dianggap menolak memberikan otonomi pada Timor Timur sehingga Timor Timur melepaskan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1999.

Atas dasar kondisi objektif itu, Habibie gagal dalam menghadapi aliansi besar yang menggusurnya di parlemen. Habibie gagal memetakan dan membendung arus besar koalisi yang mencegah Habibie terus melanjutkan kekuasaannya. Saat itu, Habibie hanya mengandalkan partai Golkar sebagai kekuatan kunci.

Sementara, Habibie tak menghitung bahwa internal Golkar saat itu bermuka dua. Golkar di atas permukaan memang terkesan solid mendukung Habibie. Tapi, Golkar sebetulnya hanya sekedar pendukung. Bukan barisan Habibie. Golkar sebagai sebuah barisan, terbelah dalam dua formasi barisan.

Formasi pertama, yang dimotori Ginandjar Kartasasmita, yang pada hakekatnya menunggu momentum tersingkirnya Habibie, untuk kemudian mengerahkan formasi barisan mendukung Megawati.

Formasi kedua, yang dimotori Akbar Tanjung, menunggu momentum tersingkirnya Habibie, untuk mendukung Gus Dur sebagai presiden.

Inilah kompleksitas politik yang tidak dibaca secara cermat oleh Habibie. Cara pandang Habibie yang khas Jerman dan pada umumnya orang-orang Barat, memandang dukungan partai berarti dukungan solid dari sebuah barisan.

Hal ini berbeda dengan Golkar di era Soeharto. Presiden kedua RI itu memang berhasil memaksa Golkar berfungsi sebagai sebuah barisan. Begitu Soeharto lengser, Habibie menyangka Golkar masih seperti sebuah barisan. Padahal Golkar sudah menjelma menjadi konfederasi beberapa klub yang mana kesetiaannya adalah pada klub dan kepala-kepala suku masing-masing.

Habibie dalam memandang Golkar sebagai tumpuan utama dukungan agar bisa jadi presiden yang masih dipayungi UUD 1945 asli itu, gagal mengenali pergeseran watak Golkar dari barisan, yang kemudian berubah menjadi gerombolan dan kerumunan.

Pada waktu Soeharto memaksa Golkar jadi barisan dan berhasil berkuasa 32 tahun, karena dia punya ideologi, jaringan terorganisir, dan komunitas. Sekali lagi komunitas. Bukan klub.

Jadi Soeharto membawa masuk basis ekonomi dan basis budaya ke dalam Golkar. Bukan sekedar main tanam oknum-oknum di Golkar. Tapi menyusun strategi dan sistem. Bahkan aturan main. Penempatan orang-orang yang setia pada Soeharto juga sesuai keahlian dan talenta masing masing.

Ada model Akbar Tanjung. Ada model Siswono Yudhohusodo, dan Cosmas Batubara. Ada orang model Sudharmono dan Moerdiono. Intinya melalui Golkar Soeharto menyusun barisan berikut sistem dan aturan mainnya.

Habibie waktu mengambil alih Golkar merasa hanya meneruskan sistem dan aturan main yang sudah dirancang bangun oleh Soeharto. Rupanya, Habibie salah menghitung.

Tepat pukul 00.35, Rabu dinihari Ketua MPR Amien Rais menutup rapat paripurna sambil mengatakan “Dengan demikian pertanggungjawaban presiden BJ Habibie ditolak”

Selepas LPJ ditolak, dari ruang keluarga di Patra Kuningan, istrinya, Ainun Habibie bertanya “Selanjutnya bagaimana sikap Bapak?” Habibie dengan spontan menjawab “Saya tak bersedia untuk dicalonkan kembali sebagai presiden”

Jimly Asshiddiqie yang menemani Habibie di rumah, juga bertanya seperti Ainun. Habibie memberi jawaban yang sama

pula. Lewat Jimly, Habibie kemudian memerintahkan untuk segera mengumpulkan semua fraksi dan parpol yang merasa dekat untuk merapat ke rumahnya di Kuningan. Malam itu juga.

Pukul 1.30 dinihari, semua pimpinan fraksi dan parpol datang, kecuali PDIP, PKB dan Partai Demokrasi Kasih Bangsa. Koalisi Fraksi inilah yang sejak awal lantang menolak LPJ Habibie.

Jika fraksi Golkar tak berkhianat, seperti tuduhan Marwah Daud, boleh jadi LPJ Habibie diterima. Mengingat suara koalisi penentang LPJ masih kalah jumlah dengan koalisi fraksi Golkar.

Persamuan itu dimanfaatkan Habibie untuk mempertegas sikapnya yang tak ambil bagian dalam kontestasi Presiden. Tapi, malam itu mereka juga membahas siapa yang bakal diusung sebagai pengganti, untuk menandingi Megawati Soekarno Putri, yang sudah pasti diusung oleh partai pemenang pemilu, PDIP.

Habibie menyampaikan gagasannya bahwa barisannya harus menyiapkan tokoh untuk menghadang Mega. Tapi siapa?

Habibie lantas mengusulkan nama Amien Rais. Tapi, malam itu Amien tak menyanggupi dan mengusulkan calon tunggal bernama Abdurrahman Wahid.

Habibie tak sependapat dengan Amien Rais. Ini alasan Habibie.

“Bahwa masalah yang akan dihadapi Presiden nanti sangat banyak dan kesehatan Abdurrahman Wahid tidak mengizinkan, karena beliau tidak dapat membaca, sehingga susah untuk kita pertanggungjawabkan,”

Sedari awal, Habibie memang terkesan menolak nama Gus Dur. Bukan karena ketidaksukaannya terhadap pribadi Gus Dur. Tapi, Habibie sepertinya masih menaruh dendam atas sikap PKB, partainya Gus Dur, yang berkoalisi dengan Megawati untuk menolak LPJ nya di SU MPR itu.

Amien Rais tetap keukeuh dan dengan tegas menyatakan calon yang sudah disiapkan poros tengah adalah Gus Dur. Habibie tetap belum menerima Gus Dur. Ia lantas mengusulkan nama Akbar Tanjung. Sementara Akbar Tanjung menegaskan calon Golkar hanya satu, Bapak BJ Habibie.

Habibie juga menyorong nama Wiranto. Tapi, jawabannya tegas dan jelas menolak. Habibie sempat bertanya kepada Hamzah Haz dan dia langsung menjawab.

“PPP hanya memiliki calon tunggal ialah pak Habibie, namun kami dapat mengerti dan menerima kebijakan Habibie untuk bersedia mencalonkan atau dicalonkan sebagai Presiden. Setelah kami bermusyawah, maka calon kami adalah KH Aburahman Wahid”

Maka, sebelum ditutup, rapat memutuskan beberapa nama untuk diajukan. Begini urutannya.

1. Amien Rais
2. Akbar Tandjung
3. Wiranto
4. Hamzah Haz
5. Abdurahman Wahid.

Paginya, Yusri Ihza Mahendra datang menemui Habibie. Ia ditemani jajaran pengurus PBB. Kepada Habibie, ia memohon izin ikut mendaftar sebagai calon Presiden. Habibie lantas memberi saran.

“Boleh...dengan catatan bahwa jikalau salah satu dalam urutan yang sudah disepakati ada yang menyanggupi untuk mencalonkan diri, maka Yusril harus mundur”

Habibie lantas mengumumkan pengunduran dirinya di depan sekitar 77 wartawan dari 45 media massa dalam dan luar negeri, pagi esoknya.

Beberapa bulan sebelumnya, nama Gus Dur sudah ramai dibincangkan sebagai kandidat Presiden. Namanya diusulkan oleh Amin Rais yang membentuk poros tengah pada Juli 1999. Poros tengah adalah koalisi partai muslim.

Kemunculan nama Gus Dur membuat komitmen koalisi PDIP-PKB berubah.

Dari lima nama tadi, rupanya hanya Gus Dur yang menyatakan kesediannya. Sementara Posisi Golkar yang tanpa capres membuat pendukung Habibie kebingungan menentukan sikap. Beberapa anggota mulanya hendak bersikap abstain. Tapi, semua anggota Golkar bisa memahami dan akhirnya setuju mendukung Gus Dur.

Di hari yang sama, pagi itu pukul 10 tanggal 20 Oktober 1999 di ruang Mawar lantai dua Hotel Mulia Jakarta pertemuan sejumlah anggota MPR dari fraksi Golkar dan Gus Dur berlangsung. Dalam pertemuan itu anggota MPR Fraksi Golkar

menyatakan siap memberikan suara mereka sepenuhnya untuk Gus Dur. Jumlahnya sekitar 373, yang merupakan suara Golkar pendukung Habibie.

Gus Dur sempat bertemu Nurcholis Madjid (Cak Nur), di Hotel Regent, Kuningan. Ia bilang begini “Saya percaya pada Cak Nur, karena dia dan saya punya visi, pikiran dan perasaan yang sama” ujar Gus Dur.

“Bahwa kalau karena alasan kesehatan mata saya tidak bisa maju jadi calon presiden, Cak Nur siap maju. Tetapi kalau saya jadi calon, maka Cak Nur tetap menganggap saya sebagai imammnya,”kata Gus Dur.

Sementara Yusril Ihza Mahendra ikut mengalah dan menyerahkan suaranya untuk Gus Dur. Walaupun, diawalnya ia sempat sesumbar akan mengantongi 206 suara. Unggul dari Gus Dur yang hanya 185 suara. Sementara kubu Megawati sekitar 304 suara.

Versi Yusril, ia sempat disarankan Habibie untuk berkoalisi dengan Megawati.

“Mega Presidennya atau You wakilnya”kata Habibie seperti ditirukan Yusril.

Di kabinet Gus Dur, Yusri mendapat kehormatan menjadi Menteri Hukum dan HAM. Usai dinyatakan menang, Gus Dur langsung bertemu Habibie di Patra Kuningan. Mereka bertemu empat mata.

Menurut Habibie, Gus Dur datang menyampaikan tiga hal.

Pertama mengucapkan terimakasih atas keberhasilan Habibie membuka pintu kebebasan demokrasi. Kedua bertemaikasih karena Habibie umat islam yang selalu berada di pinggiran pindah ke tengah. Trima kasih karena kebijaksanaan Habibi sehingga Gus Dur dipilih menjadi presiden ke 4.

Membaca Peran AS-Australia dan Motiv Perang Minyak Di Balik Hengkangnya Timor Timur dari NKRI

Anda mungkin akan terkaget-kaget ketika tahu bahwa lepasnya Timor Timur dari pangkuan ibu pertiwi tahun 1999 silam itu, karena peran penting Australia yang disokong penuh sekutunya, Amerika Serikat. Motivasinya adalah kepentingan ekonomi : penguasaan ladang minyak dengan potensi cadangan triliunan kaki kubik di kawasan Timor Timur itu. Dahsyat bukan!!!. Dari temuan data kita dapat memotret satu hal, Australia memanfaatkan celah instabilitas politik dan keamanan yang tengah bergejolak di Indonesia--akibat ekses buruk pasca reformasi--, untuk mendorong terlaksananya referendum hingga berakhir kemerdekaan bagi Timor Timur. Paman Sam terlibat aktif menyokong manuver negara kanguru itu. Dan yang mengagetkan lagi, beberapa tahun pasca kemerdekaan, Presiden pertama Timor Leste Xanana Gusmao baru tersadar. Ia seperti tak bahagia atas kemerdekaan yang didapat dan berkomentar begini “mendingan Timtim memilih otonomi khusus dari Indonesia ketimbang merdeka tapi kembali hidup dalam penjajahan asing”. Masih penasaran? Simak penjelasan lengkapnya.....

Sejarah Timtim adalah sejarah Australia dengan penguasaan blok minyak bernama Greater Sunrise. Lokasinya di lepas laut, berjarak 150 kilometer arah tenggara Timor Leste. Potensi gas dan minyak di Greater Sunrise ini terbesar kedua di dunia, potensi cadangannya mencapai 5,13 tcf dengan potensi omset hingga US 50 Miliar atau setara 1000 Triliun per tahunnya.

Ladang ini ditemukan pertamakali pada 1960 oleh kontraktor migas asal Australia, Woodside. Sejak saat itu, ladang gas ini dihisap Australia, yang hanya berjarak sekitar 450 kilometer dari Kota Darwin atau seperti jarak Jakarta-Semarang.

Australia sempat mengalami jalan buntu ketika Timtim masih di bawah jajahan Portugis. Niatnya untuk menguasai ladang minyak itu terganjal. Peluang untuk mencengkram Timtim datang ketika meletusnya revolusi bunga di Portugal.

Kala itu, pemerintah dalam negeri Portugal sangat buruk. Terjadi kerusuhan dan chaos yang disebabkan oleh kudeta militer terhadap Dr Antonio De Oliveire Salazar. Kudeta ini dinakhodai oleh Jenderal De Spinola.

Akibat revolusi bunga itu, tak hanya mengacaukan kondisi politik dan perekonomian Portugal. Lebih parah dari itu, sebagai negara penjajah yang sudah menerapkan kolonialisme dan mempunyai beberapa negara koloni seperti Timtim, mereka kewalahan menghadapi kudeta militer yang terus menerus menyerang pemerintah. Akhirnya dari revolusi bunga itu lahirlah

kebijakan : membebaskan daerah koloni Portugal untuk menentukan sendiri nasibnya.

Atas sokongan Australia, Indonesia di bawah rezim Soeharto lantas mengambil alih Timtim. Mulai tahun 1974, Timtim merdeka dari dicengkeram Portugal dan akhirnya resmi masuk menjadi bagian Indonesia pada tahun 1975. Kendati Portugal sebetulnya tak pernah mengakui Timtim menjadi bagian dari Indonesia.

Amerika Serikat membantu upaya Timtim masuk ke pangkuan NKRI, dengan menyuplai persenjataan kepada militer Indonesia, sehingga atas bantuan tentara lewat operasi seroja, Timtim berhasil dikuasai penuh. Timtim selanjutnya dikenal sebagai provinsi termuda Indonesia.

Australia mendukung Indonesia masuk ke Timtim, rupanya demi mengamankan potensi gas yang ada di sana.

"Sebagian alasan Australia mendukung penggabungan (Timor Leste) ke Indonesia karena potensi cadangan migas di Laut Timor," ujar Dosen Politik Senior La Trobe University Bec Strating.

Indonesia disebut-sebut tidak akan mantap memasukkan Timtim menjadi provinsinya andaikata Presiden Soeharto saat itu tak diyakini oleh Gough Whitlam, mantan Perdana Menteri Australia.

Australia mendukung penuh integrasi Timtim ke Indonesia, dan mengakui kedaulatan RI di sana pada 1979. Ujungnya, RI-Australia pada 1989 meneken perjanjian Celah Timor atau Timor Gap yang mengatur soal pengelolaan sumber daya alam di laut lepas kedua negara itu.

Kepentingan politik Australia yang paling kentara terhadap Timtim adalah menghindari tidak melebarnya konflik di Timtim pada masa tahun 1970-an itu, sehingga menjadi ancaman bagi wilayah Australia. Negeri Kangguru menghendaki Timtim stabil sehingga hubungan politik RI-Australia tidak terganggu.

Oleh karena itu, pada masa awalnya, Australia seolah-olah memihak Indonesia dengan mengakui batas-batas wilayah di daerah Timtim. Puncak pengakuan itu adalah disepakatinya pembagian Celah Timor berdasarkan ketentuan yang disepakati kedua pihak oleh Menlu Ali Alatas dan Menlu Gareth Evans. Perjanjian ini disebut-sebut menguntungkan Australia.

Secara eksplisit, Australia menjadi negara pertama yang mengakui eksistensi Indonesia atas Timtim. Tapi, sikap Australia itu tidak konsisten. Sejak PM Australia John Howard berkuasa, ia mulai kerap menyatakan bahwa Timtim untuk jangka panjang harus merdeka. Semasanya, Australia mulai mengubah kebijakan atas Timtim, dengan dasar pijakannya bahwa otonomi luas harus diberikan kepada Timtim, sebelum menuju merdeka penuh.

Sikap ini dilandasi oleh kepentingan jangka panjang Australia terhadap Timtim. Kepada rakyat Timtim, Australia seolah-olah ingin membalas kesalahan masa lalu dengan mengakui eksistensi Indonesia di Timtim.

Lewat berbagai operasi, mereka terus mempengaruhi Timtim agar merdeka. Salah satu aktivis yang digerakkan untuk memerdekakan Timtim adalah Xanana Gusmao. Lewat Xanana, Australia bergerilya melakukan pendekatan ke Timtim dan berharap bisa menanamkan pengaruhnya di sana.

Pengaruh Australia di Timtim ini seperti halnya pengaruh Australia di Papua Niugini, yang melebarkan lingkungan pengaruh politiknya.

Nah,

Di tengah krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia, termasuk Indonesia, posisi Australia sangat menguntungkan. Krisis ekonomi tidak menyebar ke Australia sehingga ketika posisi negara Asia lemah, negeri ini berada dalam kondisi sehat, baik militer, politik maupun ekonomi.

Momentum yang ditunggu-tunggu itu datang juga. Pecahnya reformasi, memicu Indonesia berada pada posisi lemah dalam tawar-menawar diplomatik. Seperti yang sudah dijelaskan dalam video sebelumnya, reformasi Indonesia dimulai dari krisis moneter dan adanya keterlibatan AS di dalamnya.

Howard terus menerus mendorong agar Indonesia melepaskan Timtim. Berkali-kali ia mempengaruhi Habibie, yang saat itu baru saja naik ke tahta Presiden menggantikan Soeharto.

Dalam bukunya detik-detik yang menentukan halaman 233, Habibie menuliskan pernah menerima surat dari Howard, yang mengusulkan agar penyelesaian masalah Timtim dilaksanakan seperti penyelesaian bekas koloni Perancis, New Caledonia : Referendum.

Mulanya, Habibie beranggapan saran Howard itu keliru, yang mempersamakan kasus New Caledonia dengan kasus Timtim. Menurut Habibie, Indonesia bukanlah penjajah seperti Perancis. Belakangan, Presiden BJ Habibie terpengaruh juga oleh gagasan Howard yang dilontarkan bulan Desember 1998

itu. Habibie pada bulan Januari 1999 malah menyatakan Timtim akan diberi dua pilihan otonomi luas atau menolak sehingga bisa memilih melepaskan diri dari Indonesia.

Walaupun, saat itu Habibie mengklaim apa yang terjadi di Timtim bukanlah referendum, melainkan jajak pendapat. Bedanya, menurut Habibie begini.

“Jika referendum langsung menentukan sikap tetap bersama atau berpisah. Sedangkan jajak pendapat tidak demikian. Referendum memerlukan izin MPR, sementara jajak pendapat tidak, tetapi MPR dapat menolak hasil jajak pendapat tersebut”

Habibie lantas mengutus Menlu Ali alatas bertemu Sekjen PBB Kofi Anna dan menjelaskan maksud jajak pendapat tersebut. PBB setuju konsep Habibi. Sehingga disepakatilah perjanjian Tripartit tanggal 5 Mei 1999 di New York antara Pemerintah RI, Portugal dan PBB.

Berdirilah Unamet (United Nations Mission in East Timor), yang dibentuk 11 Juni 1999, sebagai tindak lanjut perjanjian Tripartit. Dari sinilah, pintu lepasnya Timtim kian menganga lebar.

Alasan Habibi mengusung konsep jajak pendapat sebetulnya tulus, untuk memberikan segala yang terbaik bagi saudara-saudara di Bumi Loro Sae itu.

“Mereka punya hak dan aspirasinya perlu didengar untuk menentukan nasibnya sendiri” begitu kata Habibi dalam bukunya itu.

Habibi lupa bahwa gejolak sosial yang terus meruncing di Timtim, akibat operasi para milisi bersenjata di sana, membuat

rakyat Timtim semakin kuat ingin melepas diri dari Indonesia. Sudah bisa ditebak hasilnya, jajak pendapat itu akhirnya betul-betul membuat Timtim henggang dari pangkuan ibu pertiwi.

Hasil jajak pendapat tersebut menyatakan sebanyak 78,50 persen rakyat Timtim memilih memisahkan diri dari Indonesia.

Gaung referendum di Timtim kian nyaring saja. Tiga tokoh utama yang paling lantang bersuara: Xanana Gusmao, Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo dan Jose Ramos Horta.

Xanana Gusmao misalnya, tercatat dalam sejarah adalah mantan gerilyawan kemerdekaan Timtim yang di kemudian hari menjabat Presiden Timor Leste pertama begitu daerah ini merdeka dari NKRI.

Lebih dari dua dekade Xanana Gusmao bergerilya demi merdekanya Timtim. Sejak wilayah bekas jajahan Portugis itu digabungkan dengan NKRI pada 1975, Xanana terus berjuang membebaskan tanah kelahirannya meskipun harus berulang kali berhadapan dengan pasukan Indonesia.

Tahun 1992, Xanana Gusmao ditangkap aparat Indonesia dan dijebloskan ke penjara Cipinang. Mantan panglima Falintil atau Angkatan Bersenjata untuk Pembebasan Nasional Timtim ini baru dibebaskan pada 1999 semasa Presiden Habibie, atau setelah rezim Orde Baru tumbang.

Sejak itu, gerakan Xanana di Timtim kian lantang dan gelombang dukungannya kian membesar.

Nah, Menjelang proses jajak pendapat, Habibi menerapkan daurat sipil di sana. Tujuannya untuk menekan gejolak sosial. Tapi, aksis teror dan kerusuhan malah kian membesar di

Timtim. Tiga minggu sebelum referendum, kelompok paramiliter-sipil bersenjata-- meningkatkan teror terhadap penduduk. Konon, salah satu targetnya demi mencegah mereka memilih opsi merdeka. Dampaknya: rumah-rumah dibumihanguskan; 2.600 orang tewas; hampir 30 ribu terlantar; dan setidaknya 250 ribu dikeluarkan paksa dari tempat tinggalnya menjadi pengungsi.

Amerika Serikat menuding ABRI dibalik para milisi dan aksi teror itu. Paman Sam menuduh Panglima ABRI, Wiranto sebagai dalang utama kerusuhan di sana. Imbasnya, Serious Crimes Unit PBB bahkan sempat mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Wiranto pada 10 Mei 2004. Tapi, otoritas Indonesia, yang saat itu dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri, menolak bekerja sama dengan pengadilan Timor Timur selaku eksekutor.

Langkah Wiranto sebagai panglima ABRI, yang ingin mempertahankan Timtim dari wilayah NKRI, dengan menggerakkan tentara dan milisi, mungkin tidak sepenuhnya salah. Tapi, boleh jadi ia tak sadar telah digiring masuk ke skenario asing dengan melakukan tindakan teror dan meletupkan kerusuhan, yang belakangan aksi itu malah membuat citra ABRI tercoreng. Yang kian membuat warga Timtim menjadi benci dengan Indonesia dan akhirnya mayoritas suara di sana memilih merdeka.

Akibat tuduhan buruk itu, membuat ABRI kian tersudut. Kekerasan terus berlanjut, bahkan ketika jajak pendapat sudah selesai digelar. Dili bumi hangus, paramiliter berkeliaran meneror sana-sini. AS kian lantang menunjuk hidung ABRI

sebagai dalang di belakangnya. Kesempatan itu digunakan AS untuk terus menekan ABRI, agar secepatnya keluar dari Timtim. Di satu siang yang terik, 9 September 1999, Dennis C Blair, Direktur Intelijen Nasional AS datang menemui Wiranto di Jakarta. Ia mendesak sang Panglima ABRI untuk menarik pasukannya dan menerima pasukan multinasional PBB di Timtim.

"Saya mengimbau Anda membiarkan komunitas internasional membantu Indonesia," kata Blair.

Walaupun Wiranto memastikan aksi teror itu bukan dilakukan oleh ABRI. Menurut Wiranto, situasi di Timtim sangat dibesar-besarkan oleh media. Wiranto juga menyangkal bahwa ABRI mendukung milisi setempat.

Dunia tak lantas percaya. Posisinya kian tersudut. Citranya kian tercoreng. Wiranto kalah. ABRI akhirnya ditarik mundur dari Timtim. INTERFET, Pasukan Internasional untuk Timor Timur, yang dibentuk PBB, yang konon katanya untuk mengakhiri krisis kemanusiaan di sana, mulai berdatangan pada akhir September 1999 itu. Seiring ABRI perlahan keluar dari daerah yang bukan lagi wilayah kekuasaannya itu, dengan kepala tertunduk.

Anda sekali lagi akan terkaget-kaget jika tahu siapa pemimpin INTERFET itu. Siapa lagi kalau bukan Australia. Pasukan penjaga perdamaian internasional itu rupanya dikomandoi oleh Australia. Negara Kangguru itu memimpin pasukan penjaga perdamaian berjumlah 11.000 orang dari 22 negara. Perdana Menteri Australia John Howard menyebut intervensi itu sebagai "kemenangan kebijakan luar negeri yang

signifikan” dan mengatakan tidak akan mengubah apa pun tentang itu.

Kepentingan politik maupun ekonomi menjadi dasar bagi langkah Australia terhadap Timtim. Australia menjadikan isu Timtim menjadi perhatian publik Australia. Dari reaksi rakyat terhadap gejolak di Timtim itu, membuat pemerintah Australia mendapat legitimasi dan pembenaran atas kebijakan luar negerinya yang mendorong tentaranya masuk Timtim.

Sedangkan kepentingan Australia yang berdimensi ekonomi didorong oleh kebutuhan menemukan sumber energi baru. Celah Timor yang sudah dieksplorasi dan diperkirakan mengandung cadangan minyak yang kaya menjadi andalan Australia di masa datang. Oleh karena itu, Australia berusaha menyelamatkan kekayaan alam itu dengan memberikan jasa keamanan di Timtim di bawah payung PBB.

Kepentingan Australia terhadap Indonesia adalah melakukan unjuk kekuatan politik atas Timtim. Dengan intervensi militer ke Timtim, Australia mengirim pesan kepada Jakarta tentang kemampuan diplomatiknya yang berskala global. Dengan pendekatan kepada Amerika Serikat dan Eropa, Australia dapat menggolkan rencananya untuk memaksa masuk ke Timtim di bawah payung PBB itu. PBB mengumumkan hasilnya: 78,5 persen menolak otonomi, 21 persen menerima otonomi, sisanya tidak sah. Dengan demikian, Timor Timur dipastikan lepas dari NKRI. 26 Oktober 1999 Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang menggantikan Habibie, menandatangani surat keputusan pembentukan UNTAET atau pemerintahan transisi di Timor Timur. 30 Oktober 1999 Bendera

Merah Putih diturunkan dari Timor Timur dalam upacara yang sangat sederhana. Media dilarang meliput acara ini, kecuali RTP Portugal. 20 Mei 2002 Timor Timur resmi menjadi negara merdeka bernama Timor Leste.

Tidak lama setelah kemerdekaan, Timor Leste dan Australia menyepakati perjanjian bagi hasil dari eksploitasi sumber minyak dan gas di kawasan Greater Sunrise itu. Timor Leste sebetulnya mengharapkan bisa mengeksploitasikan minyak bumi di Celah Timor (Timor Gap).

Namun sepertinya hal ini sulit dilakukan. Australia telah mengatur pengelolaan minyak di Celah Timor, dimana Australia mendapatkan hasil eksploitasinya sebesar 80% dan sisanya diberikan ke Timor Leste. Wow....Australia juga telah menghalang-halangi Timor Leste untuk dapat menguasai Celah Timor secara penuh, dengan cara mengulur-ulur penyelesaian perbatasan kedua negara.

Seperti yang sudah dijelaskan tadi, dukungan Australia dari dulu memang mempunyai kepentingan politik terselubung, untuk menjadikan Timor Leste sebagai buffer zone atau area, sekaligus kepentingan ekonomi atas minyak dan gas di celah Timor itu.

Pemerintah Timor Leste lantas menuduh eksplorasi minyak secara sepihak oleh Australia adalah pemaksaan kehendak sebuah negara kuat terhadap negara lemah. Australia menyangkal tuduhan Timor Leste bahwa negara itu secara ilegal mendapatkan royalti dari eksplorasi minyak dan gas sebesar satu juta dollar Australia per hari.

Australia yang diharapkan akan membantu ternyata menjadi penjajah baru bagi Timor Leste. Dua bulan setelah pasukan PBB yang dipimpin Australia masuk ke Timor Leste, Australia mengeksploitasi minyak Timor Timur di Celah Timor. Tahun 2003, Australia memperoleh 172 juta dolar AS, atau dua kali jumlah APBN Timor Leste. Ironisnya, Timor Leste tidak mendapat bagian meskipun sumur minyak itu berada di wilayah negerinya.

Jelas bahwa Australia mempunyai keinginan menguasai sumber minyak di celah Timor. Akses terhadap energi ini tak bisa disangkal menjadi pendorong semangat Australia campur tangan dalam menangani gejolak di Timtim pasca jajak pendapat. Minyak yang dilukiskan sangat besar kandungannya di perbatasan Timtim-Australia itu merupakan aset penting bagi perkembangan ekonomi masa depan negeri Kangguru.

Ketika Indonesia menguasai Timtim di tahun 1975, sebenarnya Australia berada di belakangnya. Australia berfikir, akan lebih mudah melakukan negosiasi eksplorasi minyak di celah timor dengan Indonesia ketimbang dengan Timtim yang baru saja ditinggalkan Portugal.

Australia mau membantu Timtim bukan untuk membalas jasa rakyat Timtim yang pernah membantu mencegah invasi ke Australia saat Perang Dunia II, melainkan punya kepentingan bisnis yang dikemas dengan wadah humanis.

“Kalau Australia memang pejuang hak-hak asasi manusia dan humanis tulen, hal pertama yang dilakukan sebelum terjun ke Timtim adalah meminta maaf dan memberi referendum kepada

suku Aborigin yang nasibnya mirip dengan suku Indian di Amerika Serikat”

Potensi migas di Timtim memang sangat menggiurkan. Kandungan gas dan hidrokarbon tidak bisa diabaikan. Sebagai contoh, di ladang Bayu-Undan, ditaksir punya cadangan minyak 400 juta barel, tiga trilyun kubik gas alam dan 370 juta barel cairan (kondensat dan LPG). Menurut Oil dan Gas Journal edisi 1999, cadangan hidrokarbon ini dinilai paling kaya di luar Timur Tengah dan merupakan ladang minyak terbesar Australia di luar selat Bass.

Dalam kunjungannya ke Kupang pada tahun 2002, Xanana Gusmao (presiden pertama Timor Leste dan sekarang menjabat sebagai Perdana Menteri) bertemu seorang tokoh agama berpengaruh di Timor Barat. Dalam pertemuan itu, Xanana mengatakan, “Saya baru sadar, bila kemerdekaan yang diharapkan seperti dialami sekarang, seharusnya saya menyarankan rakyat Timtim memilih otonomi.”

Kisah Timor Leste hanyalah salah satu kisah campur tangan suatu negara terhadap negara lain. Dan motivasi terbesarnya tentu saja ekonomi. Tidak ada satu negarapun di dunia ini yang mau menghambur-hamburkan uangnya baik dalam bentuk bantuan pembangunan ataupun invasi militer jika tidak ada jaminan *economic return* yang memadai.

Timtim Henggang Habibie Terhadang

Banyak pihak menyebut bahwa lepasnya Timor-Timur memang karena Habibie yang saat itu menyetujui adanya jejak pendapat atau referendum. Hal ini pula yang mendorong pihak

oposisi yang tidak puas dengan latar belakang Habibie semakin giat menjatuhkannya. Upaya ini akhirnya berhasil dilakukan pada Sidang Umum 1999, Habibie memutuskan tidak mencalonkan diri lagi setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR.

Padahal, di masa Habibie itu, keran-keran Demokrasi ternganga lebar. Di sektor kebebasan berserikat misalnya, Presiden Habibie melepaskan dan membebaskan sejumlah tahanan politik era Orde baru. Ia juga yang mendorong kebebasan pers dan menjanjikan penyelenggaraan pemilihan umum yang transparan, adil dan demokratis.

Pada masa awal reformasi inilah angin demokrasi bertiup makin kencang. Demonstrasi dan pengerahan massa jadi pemandangan yang lumrah terjadi pada masa itu. Dikarenakan, Presiden Habibie yang tetap berpegang pada Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Bagi Aksi Demo.

Pemerintahan BJ Habibie memang terbilang singkat, dalam sidang umum MPR 1999, laporan pertanggungjawaban akan lepasnya Timor Timur dari Indonesia ditolak parlemen. Pada hari yang sama, ia menyatakan mundur dari pencalonannya sebagai presiden, menyusul penolakan laporan pertanggungjawaban itu.

Tetapnya BJ Habibie menjabat sebagai presiden selama 1 tahun 5 bulan, sebelum akhirnya digantikan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 20 Oktober 1999. Berdasarkan pemilu yang terlaksana secara transparan, adil dan demokratis.

Saat itu juga, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibentuk dan ditugaskan menjadi penyelenggara pemilu yang bertugas mulai

dari menetapkan parpol hingga mengawal penetapan kemenangan pemilu.

Nah..kembali ke soal keterlibatan Amerika Serikat di balik lepasnya Timtim itu.

Dalam sepek terjangannya, Amerika bukanlah kawan yang setia dalam perjuangan hingga akhir. Hal itu tergantung bagaimana kepentingannya terlindungi. Jika sebuah rezim dapat mengamankan kepentingan-kepentingannya, maka Amerika akan tetap berada dibelakang rezim tersebut.

Sebaliknya akan terjadi jika sebuah rezim berposisi menentang kepentingan Amerika. Kasus Timor-Timur contohnya. Kerja sama militer Amerika dan Indonesia cukup kuat, namun secara kalkulasi geopolitik, lepasnya Timor Timor dari Indonesia akan cukup menguntungkan Amerika dan sekutunya terutama Australia. Sehingga wajar, saat itu Amerika memutuskan untuk mendukung Timor-Timor sebagai negara merdeka atau mencampakan Indonesia.

Mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo pernah mengatakan, lepasnya Timor Timor dari Indonesia pada 1999, merupakan contoh nyata proxy war. Menurut dia, pemerintah Australia kala itu membantu Timor Timur untuk lepas dari Indonesia karena ingin menguasai cadangan minyak yang melimpah di daerah tersebut.

Fakta tersebut, kata dia, diperkuat dengan pengakuan mantan perdana menteri Timor Leste Xanana Gusmao. "Xanana Gusmao waktu itu mengonfirmasi langsung bahwa hal ini benar. Bahwa Australia berada di balik lepasnya Timor Timur," kata Gatot dalam siaran persnya. Yang menarik dari jajak pendapat di

Timtim kala itu, bahwa tingkat partisipasi rakyat Timtim dalam referendum sangat tinggi mencapai 98,6 persen dari seluruh pemilih yang terdaftar sebanyak 451.792 orang. Ini agak sedikit janggal mengingat partisipasi politik jarang menyentuh angka 100 persen. Apalagi, aksis teror dan kerusuhan di sana kian merebak menjelang referendum. Agak tak masuk akal ketika partisipasi pemilih hampir mencapai 100 persen.

Dari proses panjang dan melelahkan itu, Timtim resmi lepas dari kekuasaan Indonesia dan berada di bawah otoritas PBB untuk sementara hingga deklarasi resmi pada 20 Mei 2002 sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, dengan Xanana Gusmao sebagai presiden pertamanya. Tanggal 30 Oktober 1999, bendera merah putih diturunkan dalam upacara sederhana dan tanpa liputan pers.

Nama BJ. Habibie sebagai Presiden ketiga RI yang berjasa akan pembebasan Timtim dari Indonesia diabadikan dalam pembangunan jembatan sepanjang 540 meter di dekat Dili.

Keputusan Habibie untuk memberikan jalan bagi referendum Timtim harus dibayar mahal dengan tidak dapat mencalonkan diri kembali menjadi Presiden karena pidato pertanggung jawabannya ditolak oleh MPR. Walaupun dampak peristiwa lepasnya Timor Timur menjadi ganjalan bagi Habibie, kondisi rakyat Timtim pasca referendum sangat baik. Begitu juga hubungan dengan Indonesia dalam bidang politik, pendidikan, ekonomi dan angka kunjungan penduduk antara kedua negara.

Terakhir.....

Akses terhadap energi ini tak bisa disangkal menjadi pendorong semangat Australia campur tangan dalam menangani

gejolak di Timtim pasca jajak pendapat. Minyak yang dilukiskan sangat besar kandungannya di perbatasan Timtim-Australia itu, merupakan aset penting bagi perkembangan ekonomi masa depan negeri Kangguru. Satu hal lagi, gejolak sosial atau perang saudara akan meletup deras ketika orang ketiga terlibat aktif dalam seteru itu.

BAB IV

ALIRAN POLITIK DAN KONFLIK POLITIK DI INDONESIA

Aliran Islam Akibat Reduksi Konflik Politik

Sepanjang sejarah jazirah arab, kekuasaan politik terletak dalam tangan kaum pedagang tinggi. Kaum pedagang tinggi ini, untuk menjaga kepentingan mereka, mempunyai perasaan solidaritas yang sangat kuat. Di Mekkah, Nabi Muhammad hanya mempunyai fungsi kepala agama. Sementara di Madinah, Nabi di samping menjadi kepala agama juga menjadi kepala pemerintahan.

Dialah yang kali pertama mendirikan kekuasaan politik yang dipatuhi di Kota Madinah. Sebelumnya, tak ada kekuasaan politik di Madinah. Nabi Muhammad bukanlah termasuk golongan kaya, keadaan ekonominya sederhana sekali, sehingga di masa kecil ia terpaksa bekerja sebagai pengembala domba. Karena itu, Nabi adalah orang pertama dari kelompok ekonomi rendah yang berhasil menduduki kekuasaan politik tertinggi.

Ketika wafat, kekuasaan politik nabi sudah meluas, meliputi seluruh semenanjung arabia. Tak mengherankan pula, pasca wafat, masyarakat Madinah lebih sibuk memikirkan pengganti nabi untuk mengepalai negara yang baru lahir itu. Sehingga masalah penguburan dianggap soal kedua. Sejarah meriwayatkan Abu Bakar disetujui masyarakat Islam untuk mengepalai negara. Kemudian Abu Bakar digantikan Umar, Usman dan Ali.

Gejolak internal masyarakat Islam mulai membubung sewaktu Usman naik tahta. Usman termasuk dalam golongan pedagang kaya. Kaum keluarganya terdiri dari aristokrat Mekkah, yang mempunyai pengetahuan tentang administrasi. Ahli sejarah menggambarkan Usman sebagai orang yang lemah dan tak sanggup menentang ambisi kaum keluarganya yang kaya raya dan berpengaruh itu.

Mengutip istilah oligark-nya Prof Jeffrey Winters, Usman boleh jadi tak sanggup melawan kuasa para oligark, kelompok kaya yang turut mempengaruhi kekuasaan, yang bertujuan untuk mempertahankan kekayaan mereka. Usman lalu mengangkat mereka menjadi gubernur di daerah yang tunduk kepada kekuasaan Islam. Gubernur-gubernur yang diangkat oleh Umar Ibnu Khatab, dijatuhkan oleh Usman.

Tindakan politik yang dijalankan Usman ini menimbulkan reaksi. Sahabat nabi yang mulanya menyokong Usman, mulai meninggalkannya. Perlawanan mulai timbul. Dari Mesir, lima ratus pemberontak berkumpul dan kemudian bergerak ke Madinah. Perkembangan suasana di Madinah selanjutnya membawa pada pembunuhan Usman oleh para pemberontak itu.

Selepas Usman wafat, Ali sebagai calon terkuat naik tahta. Tapi, segera ia mendapat perlawanan dari pemuka yang ingin pula menjadi khalifah. Ada kelompok Talhah dan Zubeir dari Mekkah, yang mendapat sokongan Aisyah. Tantangan kedua datang dari Muawiyah, yang kala itu menjabat Gubernur Damaskus, dan dikenal sebagai kerabat dekat Usman bin Affan.

Sebagaimana Talhah dan Zubeir, Muawiyah tak mau mengakui Ali sebagai Khalifah. Ali dicap tak tegas menjatuhkan sanksi bagi pemberontak yang telah membuat khalifah Usman terbunuh. Dalam pekembangannya, kelompok Muawiyah sempat melakukan perundingan bersama Ali. Perundingan yang merugikan Ali itu membuat ia kehilangan legitimasi sebagai khalifah.

Ada pula kelompok lain yang menentang sikap Ali, yang dianggap lunak dan mau berdiplomasi dengan kelompok Muawiyah. Golongan ini kemudian dikenal dengan sebutan Al Khawarij. Karena memandang Ali bersalah dan berbuat dosa, mereka melawan Ali. Ali sekarang menghadapi dua musuh, yaitu Muawiyah dan Khawarij.

Persoalan yang terjadi dalam lapangan politik inilah yang akhirnya membawa kepada timbulnya persoalan teologi atau aliran dalam islam. Soal istilah kafir misalnya, yang mulanya didefinisikan sempit oleh kaum al Khawarij, sebagai reaksi atas ketidaksukaan terhadap Ali yang bernegosiasi dengan Muawiyah.

Al Khawarij kemudian menuding Ali dan Muawiyah telah berbuat dosa, dan dalam pemahaman mereka orang yang berdosa besar adalah kafir, dalam arti keluar dari islam atau tegasnya murtad dan oleh karena itu wajib dibunuh. Lambat laun kaum Khawarij terpecah menjadi beberapa aliran lagi.

Sehingga, sebagai respon dari konflik politik yang terjadi kala itu, muncullah sejumlah kelompok yang mengusung aliran masing-masing, yang mendefenisikan islam sesuai dengan kondisi saat itu. Selain Khawarij, konflik politik itu juga

memunculkan kelompok Murjiah, Mu'tazilah, Asyairah, Maturidiah. Mereka mengusung konsep Islam dengan pemahaman masing-masing.

Lalu, loyalis Ali, kemudian menamakan diri kelompok Syiah, dalam perkembangannya juga memunculkan semacam teologi sendiri. Kelompok aliran ini kemudian terus membesar seiring dengan petinggi mereka berhasil menduduki posisi puncak di pemerintahan.

Sebagai jalan tengah, untuk merespon konflik politik yang telah melahirkan aliran-aliran yang saling bertentangan dan menegasikan itu, muncullah sekelompok ulama yang mengusung konsep Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang cenderung lunak, toleran, tidak mudah mengkafirkan, menghargai tradisi seperti yang diajarkan Nabi, bahwa Islam adalah agama rahmatanlillalamin.

Partai Masyumi

Kelompok Islam Indonesia pernah punya sejarah bernaung dalam satu partai politik. Namanya Partai Masyumi. Akronim dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Embrio Masyumi berasal dari Majelis Islam A'la Indonesia alias MIAI, yang didirikan pada 1937. Organisasi ini diinisiasi oleh tokoh NU KH Wahab Hasbullah dan KH Muhammad Dahlan bersama-sama tokoh Muhammadiyah KH Mas Mansur dan tokoh PSII Wondoamiseno.

Misi utama MIAI adalah menggalang kekuatan umat Islam untuk melawan Belanda. Dengan persatuan Islam, mereka percaya... ikhtiar mengusir penjajah tentu akan lebih gampang.

Belum beres berurusan dengan Belanda, penjajah baru datang. Kini, republik punya dua musuh sekaligus, Belanda dan Jepang. Jepang sadar, kekuatan mereka tak cukup mampu mengusir tentara Belanda, yang gagah perkasa itu. Selain kalah dalam jumlah tentara, peralatan tempur Jepang tak secanggih Belanda.

Tapi, negara yang identik dengan penyembah matahari terbit itu tak kehabisan akal. Menerapkan taktik perang ala Samurai, Jepang berusaha memanfaatkan kekuatan pribumi untuk memerangi Belanda.

MIAI dipandang organ pribumi terkuat karena mengkoordinir seluruh kelompok Islam, yang punya jejaring luas hingga ke pelosok desa. Bak menemukan harta karun, Jepang menganggap MIAI sebagai senjata dahsyat untuk melumat kepongahan Belanda. Atas Peran Jepang, MIAI diubah menjadi Masyumi.

Selain NU dan Muhammadiyah, Masyumi diisi sejumlah ormas seperti Persatuan Islam, Al Irsyad dan organisasi Islam lainnya. Pendiri NU, Hadratussyekh KH Hasyim Asyari terpilih sebagai pimpinan tertinggi pertama Masyumi di tahun 1943. Nah, pasca proklamasi, Masyumi bermetamorfosa menjadi partai politik, lewat Mukttmar Jogja. Selain sebagai partai, Masyumi sekaligus menjadi wadah pemersatu di tengah gesekan sektarian antara kelompok tradisionalis dengan kelompok yang ingin memurnikan Islam.

KH Hasyim Asyari wafat tahun 1947. Dua tahun berselang gesekan di internal Masyumi mulai membumbung. Masyumi

seakan kehilangan tokoh pemersatu. Pertikaian antar kelompok Islam tradisional dan modern kian meruncing.

Benih-benih keretakan meledak kala Muhammad Natsir, tokoh Minang yang pro Islam modernis itu, terpilih menjadi pimpinan Masyumi, pada tahun 1949. Manuver politik Natsir membuat kelompok Minang dan kaum modernis Islam kian mendominasi elit Masyumi. Dan sebaliknya, disokong kelompok Non Jawa, Natsir sukses meminggirkan tokoh NU dari posisi-posisi strategis Masyumi. Suasana politik kian keruh. Konflik pecah.

NU tersingkir dari lingkaran kekuasaan Soekarno seiring naiknya Natsir sebagai Perdana Menteri. Wahid Hasyim, putra Haddratussyekh tak lagi mendapat posisi sebagai Menteri Agama. KH Wahab Hasbullah meradang. Ia merasa Masyumi sudah tak bisa lagi diandalkan sebagai alat perjuangan politik kaum Islam tradisional. NU merasa penting menjaga keselamatan kaum Islam tradisional yang mulai terancam, kerap dicibir dan di pandang negatif oleh kelompok modernis--yang sudah sangat kuat berada di lingkaran kekuasaan--.

Lalu...terbentuklah Partai Politik NU pada tahun 1953. Pemilu 1955 pun digeber. Partai NU berada di urutan ketiga setelah Partai Masyumi. Sementara di urutan keempat ada PKI yang diketuai DN Aidit.

Selanjutnya...roda pun berputar.

Konstalasi politik mengubah peta pertarungan. Natsir yang awalnya sohib akrab Soekarno, kini menjadi lawan. Malah sebaliknya, NU yang dulunya tersingkir dari lingkaran kekuasaan Soekarno, kini beralih menjadi teman seiring. Puncak

konflik terjadi pada 1958. Ketika Masyumi mulai kehilangan peran di lingkaran kekuasaan Soekarno. Natsir kemudian mulai berani dan bahkan secara terbuka mengkritik gagasan politik Nasakom-nya Soekarno.

Natsir lalu mengecam Dekrit Presiden 1959 dan kebijakan pembubaran DPR. Enggan terseret dalam pusara konflik, Muhammadiyah memilih melepaskan diri dari keanggotaan di partai Masyumi. Di tinggal Muhammadiyah, Masyumi berada di ujung tanduk. Kehilangan kekuasaan politik, Natsir memilih pulang kampung ke Bukit Tinggi. Di sana, bersama-sama kelompok minang dan PSI, ia membangun aliansi dan perlawanan terhadap kebijakan Soekarno, yang kekuasaannya mulai disetir PKI.

PRRI lahir.

Gerakan ini diinisiasi kelompok PSI dan Masyumi. Dianggap mengganggu kekuasaan Soekarno, PRRI lantas dicap sebagai pemberontak.

Mereka ditumpas. Kapten Untung, yang kelak menjadi komandan Cakrabirawa, ikut dalam operasi penumpasan PRRI di Bukit Tinggi. Natsir dan kelompok PSI ditangkap dan dibui. Masyumi dibubarkan.

Marhaenisme

Tokohnya adalah Soekarno. Dia Presiden RI pertama. Lahir 6 Juni 1901. Ada beberapa versi menyebut tahun kelahirannya 1902.

Ayahnya asli Jawa. Agamanya Islam. Namanya Sukemi Sastro Diharjo. Ibunya asal Bali. Beragama Hindu.

Nama asli Soekarno adalah Kusno Sastro Diharjo. Sampai umur 11 tahun, si Kusno kerap sakit-sakitan. Ada anggapan di kalangan orang Jawa, bahwa anak yang sering sakit boleh jadi karena tak kuat memikul beban namanya.

Kusno lalu berganti nama menjadi Soekarno. Tapi, Soekarno sebetulnya lebih senang menulis nama depannya dengan sebutan SU, bukan dengan ejaan SOE. Mendapat gelar Ahmad sewaktu naik haji. Sedari remaja Soekarno sudah ikut Cokroaminoto di Surabaya. Dari rumah Cokro, Soekarno kenal Agus Salim, Semaun, Kartowusiryo dan tokoh penting cikal bakal kemerdekaan RI. Gurunya tokoh bangsa zaman itu adalah Cokroaminoto.

Dari kediaman Cokro di Surabaya, Soekarno melanjutkan kuliah ke ITB. Ia kemudian Ngekos di Bandung. Dari sini Soekarno mulai aktif bergerak di organisasi politik. Lalu merintis organisasi yang melahirkan Partai Nasional Indonesia. Gara-gara ini pula Soekarno kerap di penjara. Masa mudanya memang keluar masuk penjara. Ia pernah dibuang ke Flores. Lalu dipindah ke Bengkulu.

Soekarno dikenal luar biasa tidak hanya di dunia politik. Secara pribadi, ia punya fisik tampan. Lidahnya fasih berpidato. Menguasai beberapa bahasa dunia. Seorang orator ulung. Gaya orasinya terinspirasi dari guru sekaligus mertuanya, Cokroaminoto.

Menikah sampai 9 kali. Anaknya 10. Ketika menjadi Presiden RI, Soekarno pernah akan dijebak CIA dengan video porno. Konon, CIA memproduksi video porno dengan aktor yang mirip dengan sosok Soekarno. Lalu aktor wanitanya dicari mirip

seorang artis terkenal di AS masa itu. Rencananya.. film itu akan disebar untuk menjatuhkan Soekarno.

Tapi, lewat berbagai pertimbangan, CIA membatalkan operasi itu. Diantara alasan pembatalan operasi klandestin itu karena Soekarno orang Jawa. Dia dianggap seorang raja. Di kerajaan Jawa, raja yang memiliki banyak selir atau istri justru akan semakin disegani.

Raja yang tak punya selir malah akan dicemooh. Soekarno justru dianggap seorang raja sejati.

Di masa muda, Soekarno adalah seorang pemikir. Di masa tua dia dikenal sebagai politikus. Dia rajin membaca dan menulis. Dan sangat mengidolakan konsep pemikiran Karl Mark, yang melahirkan Marxisme itu.

Terinspirasi dari Mark, Soekarno akhirnya melahirkan konsep Marhaenisme. Jadi, basis teori yang menarik Soekarno dalam melahirkan teori Marhaenisme adalah Marxisme.

Lalu apa itu Marhaenisme?

Apa bedanya dari Marxisme?

Marhaen itu aslinya nama orang. Di suatu pagi yang cerah, Soekarno jalan-jalan mengendarai sepeda ontel. Melewati sebuah pematang sawah, ia melihat seorang petani yang sedang berjibaku di lumpur. Ia mencangkul sawahnya dengan berpeluh-peluh keringat. Dari wajahnya kelihatan si petani itu hidupnya susah. Setelah memarkirkan sepeda ontelnya, Soekarno lalu menyapa si petani.

“Ini sawah siapa pak?”

“Sawahku sendiri ndoro. Aku garap sendiri.”

“Tapi...lihat lah ndoro...walau ini sawahku sendiri, hidupku tetap sumpek,”.

“Namamu siapa?”Tanya Soekarno sambil menghela nafas panjang.

“Marhaen..”jawab si petani.

Dari situ muncul inspirasi untuk melahirkan konsep Marhaenisme.

Ada yang bilang cerita ini nyata. Ada yang bilang fiktif. Peneliti barat menganggap cerita itu fiktif. Menurut mereka, Marhaen itu akronim dari Mark dan Fredeariech Engels (Marhaen). Singkatnya, Marhaenisme adalah ajaran Marxisme versinya Soekarno.

Seorang Marhaen beda dengan proletarnya versi Karl Mark. Dimana Mark menganggap kaum proletar adalah buruh atau pekerja yang menjual jasa lalu dibayar oleh majikannya. Sementara si majikan semakin kaya dia semakin miskin.

Anggapan Soekarno, proletar tak sesuai dengan konteks Indonesia. Di sini, banyak pedagang, rakyat jelata yang menguasai alat produksi. Tapi... struktur sosial yang membikin mereka miskin. Alat produksi yang dimiliki tidak produktif untuk menjamin kehidupannya. Di sinilah letak perbedaan konsep Marhaen dan Marxis.

Soekarno lalu merumuskan konsepnya lebih jauh lagi. Kata dia, harusnya ada konsep yang tak semata-mata sosialis marxis. Tapi bisa mengakomodasi konteks ke Indonesiaan. Tujuan akhirnya, dalam pandangan Soekarno, akan lahir sosialisme Indonesia. Rakyat Indonesia yang sejahtera. Cara merealisasikan kesejahteraan itu tentu saja lewat konsep Marhaenisme.

Sosialisme

Dalam satu perdebatan sengit bersama tokoh komunis Semaun, Buya Agus Salim sempat menyebut Nabi Muhammad sejak awal sudah berfatwa dan berperilaku layaknya seorang sosialis. Sampai menjelang wafat, ia masih menyebut kata-kata umat. Keberpihakannya sangat tinggi pada kepentingan rakyat.

Sejarah juga mencatat...Mayoritas perintis bangsa kita adalah tokoh-tokoh yang beraliran sosialis. Cokroaminoto bersama tiga muridnya, Soekarno, Kartosuwiryo dan Semaun adalah orang-orang yang beraliran sosialis.

Lalu...Apa sebetulnya sosialis itu?

Akar kata sosialis adalah sosial. Artinya komunitas atau masyarakat.

Orang yang cara berfikir dan fokusnya pada kepentingan bersama disebut SOSIALIS. Sosialis merujuk pada sebuah kepedulian terhadap kepentingan orang banyak. Pertimbangannya selalu pada kepentingan bersama.

Ketika sikap mendahulukan kepentingan orang banyak tadi dijadikan garis hidup, maka dia telah menjadi ideologi yang namanya SOSIALISME.

Jadi, sosialisme adalah semacam ideologi yang membakukan hidupnya hanya untuk kepentingan publik atau masyarakat.

Kapan sosialisme lahir?

Sebagai ideologi formal, sosialisme lahir pada awal abad ke 20. Terjadi seiring dengan meletusnya revolusi industri di eropa.

Berawal dari jatuhnya monarki yang kemudian melahirkan feodalisme. Runtuhnya kerajaan membuat para bangsawan menjadi penguasa kecil di daerahnya masing-masing. Inilah cikal bakal lahirnya kelompok borjuis. Orang-orang kaya yang menjadi raja-raja kecil di daerahnya.

Mereka menjadi tuan tanah. Kalau di India lazim disebut tuan takur. Kalau di Jawa disebut Baron. Nah, lahirnya kelompok feodalisme itu diiringi dengan kemunculan kelompok pekerja. Bukankah tuan tanah butuh orang untuk menggarap tanahnya?.

Kondisi ini lantas melahirkan kelas baru yang namanya kelas pekerja. Kelas pekerja selalu hidup dalam kesusahan. Kemiskinan. Mereka banting tulang menggarap sawah atau bekerja di pabrik-pabrik, tapi tidak menikmati hasil. Hidupnya terus nelangsa. Inilah yang kemudian dipotret oleh Karl Mark.

Mark melihat adanya ketimpangan antara mereka yang menghasilkan karya, tapi justru yang menikmati adalah kelompok feodal. Mereka semakin kaya sementara hidup kelas pekerja semakin sumpek. Yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Alasan inilah yang melatari lahirnya paham sosialisme.

Muncul sebuah konsep bagaimana untuk menciptakan kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok atau individu. Bagaimana memunculkan gagasan untuk menciptakan sistem kerjasama, istilah Indonesianya gotong royong. Bagaimana berkarya yang hasilnya bisa dinikmati secara bersama-sama pula.

Diantara beragam keprihatinan sosialisme itu, antarlain lahirnya kelas-kelas dalam masyarakat. Ada kelas borjuis dan proletar. Terjadi hierarki antara manusia dan terjadinya sekat-sekat. Itu buah dari sistem ekonomi yang takimbang.

Sehingga...Muncul pemikiran jika hal ini dibiarkan terus menerus akan jadi sumber masalah. Maka kelas sosial harus segera dihapus. Bukankah setiap orang itu dilahirkan setara?.

Demi kesetaraan, muncul pula ide untuk mengatur bahwa kekayaan tak boleh dinikmati segelintir orang. Harus dinikmati bersama-sama. Jika ada kilang minyak misalnya, maka harus dikuasai negara dan dinikmati bersama-sama.

Distribusi harus rata. Tak boleh timpang. Sumber dayanya diambil dan harus dinikmati secara bersama-sama.

Pada tataran operasional, sosialisme itu kemudian terbelah ke dalam tiga bentuk. Bentuk pertama adalah sosialisme Utopis (mimpi). Istilah ini datang pertama kali juga dari Karl Mark.

Apa maksudnya?

Begini..

Menurut Karl Mark, ide kesetaraan, dimana tidak adanya kemiskinan, semua rakyatnya saling bantu, tidak egois, tidak ada kejahatan, tidak ada penyakit hanyalah sebuah hayalan atau mimpi.

Bagaimana menerjemahkan sosialisme dalam bentuk realitas?

Bagaimana strategi untuk mempengaruhi rakyat agar menjalani hidup yang bersosialisme itu?.

Maka...untuk mewujudkan sosialisme itu, supaya tidak hanya sebatas mimpi, harus dilakukan lewat perjuangan REVOLUSIONER.

Mark berfikir, struktur sosial yang takimbang itu karena terjadinya dominasi kelompok kapitalisme. Mereka makin kuat dan langgeng di puncak kekuasaan, apalagi karena dijaga oleh militer.

Menurut Mark, sejak dulu militer selalu bersekongkol dan menjadi pembeckup orang-orang kaya.

Kemudian, kelompok kaya tadi sukses pula mengalirkan sumber dayanya kepada rohaniawan, yang intens berceramah untuk mempengaruhi kaum proletar agar tetap bersabar dengan kondisi yang ada.

Kaum proletar yang hidupnya tertindas ditenangkan, tak boleh marah. Disuruh bersabar. Kondisi ini dianggap takdir. Dunia itu penjara bagi orang miskin. Diakhirat akan jaya.

Semua tatanan ini langgeng karena struktur puncaknya, diatur oleh kaum borjuis. Negara ditopang oleh orang kaya. Yang menggaji negara adalah kelompok borjuis. Maka struktur ini menjadi amat kokoh.

Ini yang kemudian dikritik keras oleh Karl Mark. Kata Mark, kalau dibiarin begini yang sengasara akan sengasara terus. Ini sudah sistemik.

Maka...Mark lalu merumuskan sebuah konsep revolusi. Perkembangan sosial harus dirancang, inilah yang oleh Mark disebut teori komunisme. Dan komunisme adalah bentuk dari sosialisme revolusioner. Yaitu sebuah penyadaran terhadap

kelompok proletar agar mereka melawan penindasan. Kaum proletar wajib memberontak.

Sehingga kaum proletar harus berusaha membebaskan diri. Melakukan perjuangan kelas. Pada akhirnya meletuslah pertarungan borjuis versus proletar. Mark berfikir akan terjadi benturan dahsyat. Para pekerja akan memberontak pada kelas atas, pada tuannya sendiri. Karena orang kaya jumlahnya lebih sedikit dari kelas pekerja, maka, jangan khawatir, kata Mark. Ketika terjadi perang... yang menang pastilah kaum proletar.

Asal kompak dan semuanya sadar, pasti akan lahir sosialisme. Yaitu ketika kelompok proletar yang keluar sebagai pemenang. Ketika proletar menang, yang harus dilakukan kemudian adalah memimpin dengan diktator. Orang miskin tadi, setelah menang perang, langkah pertama mereka adalah menata dunia sosial dengan menjadi diktator. Kalau tak begitu, cita-cita sosialisme tentu tidak akan pernah terwujud.

Setelah jalan, masyarakat tertib, kelas terhapus, lahirlah yang namanya komunisme. Yaitu masyarakat tanpa kelas. Masyarakat yang tak butuh lagi negara. Semua orang sudah kompak, sudah bekerjasama, masyarakat yang sudah komunal. Masyarakat yang tidak butuh diatur-atur lagi.

Diktator proletariat dibutuhkan untuk melumpuhkan kelompok kapitalis. Supaya tidak muncul kounter revolusi. Maka, kata Mao Zedong, kekuasaan itu lahir dari laras bedil. Demi penataan dan kesetaraan diperlukan kepemimpinan diktator.

Konsep Mark itu lantas kemudian menjadi legitimasi oleh pengusung ideologi komunis yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.

Sejumlah kelemahan komunisme Mark berikutnya, adalah tidak adanya kebebasan individual. Seperti di Korea Utara, bahkan sampai model rambut saja diatur oleh negara. Warna baju juga diatur. Harus seragam.

Kemudian, untuk menyadarkan para pekerja tadi, pendapat Lenin diperlukan semacam agen. Untuk diajak memberontak pekerja harus dimobilisasi. Maka menurut Lenin, perlu dibentuknya sebuah partai komunis. Agen yang dalam bentuk partai ini bertugas khusus menyadarkan kaum proletariat.

Realitanya...tak gampang membunuh kapitalisme. Sebab mereka bisa beradaptasi dengan kondisi zaman. Kelas pekerja juga tidak selamanya menjadi musuh kapitalis. Dalam perkembangannya, bahkan kelas pekerja bisa menjadi mitra dan bekerjasama dengan kapitalis.

Banyak diantara kelas pekerja kemudian bergaji besar. Mereka diberi fasilitas mewah oleh kelompok kapitalis. Dan kesalahan prediksi Mark, bahwa tidak selamanya kapitalis menindas kelas pekerja.

Teori Mark menjadi tidak relevan dengan sifat dasar manusia. Yang terakhir adalah bentuk sosialisme evolusioner. Sosialisme ini setuju dengan komunisme, khususnya dalam aspek kesetaraan. Tapi, cara mewujudkannya tidak revolusi tapi demokratis. Kapitalisme dimodifikasi dengan unsur sosialis. Paham ini masih membolehkan kapitalisme.

Orang boleh punya korporasi. Boleh punya tanah. Tapi yang menyangkut kebutuhan orang banyak tetap harus dikuasai negara. Tidak segala hal diatur dan dibagi rata. Negara menguasai hal yang hanya menjadi hajat hidup orang banyak. Paham ini tetap mengakui hak kepemilikan individu. Di sini, negara tidak mengontrol penuh.

Itulah sosialisme sebagai sebuah ilmu.

Nasionalis Kiri

DN Aidit mengklaim PNI yang didirikan Soekarno pada 1927 merupakan partai nasionalis kiri. Aidit menyebut PNI menjadi baju baru bagi kader PKI, yang organisasinya baru saja dibubarkan dan dianggap partai terlarang oleh pemerintah kolonial Belanda, pasca mereka melakukan pemberontakan tahun 1926.

Menurut Aidit, kader-kader dan anggota PKI saat itu banyak memasuki partai yang mereka sebut sebagai nasionalis kiri itu. Sukarno tahu bahwa kekuatan riilnya justru ada di PKI. Bung Karno sendiri tidak mempercayai lagi PNI yang sudah redup seiring dengan pemborjuisan para pemimpinnya sejak kepemimpinan Hardi di tahun 1950-an.

Sukarno yang sudah terlatih dalam memahami gelombang sejarah tentunya sudah menebak ke arah mana dunia bergerak. Hal ini bisa kita lihat kemampuan Sukarno dalam melakukan taktik-taktik politiknya yang cenderung memanfaatkan kekuatan

lawan untuk kepentingan politiknya tanpa harus mengeluarkan tenaga atau bertarung frontal.

Melihat realitas dunia yang sudah berubah serta perkembangan politik Indonesia yang nyaris mengalami perpecahan maka jalan satu-satunya adalah menyatukan kekuatan politik inti dan membubarkan kekuatan-kekuatan politik yang cenderung menjadi mesin perpecahan persatuan Indonesia.

Nasakom adalah bahasa Sukarno untuk menyebut persatuan itu.

Sedari muda Sukarno sudah sadar bahwa tiga aliran besar ini yang menjadi inti dari dinamika pergerakan politik Indonesia. Maka, komunis harus dimasukkan kembali ke dalam struktur kekuatan politik Indonesia agar jangan terjadi gelombang perpecahan baru.

Bagi Soekarno, melalui persatuan politik Nasakom-lah Indonesia mampu mewujudkan cita-cita menuju kemakmuran sesungguhnya. Menjadi pemain tunggal di lingkaran kekuasaan, PKI merasa punya kekuatan surplus. Mereka belakangan menyiapkan kudeta dengan memanfaatkan momentum sakitnya Bung Karno.

Ada anggapan bila Sukarno mati maka PKI-pun akan mati. Di samping PKI, memang teridentifikasi sebagai organisasi yang kerap melancarkan operasi kudeta. Sejak awal kemunculannya, PKI berusaha merebut kekuasaan dengan cara paksa, bahkan sampai tega menumpahkan darah.

Bagaimana sejarah pemberontakan PKI di tahun 1926 lalu dilanjutkan kudeta Madiun tahun 1948, cukup menggambarkan

bagaimana PKI selalu identik dengan organisasi yang kerap memaksa dalam merebut kekuasaan. PKI yang bangkit kembali dan merasa sudah siap lantas kembali melancarkan sebuah kudeta, di malam 30 September 1965.

Disokong tentara kader PKI, di bawah kepemimpinan Letkol Untung, Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Cakrabirawa, rencana kudeta itu nyaris berhasil. Kudeta tentu saja dimaksudkan untuk berkuasa dan membentuk negara komunis, yang sudah diidam-idamkan sejak lama.

Ada satu golongan yang tidak mau dekat dengan kelompok Bung Karno. Kelompok ini memiliki jaringan pengaruh paling kuat bahkan sampai detik ini. Mereka memiliki pengaruh besar atas gagasan modernisasi Indonesia dan ikut berperan dalam penjurangan Sukarno. Kelompok ini juga memberikan api perlawanan terhadap Suharto sejak peristiwa Malari 1974 sampai pada gerakan Reformasi 1998.

Mereka adalah lingkaran Sjahririan yang biasa disebut orang-orang PSI dengan haluan ideologi Sosialis Kanan. Hatta, Sumitro Djoyohadikusumo dan beberapa jaringan minang yang sempat ditumpas Soekarno karena dianggap terlibat PRRI adalah tokoh sentral di kelompok itu. Bagi kelompok sosialis kanan ini, Suharto adalah satu-satunya alternatif agar Indonesia tidak jatuh ke tangan Komunis atau juga tidak menjadi negara Islam. Jadi faktor Suharto merupakan jalan buntu bagi kekuatan modernis Indonesia. Nah, di tahun 1998, kelompok ini menganggap ada kemungkinan bila Suharto jatuh maka yang berkuasa adalah kelompok yang dekat dengan komunis atau juga ketakutan akan berdirinya negara Islam.

Lingkaran Sjahrir umumnya adalah bekas aktivis PNI Pendidikan pada 1930-an. Mereka adalah keturunan keluarga berada dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Selama di PNI Pendidikan, mereka digembleng oleh Sjahrir--juga Hatta-- ,menjadi aktivis patuh, intelek, dan berideologi kuat. Jaringan kelompok ini masih cukup kuat dan berpengaruh hingga sekarang.

Perangai Manusia Versi Machiavelli

Niccolo Machiavelli punya karya monumental, *IL PRINCIPLE* (Sang Pangeran). Buku itu menjadi kitab suci para pemimpin diktator. *IL PRINCIPLE* ditulis Machiavelli pada 1513, dalam sebuah pengasingannya di Florence, Italy. Sejarah mencatat Machiavelli terkenal sebagai seorang penasihat salah seorang penguasa, yang sukses menaklukkan Italy. Mussolini, Hitler, Stalin amat ngefens dengan Machiavelli. Seorang Napolen Bonaparte saja, sampai menaruh buku itu di bawah bantal. Sebelum tidur, ia akan memamah buku Machiavelli sampai tuntas.

Tokoh yang menjadi rujukan para diktator itu tergolong kelompok yang percaya bahwa manusia secara natural berperangai jelek dan jahat.

Ada 6 ciri perangai jahat manusia, versi Machiavelli. Pertama adalah tamak.

Menurut Machiavelli, hakikat manusia itu tamak. Ketika tujuan satu tercapai, dia tak berhenti di situ. Pastilah akan mengejar tujuan berikut. Manusia selalu ingin begitu. Tak

pernah puas. Kalau bisa diraih, semuanya akan diraih. Sudah satu kepingin dua. Manusia selalu mengulang sesuatu yang enak-enak. Terus begitu, bahkan sampai mati. Makanya manusia kerap saling menjatuhkan. Tega saling telikung. Semuanya demi memenuhi hasrat masing-masing. Perangai kedua adalah egois.

Tabiat manusia itu, kata Machiavelli, selalu ingin menguntungkan diri sendiri. Kadang keinginan itu dibungkus dengan kearifan. Kebijakan.

Selalu saja manusia ingin mencari enaknya sendiri. Sebab, menurut Machiavelli, manusia itu biasanya tidak kuat hidup susah.

Ini perangai ketiga: manusia selalu ingin segera lepas dari bahaya. Ada penguasa tertentu yang tega membuat rakyatnya susah, limbung, takut. Lalu dibuatlah semacam kesulitan. Nanti dia hadir sebagai pahlawan.

Penguasa itu tahu, bahwa watak manusia itu selalu ingin lepas dari bahaya.

Selanjutnya tak tahu terimakasih.

Manusia itu cepat sekali melupakan jasa orang lain. Selalu menganggap biasa kebaikan seseorang. Yang selalu muncul di kepalanya adalah kepentingan sendiri. Selalu aku dan ego.

Kadang-kadang sesudah mengucapkan terimakasih, besoknya tega menyakiti orang yang memberinya kebaikan itu. Inilah ciri manusia yang selalu tidak punya rasa terimakasih.

Perangai berikutnya adalah suka mencla-mencle. Manusia itu, kata Machiavelli, suka plin plan. Pagi tempe sore kedelai. Tadi itu... sekarang ini. Sewaktu jadi teman ngomongnya begini.

Ketika musuhannya ngomongnya begitu. Selalu yang ditonjolkan adalah kepentingan. Dulu berteman sekarang berlawanan. Manusia punya karakter itu. Terakhir adalah suka menyembunyikan sesuatu.

Antara yang dirahasiakan dengan yang ditampilkan berjarak. Manusia selalu suka menyembunyikan banyak rahasia tentang dirinya. Bahkan orang paling dekat saja bisa tidak tahu. Machiavelli menunjukkan manusia itu punya karakter jelek, seperti tadi.

Bagaimana bila karakter manusia yang begini masuk ke ranah politik?

Mengerikan bukan?

Makanya...Kata Machiavelli, politik itu tidak ada hubungannya dengan moral. Kita sering digelisahkan atas kelakuan politik yang tak etis. Tega mengukudeta mantan pimpinan, misalnya. Tapi, kata Machiavelli, politik itu ya selalu begitu..tidak ada ada hubungannya dengan moral. Inilah realitanya, kata Machiavelli. Kalau orang sudah masuk politik, yang bunyi duluan adalah kepentingannya, ambisinya. Bukan etika, bukan moralnya.

Machiavelli lalu memberi petunjuk bagaimana menjadi pemimpin. Menurutnya, kalau ingin sukses pemimpin harus bicara yang nyata-nyata. Bukan bicara ideal. Pemimpin itu harus kejam. Kalau menghukum orang, jangan setengah-setengah. Dihukum saja sampai kapok. Sampai dia tak berani membalas dendam. Kalau tak kejam, ada potensi ia akan mengulangi perbuatannya dan kembali menyusahkan.

Machiavelli mengajarkan penguasa agar fokus hanya pada hasil. Menghalalkan segala cara dibolehkan. Yang penting tujuannya tercapai. Yang penting bisa meraih dan mempertahankan kekuasaan. Yang penting pemerintah dan negara harus tegak. Apapun caranya. Negara tak boleh jatuh. Apakah dengan cara yang licik atau curang, negara harus dipertahankan dan tak boleh tumbang.

Untuk apa cara ruwet kalau tujuannya tak terealisasi. Kebenaran itu dilihat dari efek atau hasilnya. Terserah prosesnya bagaimana. Ibarat mahasiswa di sebuah kampus, yang penting bagaimana bisa lulus. Terserah bagaimana caranya. Entah dengan belajar serius. Lewat cara curang. Dengan mendekati dosen lalu membawa buah-buahan ke rumahnya. Itu dibolehkan. Yang penting hasilnya; lulus dengan nilai bagus. Begitulah, beberapa konsep kepemimpinan versi Machiavelli.

Seorang penguasa, kata Machavelli, harus ambisius. Harus kuat. Harus digdaya. Berani ambil resiko. Berani membuat sistem dan aturan yang menguntungkan dirinya. Tapi, percayalah..di luaran sana, masih banyak orang-orang berperangai baik. Masih banyak politisi-politisi yang membangun kenyataan berbeda, bahwa berpolitik dan bermoral bisa jalan seiring. Orang-orang baik itu berusaha mengubah teori Machiavelli. Bahwa berpolitik sekaligus bermoral bukan dua hal yang bertentangan.

Lalu, menjadi pemimpin itu, apakah baik dicintai atau ditakuti? Ini Nasehat Machiavelli untuk sang Pangeran. Sebagai penasehat kerajaan, Machiavelli hendak memastikan seorang pangeran itu punya kapasitas kuat dalam kepemimpinan.

Supaya negara berdiri kokoh, tanpa gejolak. Versi Machiavelli, pemimpin itu lebih baik ditakuti daripada dicintai.

Mengapa?

Karena...manusia secara natural punya perangai buruk (Tamak, ingin untungnya sendiri, segera ingin melepaskan diri dari marabahaya, tak tahu terimakasih, mencla-mencle, suka menyembunyikan sesuatu). Maka, pemimpin itu harus kuat. Harus ditakuti.

Boleh jadi saat sekarang ia menyatakan suka. Kalau nanti kepentingannya berubah atau merasa terancam dengan kehadiran kita, maka kesukaannya akan berbalik. Yang tadinya muji-muji bisa berbalik menyerang. Beda kalau dasarnya takut. Menurut Machiavelli, kalau dia sudah takut, apapun situasinya, dia takkan berani macam-macam. Yang diperintahkan pasti akan dipatuhi. Inilah pandangan Machiavelli. Jadilah pemimpin yang ditakuti.

Makanya, buku Machiavelli menjadi pedoman para diktator. Mereka belajar dari Machiavelli bagaimana menciptakan ketakutan. Manusia jika sudah diserang rasa takut tak akan berani melakukan pemberontakan. Sebagai makhluk politik, manusia itu ambisius. Selalu yang didahulukan individunya. Jenjang karirnya. Progres kelembagaan pribadinya. Mengamankan dirinya biar tak diserang orang lain. Berambisi untuk mengalahkan orang lain. Nah, Konteks tulisan Machiavelli di *IL PRINCIPLE* itu sebenarnya untuk memperkuat negara. Konsep pemikirannya itu mesti dilihat dari kaca mata medis, bukan etis.

Nasehatnya kepada pangeran, supaya kerajaan berdiri kokoh, tidak mudah limbung dan jatuh ke tangan pemberontak. Sehingga, bukan berarti semua gagasan Machiavelli dalam *IL PRINCIPLE* itu jelek. Ada banyak prinsip kepemimpinan ala Machiavelli yang sangat bermanfaat untuk rujukan kita semua. Prinsip pertama, persenjатаi dirimu.

Maksudnya, anda sebagai seorang pemimpin mesti punya pasukan dan senjata. Dalam konteks sekarang, perdayakan dirimu antarlain dengan ilmu pengetahuan. Hidup itu harus punya andalan. Andalan yang paling baik adalah kualitas diri yang baik. Skillnya harus ditambah. Semakin banyak skil, ilmu, semakin kuatlah kita. Makin tangguhlah kita.

Bangun andalan-andalan dalam hidupmu. Pemimpin yang kuat selalu punya banyak andalan. Persenjатаi dirimu dengan banyak hal. Termasuk koneksi, relasi dan sebagainya. Prinsip berikut adalah kemampuan dan kesempatan. Dua hal ini kunci sukses seorang pemimpin. Sebagai raja, anda harus memerhatikan dua kombinasi ini.

Sebagai contoh, ada anak yang pintar nulis, tapi kesempatan menulisnya tidak ada. Karena disibukkan oleh aktivitas mencari uang, akhirnya dia tak pernah punya kesempatan untuk menulis. Sehingga kemampuan menulisnya menjadi tiada berguna.

Atau kesempatan menulisnya banyak. Fasilitas lengkap. Laptop ada, buku banyak. Tapi dia tak punya skill dan kemampuan. Pemimpin harus bisa menghidupkan dua hal ini. Kalau lemah di kemampuan, tingkatkan kemampuan anggotanya. Kalau lemah di kesempatan, ciptakan

kesempatannya sehingga kemampuannya tersalurkan. Ini dua kunci seorang pemimpin.

Prinsip berikut, cerdik dan kuat. Kata Machiavelli, seekor singa tak bisa melindungi dirinya dari perangkap. Rubah tak bisa membela diri dari srigala. Maka, pemimpin harus bisa menjadi rubah untuk mengenali perangkap dan bisa menjadi singa untuk membuat takut srigala.

Seorang pemimpin, menurut Machiavelli, harus punya kualitas rubah dan singa. Sehingga dia mampu mendeteksi perangkap dan jebakan. Sekaligus pula bisa menebar rasa takut. Kualifikasi rubah yang mesti dimiliki antarlain, harus cerdik, wawasannya mesti luas. Biar tidak diperdaya, tidak mudah dijebak. Tapi, tak sebatas kualitas rubah saja. Pemimpin juga mesti punya kualitas singa.

Apa itu?

Kuat, berani bertarung dan punya wibawa. Kalau tak punya kewibawaan, pemimpin akan ditabrak oleh musuh yang kuat. Akan mudah ditumpas oleh musuh yang lebih ganas.

Prinsip seorang pemimpin berikutnya, kata Machiavelli, jika berharap dipatuhi harus tahu caranya memerintah. Pemimpin harus belajar cara mengajak. Cara menghimbau. Cara menarik perhatian orang lain. Biar ditaati. Juga harus belajar bijaksana.

Ketika kita sudah capek mengeluarkan intruksi, tapi tak ada yang mengikuti. Jangan-jangan kita yang kurang mampu dalam hal seni memerintah. Karena manusia bukan makhluk yang gampang digerakkan.

Maka, manusia kadang harus dibuat takut, dibikin ngeri, harus dirayu, harus dibuat simpati.

Karena manusia punya 6 perangai jelek itu.

Guru misalnya, kadang susah menyuruh murid diam. Jangan-jangan cara kita menarik perhatian yang perlu belajar lagi. Ini ada hubungannya dengan seni memerintah. Bagi seorang pemimpin, seni memerintah itu penting. Maka, belajarlah...Prinsip selanjutnya, benteng terbaik yang mungkin dimiliki seorang pangeran atau raja adalah rasa suka dan rasa sayang masyarakatnya. Sebagai pemimpin, kata Machiavelli, kita butuh benteng pertahanan terbaik. Supaya tidak dijatuhkan. Orang-orang yang kita pimpin kudu merasa suka dan sayang. Inilah benteng terbaik itu.

Jika cinta yang tumbuh, maka mereka akan membela kita. Akan mendukung kita, apapun situasinya. Maka perjuangan seorang pemimpin adalah bagaimana memenangkan hati orang-orang yang dipimpinya. Silahkan lakukan apa saja yang penting mereka suka dan mendukungmu.

Sebagus apapun pemimpin kalau hati rakyat tak digenggam, tentu tidak akan sukses. Tumbuhkan selalu rasa kasih sayang. Sehingga mereka mau bergerak untuk anda. Bergerak secara totalitas.

Prinsip selanjutnya, kalau keinginan sudah besar tidak mungkin ada kesulitan besar. Jadi pemimpin itu harus punya keinginan dan cita-cita besar. Sebesar apapun kesulitan bukan masalah. Karena masalah itu akan kalah besar dengan keinginan. Semakin besar keinginan tentu semakin kecil rintangan.

Targetkan hal besar dan kerjakan sungguh-sungguh. Prinsip berikut, lebih baik bertindak dan menyesal, daripada

tidak melaukan apa-apa lalu menyesal. Yang penting sudah ada ikhtiar.

Pemimpin harus berani membuat keputusan. Salah dalam bertindak itu biasa. Dengan itu anda punya bahan untuk melakukan perbaikan.

Pemimpin juga harus jeli. Ada saatnya keputusan diambil dan dijalankan. Dari pada ragu-ragu dan tidak bertindak. Nanti anda akan kehilangan momentum.

Prinsip terakhir, tidak pernah suatu hal yang luar biasa dicapai tanpa marabahaya. Menjadi pemimpin, kata Machiavelli, harus berani mengambil resiko.

Sekali lagi, bacalah karya Machiavelli dari sudut pandang medis, dari perspektif pertahanan, bukan etis atau moral.

Abangan Versus Putih

Salah satu guna ilmu sejarah adalah menjelaskan sebab musabab terjadinya sebuah peristiwa. Tidak ada kejadian sosial politik yang berdiri sendiri. Ia selalu berkelindan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Sebagai contoh, meruyaknya kekerasan atas nama Islam dan meningginya semangat keberagaman di Indonesia akhir-akhir ini kerap dijelaskan dengan merujuk pada era Soeharto. Bagaimana sikap antagonis Soeharto terhadap Islam.

Hal itu kerap diklaim telah emndorong tumbuhnya gerakan radikal. Tekanan rezim orde baru yang berlebihan terhadap gerakan Islam politik dianggap membuat artikulasi kesilaman mereka tersumbat.

Benarkah begitu?

Buku berjudul NUSANTARA (Sejarah Indonesia) yang ditulis seorang peneliti asal Belanda, Vlekke, menjawab pertanyaan penting itu. Buku ini merupakan hasil riset Vlekke sejak tahun 1940 dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1943. Buku ini menjelaskan, bangkitnya semangat keagamaan belakangan ini tidak muncul begitu saja. Tidak bisa hanya di potret dari satu faktor tekanan Orde baru saja, misalnya.

Tapi, ia merupakan rangkaian perjalanan panjang islamisasi di Indonesia. Proses penguatan karakter Islam bermula sejak 1830, setelah berakhirnya Perang Jawa dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro. Pada masa ini terjadi gelombang pasang kaum putihan dalam sejarah Indonesia.

Putihan merujuk kelompok santri. Istilah ini digunakan untuk membedakannya dari Islam abangan.

Istilah putihan lebih populer sebagai lawan kata abangan. Menelusuri istilah putihan dan abangan di era 1800an itu penting untuk menyibak awal mula terjadinya polarisasi dalam masyarakat Islam di Jawa. Istilah abangan dimunculkan oleh kelompok putihan, yang menganggap abangan adalah kelompok muslim yang menjalankan Islam tidak sempurna. Klaimnya, hanya merekalah, kaum putihan, yang menjalankan Islam secara benar.

Pada mulanya, kehidupan keagamaan di Indonesia lebih diwarnai dengan sintesa mistik, yang diambil dari tradisi dan khazanah budaya pra Islam. Muslim Indonesia pada masa itu menjalankan agama mereka dengan semangat semacam itu. Kaum putihan muncul dan menamai keberagaman itu sebagai

kurang Islami. Kaum abangan distigma orang-orang yang tidak soleh, yang meninggalkan kewajiban-kewajiban agama.

Para haji dan pelajar yang pulang dari Mekkah memainkan peran cukup besar dalam menyemai tumbuhnya kaum putihan di Indonesia. Mereka inilah yang secara gencar dan terus menerus melakukan pemurnian Islam di Nusantara.

Tentu saja, yang menjadi model dan rujukan mereka adalah praktik-praktik Islam yang dijalankan di Timur Tengah, di Arab Saudi khususnya. Pemahaman kaum putihan, praktik Islam lokal, Islam abangan adalah praktik keliru yang musti diluruskan.

Polarisasi atau pertarungan kelompok putihan dan abangan tak hanya terjadi di masa orde baru, apalagi reformasi. Sehingga, fenomena munculnya berbagai gerakan Islam pasca reformasi tak bisa dipisahkan dari akar sejarahnya yang panjang, yakni pergulatan kaum putihan melawan Islam abangan--kaum yang tak menegasikan budaya lokal sebagai ciri khas Nusantara.

Sebagai karya sejarah, buku Nusantara ini menggambarkan potret besar Indonesia. Analisis Vlekke tentang kejatuhan Majapahit misalnya, yang sempat menjadi isu panas sehingga memantik ketegangan antara kelompok putihan dan abangan kala itu, bukan Islam yang menjadi keruntuhan Majapahit. Bukan pula Islam yang menyebabkan peradaban Jawa mundur.

Vlekke menemukan bahwa kejayaan Majapahit, sebuah kerajaan yang diagungkan kaum abangan, runtuh bukan disebabkan oleh kerajaan Islam. Ketika Ayam Wuruk mangkat, belum ada kerajaan Islam di Jawa. Yang sesungguhnya terjadi adalah selama periode kemunduran Majapahit, armada asing

dari China mulai menguasai jalur perdagangan di Nusantara. Dan mulai tahun 1400an, para pelaut eropa (Spanyol dan Portugis) berdatangan dan merapat ke pantai Jawa.

Dua kekuatan besar ini (Armada China-Spanyol dan Portugis) memainkan peran sangat penting atas semakin terpinggirnya kerajaan hindu di Jawa. Menurut Vlekke, seiring kemunduran Majapahit di sisi lain mulai munculnya kerajaan kecil Islam. Dan bagi raja muslim jawa, Majapahit bukan musuh.

Bahkan mereka mengagumi Majapahit dan berusaha meniru masa kejayaannya ketimbang mendiskreditkan. Sehingga, raja islam Jawa lebih dekat ke tradisi Majapahit ketimbang tradisi Islam di semenanjung arabia. Budaya lokal yang sudah dipelihara sejak kejayaan Majapahit diteruskan oleh raja-raja muslim Jawa.

Ada penjelasan menarik dari Vlekke, yang menjelaskan mengapa masyarakat Jawa kala itu berbondong-bondong masuk Islam. Para raja Jawa, kata Vlekke, memilih Islam bukan karena mereka suka dengan agama itu. Tapi, karena situasi politik yang mendorong mereka untuk bertindak demikian.

Ketika Portugis datang, para raja Jawa dihadapkan pilihan sulit antara memilih bersekutu dengan Portugis atau bekerjasama dengan Johor dan Demak (kerajaan Islam saat itu). Melihat perilaku portugis dengan catatan kecurangannya, raja-raja Jawa kemudian lebih memilih Islam. Selain kedekatan budaya, raja jawa mengidentifikasi Islam sebagai agama yang memberikan fleksibilitas yang tinggi ketimbang agama Kristen yang dibawa Portugis.

Jika mereka masuk agama Kristen, bukan hanya harus tunduk pada kekuasaan Portugis, tapi juga harus mengganti tradisi mereka dengan budaya baru yang dibawa orang-orang kulit putih itu. Selama beratus-ratus tahun lamanya, raja-raja dan masyarakat Jawa menganggap Islam sebagai agama damai penuh dengan toleransi.

Satu per satu kerajaan Nusantara kemudian jatuh ke tangan Belanda. Pada 1680, hampir seluruh perairan yang pernah dikuasai Majapahit dirrestorasi oleh Belanda. Jadilah kekuatan kolonial ini sebagai imperium besar.

Kendati demikian, kontrol Belanda atas Nusantara tidaklah mudah. Selama tiga setengah abad keberadaannya, Belanda menghadapi ratusan pemberontakan dan puluhan lusin konflik sosial dan perang. Perlawanan paling gigih dan paling ditakuti Belanda sepanjang sejarah adalah pemberontakan yang mengatasnamakan Islam. Bukan karena Islam memiliki persenjataan canggih atau organisasi paramiliter yang kuat.

Yang ditakuti Belanda adalah penggalangan solidaritas keagamaan lewat narasi JIHAD. Dengan segera wacana jihad mengorbankan semangat juang. Belanda harus bekerja keras membasmi gerakan jihad dan berusaha menangkap para pemimpinnya. Jihad yang dikomanodi Diponegoro merupakan gerakan yang paling berbahaya dan paling massiv yang pernah dihadapi Belanda di Jawa.

Perang Jawa ini berlangsung selama 5 tahun dan menciptakan trauma besar bagi Belanda. Jihad menjadi kata yang sangat menakutkan. Orang-orang Jawa yang mulanya toleran tiba-tiba menjadi pemberang dan mudah membunuh.

Kegelisahan ini lalu mendorong Belanda menurunkan Cristian Snouck Hurgronje, profesor di Universitas Leiden untuk meneliti dan mempelajari kenapa Islam bisa membuat orang Jawa memberontak, mudah marah dan bersedia mati demi agamanya.

Hasil riset Hurgronje, salah satu faktor penting yang membawa pola keberagaman orang-orang Indonesia berubah adalah para haji dan pelajar Jawi yang pulang dari Mekkah. Sepulang dari Mekkah, mereka tak hanya membawa kurma dan air zam-zam, melainkan pemahaman keislaman yang kaku dan intoleran.

Melihat ketidakadilan yang terjadi di kampungnya, para haji dan pelajar jawi asal Mekkah menemukan perpaduan yang cocok untuk melawan ketidakadilan dengan keinginan menjadi lebih saleh. Sehingga Jihad melawan kafir londo adalah jawaban yang paling tepat kala itu.

Meksipun kafir londo sudah pergi dan Nusantara sudah merdeka, semangat jihad dan api perang jawa masih terus berkobar. Kali ini musuhnya bukanlah pemerintah kolonial, tapi pemerintah muslim yang dianggap kurang Islami. Berbagai kelompok islam radikal dan konservatif yang banyak muncul belakangan ini, yang menggunakan cara-cara kekerasan adalah pewaris kaum putihan.

Mereka menganggap dunia di sekelilingnya telah menjadi abangan. Meski masyarakat Indonesia secara umum sudah Islami, kaum putihan selalu merasa bahwa yang lain adalah abangan dan hanya diri mereka sendiri yang putih, suci dan bersih. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan

menyelami akar sejarah bangsa ini, agar bisa membaca dan memprediksi bagaimana nasib kehidupan keberagaman bangsa kita di masa depan.

Sejarah Ringkas Pancasila

Perdebatan tentang dasar negara Indonesia dimulai sejak masa penyusunan UUD 1945 di BPUPKI. BPUPKI dibentuk Jepang 29 April 1945, beberapa bulan menjelang Proklamasi. Anggotanya 62 orang dari berbagai latar belakang.

BPUPKI membagi masa sidang dalam dua tahap. Tahap satu dimulai 29 Mei hingga 1 Juni 1945 membahas dasar negara. Tahap dua 10 Juli hingga 17 Juli 1945 membahas bentuk negara. Pemikiran mengenai dasar negara dibahas secara bergantian oleh Soekarno, Soepomo dan Muhammad Yamin mewakili kelompok masing-masing. Konsepsi tentang dasar negara kemudian mengerucut dalam dua kutub besar.

Ada yang menginginkan negara dibangun tanpa kaitan khusus pada ideologi keagamaan. Kelompok kedua menghendaki agar negara Indonesia berdasarkan Islam. Munculnya dua konsepsi berlainan itu dipengaruhi latar belakang ideologi para pengagasnya. Saat itu, elit modern pra Indonesia dipengaruhi ideologi besar yang hidup kala itu, yaitu Islam, nasionalisme dan ideologi barat modern (liberalisme, kapitalisme dan komunisme).

Masalah hubungan agama dan negara terus menerus menjadi bahan perdebatan yang tak pernah usai. Tiga tokoh penting tadi kemudian berpidato di sidang BPUPKI menyampaikan konsepsinya tentang dasar negara.

Muhammad Yamin bicara pada urutan pertama tanggal 29 Mei 1945. Soepomo bicara di urutan kedua tanggal 31 Mei 1945. Terakhir Soekarno bicara pada tanggal 1 Juni 1945. Yamin mengemukakan negara dibentuk atas dasar kebangsaan dan ke-Tuhanan. Yang akan ditumbuhkan, kata Yamin, bukan nasionalisme Indonesia pertama (Syailendra-Sriwijaya tahun 600-1400). Bukan pula negara Indonesia kedua (Majapahit tahun 1293-1525).

Tapi adalah negara Indonesia baru yaitu negara kebangsaan yang berketuhanan. Yamin lantas menyampaikan lima asas sebagai dasar Indonesia merdeka, yaitu peri-kebangsaan, peri-kemanusiaan, peri-ketuhanan, peri-kerakyatan dan kesejahteraan rakyat.

Soepomo sebagai pembicara kedua menyampaikan yang hendak didirikan adalah negara nasional yang bersatu. Negara yang tidak mempersatukan dirinya hanya dengan golongan terbesar. Tapi menghormati keistimewaan dari segala golongan. Negara yang menghargai beragam latar belakang.

Sehingga, kata Soepomo, Indonesia adalah negara nasional yang bersatu di atas keberagaman dan urusan agama diserahkan kepada masing-masing golongan. Soekarno sebagai pembicara terakhir pada 1 Juni 1945 menyatakan dasar negara Indonesia adalah kebangsaan, perikemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan dan Ketuhanan.

Soekarno lantas menyebut kelima dasar itu sebagai PANCASILA. Ternyata pada sidang BPUPKI pertama itu, perdebatan mengenai hubungan agama dengan negara tidak pernah mencapai titik temu. Sementara waktu sudah semakin

dekat untuk menyatakan kemerdekaan, sebagaimana dijanjikan Jepang.

BPUPKI hari itu juga, pada 1 Juni 1945, kemudian membentuk panitia kecil yang disebut panitia sembilan. Mereka adalah Soekarno, Hatta, AA Maramis, Ahmad Soebardjo, Muhammad Yamin, R Abikusno Tjokrosuyoso, KH Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim dan KH Wachid Hasyim.

Tugas utama panitia sembilan ini menyatukan pendapat dari dua kutub besar yang bertentangan. Pada akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945 diperoleh kesepakatan penting dasar negara oleh panitia sembilan dan memperoleh persetujuan sebulat-bulatnya oleh anggota sidang BPUPKI.

Berikut bunyi dasar negara hasil kesepakatan tersebut, Indonesia yang berkedaulatan berdasar kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara eksplisit pada sila pertama tertulis ketentuan "Dengan kewajiban menjalankan syairat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Kalimat ini merupakan hasil kesepakatan di antara Panitia Sembilan sebagai jalan tengah untuk mengakomodasi perbedaan dua kutub besar.

Kesepakatan panitia sembilan ini kembali dipersoalkan pada masa sidang kedua BPUPKI. Masih ada yang keberatan dengan rumusan tujuh kata tadi.

Hatta salah satu yang berpendapat akan sangat mengkhawatirkan bila tujuh kata tersebut tetap dipertahankan. Karena akan sangat membahayakan persatuan kebangsaan yang beraneka ragam di Indonesia.

Wahid Hasyim justru lebih tegas lagi. Ia mengusulkan Presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam dan agama negara adalah agama Islam.

Situasi ini menimbulkan perbedaan pendapat yang semakin tajam. Sempat muncul usulan agar rumusan itu diputuskan lewat pemungutan suara. Tapi, usulan itu ditolak karena pendapat itu tidak dapat diselesaikan dengan pemungutan suara sebab menyangkut masalah agama.

Dengan berlinang air mata, pada 16 Juli 1945, Soekarno mengimbau terhadap rumusan itu hendaknya semua sedia berkorban meninggalkan pendapatnya demi persatuan Indonesia.

Pada akhirnya mereka menerima himbauan Soekarno dan rumusan itu diterima akalmasi pada tanggal 16 Juli 1945. Penyelesaian ini menunjukkan bahwa pada saat Proklamasi kemerdekaan, rancangan pembukaan UUD 1945 masih mengandung anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dan presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam.

Tapi, rumusan itu tidak berumur panjang. Sehari pasca Indonesia merdeka, pada tanggal 18 Agustus 1945, kesepakatan tersebut digugat kembali. Hatta adalah tokoh yang menganjurkan tujuh kata ditinjau ulang karena khawatir akan merusak persatuan Indonesia.

Hatta sudah mencium munculnya ancaman dari beberapa wilayah Indonesia timur untuk melepaskan diri dari Indonesia apabila tujuh kata tersebut tidak dicabut.

Hatta menyarankan pasal-pasal berkaitan Islam sebagai agama negara, syarat Presiden haruslah orang Islam dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dihilangkan. Semuanya demi persatuan dan usaha mempertahankan Republik yang baru terbentuk.

Golongan Islam ternyata bersedia mengalah demi mempertahankan kelangsungan negara Indonesia. Sehingga hasil kesepakatan itu merumuskan isi Pancasila adalah seperti yang kita hafal dan sering dibacakan pada saat upacara bendera, yaitu Pancasila yang menjunjung tinggi keberagaman, tidak mengistimewakan agama tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Rujukan :

Rauf, Maswadi, *Konsensus Politik, Sebuah Penjajagan Teoritis*, Jakarta : Dirjen Dikti Depdiknas, 2000.

Habibie, BJ, *Detik-detik yang menentukan*, Jakarta : THC Mandiri, 2006.

Ma'ruf, Ade, Prabowo Subianto, *Jalan Terjal Seorang Jenderal* , Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2013.

Mahpudi Dkk, *Pak Harto The Untold Stories*, Jakarta : Kompas Gramedia, 2012.

Hamka, Irfan, *Ayah, Kisah Buya Hamka*, Jakarta : Republika, 2013.

Robison, Richard, *Soeharto dan Kebangkitan Kapitalisme Indonesia*, Jakarta : Komunitas Bambu, 2012.

Vlekke, Bernard, *Nusantara Sejarah Indonesia*, Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2016.

Hart, Michael, *IL Principle (sang Pangeran)*, Jakarta : Buku Kita, 2008.

Ishiyama Dkk, *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Kedua Puluh Satu*, Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2013.

Sumber Internet :

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190731151611-4-88890,blok-gas-greater-sunrise-kisah-diplomasi-minyak-3-negara>

<https://news.detik.com/abc-australia/d-3903103,australia-timor-leste-setuju-berbagi-kekayaan-migas-di-celah-timor>

<https://www.matamatapolitik.com/amerika-ketahui-rencana-teror-dan-kekerasan-indonesia-di-timor-leste-historical>,

<https://kotakpandoras.wordpress.com/2018/09/27/alasan-clinton-china-menggulingkan-suharto-pada-1998>,

<https://www.matamatapolitik.com/terungkap-bagaimana-bill-clinton-percepat-kejatuhan-soeharto-historical-in-depth>,